

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(R P J P D)
TAHUN 2005 ~ 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KABUPATEN BUOL TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kabupaten Buol memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undangn Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Pasal 150 huruf e Undang-Undangn Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka RPJPD Kabupaten Buol ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD) Kabupaten Buol periode 2005 – 2025;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembantukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BUOL
dan
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BUOL TAHUN 2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya yang disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Buol untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Pasal 2

- (1) RPJPD Kabupaten adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20

(dua puluh) tahun dengan berpedomen pada RPJP Nasional.

- (2) RPJPD Kabupaten merupakan acuan dalam penjabaran Visi, misi dan program kepala Daerah Kabupaten Buol.
- (3) RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan dalam empat penahapan yaitu:
 - Tahap Awal PROPEDA Tahun 2005-2007
 - Tahap Ke I RPJMD Tahun 2007-2012
 - Tahap Ke II RPJMD Tahun 2012-2017
 - Tahap Ke III RPJMD Tahun 2017-2022
 - Tahap Ke IV RPJMD Tahun 2022- 2025

Pasal 3

Materi RPJPD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan sistemetika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BUOL

BAB III VISI DAN MISI KABUPATEN BUOL TAHUN 2005-2025

BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) RPJPD Kabupaten tahun 2005-2025 harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam jajaran pemerintah daerah.
- (2) Dalam Pelaksanaan RPJPD Kabupaten, Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 01 Mei 2013

BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal ,

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

IBRAHIM RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN

NOMOR

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BUOL TAHUN 2005 – 2025

BAB I	: PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang Pembentukan Daerah	1
1.2.	Pengertian Perencanaan	5
1.3.	Proses Penyusunan RPJPD	6
1.4.	Maksud dan Tujuan	8
1.5.	Landasan Hukum	8
1.6.	Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10
1.7.	Sistematika Penulisan	10
BAB II	: GAMBARAN UMUM KABUPATEN BUOL	
2.1.	Kondisi Saat Ini	11
2.1.1.	Keadaan Geografis	11
2.1.2.	Geomorfologi dan Lingkungan Hidup	23
2.1.3.	Demografi	33
2.1.4.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	39
2.1.5.	Sosial Budaya dan Politik	55
2.1.6.	Prasarana dan Sarana Perhubungan	68
2.1.7.	Pemerintahan	75
2.2.	Prediksi Kondisi Umum Daerah	77
BAB III	: VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH 2005 – 2025	
3.1.	Visi	
3.2.	Misi	91
		95
BAB IV	: ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	
4.1.	Arah Pembangunan Daerah	98
4.1.1.	Mewujudkan Tatahan Masyarakat BERKAH Sejahtera Dalam Kehidupan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila	98
	1. Agama	100
	2. Kebudayaan	101
	3. Pemuda dan Olahraga	102
4.1.2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Terampil, Berilmu Pengetahuan Teknologis, Produktif, Mandiri dan Maju	103
	1. Kependudukan	104
	2. Pendidikan	105
	3. Kesehatan	105
	4. Penelitian dan Pengembangan IPTEK	106
	5. Ketenakerjaan	107
	6. Perempuan dan Keluarga	108
	7. Kesejahteraan Sosial	108
4.1.3.	Mewujudkan Good Governance dan Clent Governance dengan Aparatur Negara Yang Profesional Melayani Masyarakat dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ...	109

1. Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan di Daerah	110
2. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.....	111
4.1.4. Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	113
1. Perekonomian Daerah	115
2. Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura.....	116
3. Perkebunan	116
4. Kehutanan	117
5. Peternakan	117
6. Kelautan dan Perikanan	118
7. Investasi Daerah	119
8. Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah ..	119
9. Pariwisata	121
10. Pertambangan dan Migas	121
11. Perumahan dan Permukiman	121
12. Transportasi	122
13. Sumber Daya Air	123
14. Energi Listrik	123
4.1.5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Inklusif .	124
1. Tata Ruang Wilayah	124
2. Kesejahteraan Sosial	125
3. Pembangunan Perdesaan	126
4. Penanggulangan Kemiskinan	127
4.1.6 Mewujudkan Kabupaten Buol Yang Asri dan Lestari, Bersih dan Indah	128
1. Penataan Ruang dan Kawasan Perbatasan	129
2. Lingkungan Hidup	130
3. Mitigasi dan Bencana Alam	131
4. Sumber Daya Kelautan	132
4.1.7 Mewujudkan Kabupaten Buol Aman, Damai dan Bersatu ...	133
1. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	134
2. Pembangunan Hukum	135
3. Peningkatan Kualitas Informasi dan Komunikasi.....	136
4.2. Peran Pusat Kegiatan Pembangunan Yang Mengacu Pada RTRW	137
4.2.1. Kabupaten Buol Dalam Perspektif Internasional	138
4.2.2. Kabupaten Buol Dalam Perspektif Nasional Dan Antar Wilayah	138
4.3. Tahapan Dan Skala Prioritas	140
4.3.1. Perencanaan Tahun (2005 – 2007)	140
4.3.2. RPJMD ke I (2007 – 2012)	143
4.3.3. RPJMD Ke II (2012 – 2017)	145
4.3.4. RPJMD Ke III (2017 – 2022)	146
4.3.5. RPJMD Ke IV (2022 – 2025)	147

BAB V : KAJIDAH PELAKSANAAN	151
--	------------



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buol Tahun 2005 – 2025 dan saya menyambut baik ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buol Tahun 2005 – 2025.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Buol Tahun 2005 – 2025 merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Disadari bahwa pembangunan akan terimplementasikan dengan baik apabila didukung dengan perencanaan yang komprehensif yang didasarkan atas data yang valid serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan pembangunan 20 (duapuluh) tahun ke depan yaitu “Kabupaten Buol Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera Dalam Tatanan Masyarakat Buol BERKAH”.

Saya berharap RPJPD Kabupaten Buol ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buol dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah serta menjadi dasar penyusunan perencanaan lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah, masyarakat dan kalangan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha dan berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Semoga segala upaya yang mulia dari kita dalam menata pembangunan Kabupaten Buol ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan Ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna memberikan maslahat bagi rakyat Kabupaten Buol.

Buol, 1 Mei 2003

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Pembentukan Daerah

Kabupaten Buol adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Buol Tolitoli pada tahun 1999 dan telah resmi menjadi kabupaten berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan.

Sebelumnya pada pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), Buol merupakan daerah Swapraja yang tergabung dalam daerah Gorontalo, pada saat itu para tokoh masyarakat Buol sudah merintis upaya-upaya untuk menjadikan Buol sebagai kabupaten tersendiri. Upaya itu terus dilakukan, namun karena jumlah penduduk belum banyak yang merupakan salah satu syarat untuk mendirikan satu kabupaten maka untuk memenuhi syarat tersebut bergabunglah dua daerah/swapraja yakni daerah/swapraja Buol dan swapraja Tolitoli. Dengan bergabungnya dua daerah/swapraja ini maka direstui oleh pemerintah pusat berdirinya satu kabupaten dengan menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 1959 tentang pendirian Kabupaten Dati II Buol Tolitoli dan masuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ibu kota berkedudukan di Tolitoli.

Ketika menjadi Kabupaten Buol Tolitoli, kerinduan masyarakat Buol untuk menjadi suatu daerah yang maju dan bisa setara dengan daerah lain yang telah mapan tak kunjung datang, masyarakat Buol merasa dimarjinalkan. Pembangunan lebih banyak dipusatkan di ibukota kabupaten sementara wilayah Buol terabaikan, demikian juga dibidang lainnya seperti Birokrasi, Politik dan lainnya Buol terpinggirkan.



Buol sebagai penggagas/pejuang berdirinya Kabupaten Buol Tolitoli merasa kurang puas dengan pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Buol Tolitoli tersebut, hal ini membuat beberapa tokoh masyarakat Buol, seperti Ir. Abdul Karim Mbouw, Drs. Abdul Karim Hanggi, Drs. Yusuf Butudoka dan dr. Amiruddin Rauf serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya sepakat berjuang untuk menjadikan Buol sebagai kabupaten.

Pada ahir tahun 1996 tokoh-tokoh masyarakat Buol mengadakan musyawarah yang diberi nama **“Temu Akrab Warga Buol (TAWAB)”** dan telah berhasil membentuk satu organisasi yakni **“Ikatan Kerukunan Indonesia Buol (IKIB)”** dengan ketua umumnya Ir. Abdul Karim Mbouw, yang bertujuan untuk merumuskan bagaimana memajukan Buol kedepan yang sangat tertinggal itu. Organisasi inilah yang menggagas, merintis dan memperjuangkan berdirinya Kabupaten Buol yang telah resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Dan telah diresmikan pada tanggal **12 Oktober 1999**, dan **“Ir. Abdul Karim Mbouw”** ditunjuk sebagai pejabat Bupati dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-1146 tanggal 8 Oktober 1999.

Pada tanggal 10 Februari 2000, Ir. Abdul Karim Mbouw meninggal dunia, maka Menteri Dalam Negeri menunjuk pengganti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 131.52-081 mengangkat **“Drs. A. Karim Hanggi”** sebagai pejabat Bupati Buol yang ke II.

Setelah terbentuk DPRD Kabupaten Buol pada tahun 2001 telah diadakan pemilihan Bupati Buol yang defenitif dan yang terpilih menjadi Bupati **“Drs. A. Karim Hanggi”** dan **“Ali Nouk, BA”** sebagai wakil Bupati Buol periode 2002 – 2007 yang telah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah di Gedung DPRD Kabupaten Buol.



Pada awal pembentukannya Kabupaten Buol terdiri atas wilayah : (1) Kecamatan Biau, (2) Kecamatan Momunu, (3) Kecamatan Bokat, (4) Kecamatan Bonobogu, dan (5) Kecamatan Paleleh. Selanjutnya, dalam perkembangan (sampai tahun 2007) menjadi 9 Kecamatan, yaitu: (6) Lipunoto, (7) Tiloan, (8) Bukal, dan (9) Gadung.

FILOSOFI PEMERINTAHAN

Falsafah nilai-nilai budaya lokal yang telah dianut oleh masyarakat Buol yang dijadikan sebagai landasan dalam penataan Kabupaten Buol adalah nilai-nilai budaya lokal tradisional yang dianut secara turun temurun. Nilai-nilai tradisional dimaksud memberikan motivasi dan inspirasi kepada masyarakat Buol dan sebagai acuan bagi setiap pelaku pembangunan dalam menjalankan aktivitasnya.

Nilai budaya lokal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Buol adalah sebagai berikut:

a. Falsafah Pemerintah

Dalam hal bidang pemerintahan meliputi Negri, Rakyat dan Pemerintah di Buol dikenal ada empat unsur dalam pemerintahan, yaitu :

- *Taa Bwurligan* (orang yang diusung) yang dimaksud adalah raja.
- *Taa Mogutu bwu bwulrigan* (orang yang membuat usungan) yang dimaksud adalah orang yang membuat peraturan Negri yang dikenal dengan Bokidu.
- *Taa Momulrigu bwu bwulrigan* (orang yang memikul usungan) yang dimaksud adalah rakyat.
- *Taa Momayungo bwu bwulrigan* (orang yang memayungi usungan) dimaksudkan adalah orang-orang yang menegakkan hukum.



Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian kekuasaan dalam kerajaan Buol sangat mirip dengan pembagian kekuasaan *Trias Politica*. Selanjutnya dalam pelaksanaan pemerintahan juga dikenal beberapa falsafah yaitu :

- *Rlipu mopo rlimba rlimbato*; (negeri dapat berpindah-pindah)
- *Madika mogaa-gaandiano*; (Raja dapat berganti)
- *Adato agu hukumo tataapo*; (hukum tetap adanya)

Dari falsafah ini dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat penegakan hukum sangat memegang peranan yang penting.

b. Dalam kehidupan bermasyarakat beberapa falsafah menjadi pegangan, yaitu :

- *Tombunoepo muno dondoo mopokagun* (*Berbuat lebih dulu baru memerintah orang lain*). Nilai ini memiliki makna bahwa orang-orang berhasil didengar perkataannya dan diikuti perintahnya, yang menggambarkan penghormatan masyarakat Buol kepada para pemimpinnya yang bekeja keras untuk membangun Buol.
- *Naipo Molrimbat agu diapo mongotoyo* (*Jangan dulu pindah lahan sebelum panen*). Nilai ini menggambarkan bahwa dalam kultur pertanian Buol sebenarnya telah berpikir perlunya pola bertani secara intensif.
- *Mongotoyopo muno dondoo monika* (*Panen dulu baru menikah*), sebuah motivasi kepada kaum muda untuk bekerja keras dalam menggapai keberhasilan hidup.
- *Ponginduan muno akuni Panggoba dondoo mokareja* (*Bertanya dulu kepada pimpinan masyarakat sebelum mulai bekerja*), yang menggambarkan suasana kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi.



- *Nai kapoi poili, nai kotigo tigogo, nai monobongo ato doyoano (Jangan suka melirik ke kanan dan ke kiri, jangan berharap yang bukan-bukan, jangan berbuat yang tidak wajar).*

Kondisi politik dipengaruhi juga oleh budaya *Tutunugan Agu Bobotukan Akumpio*, yaitu sebuah falsafah dalam pembangunan "*Tau Buol*" dalam artian masyarakat Buol yang didasarkan pada falsafah BERKAH dan nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan. *Tau Buol* adalah komunitas masyarakat yang memiliki karakteristik budaya tersendiri yang bersifat homogen jika dilihat dari aspek kehidupan politik. Komunitas masyarakat dalam kehidupan politik senantiasa mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat (*Mobokid*) sehingga nilai-nilai kebersamaan dan persatuan tetap terjaga yang dilandasi oleh prinsip kekeluargaan dan kekerabatan. Dengan demikian, maka nilai-nilai budaya yang sangat ideal itu harus mampu diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Buol.

Moto "BERKAH" yang berarti dalam membangun Kabupaten Buol yang merupakan daerah tertinggal di Sulawesi Tengah ini akan terlahir manusia-manusia yang berbudaya, baik materil dan spiritual, enerjik dan selalu dinamis dan tidak mengenal putus asa serta masyarakat yang ramah tamah terhadap siapa saja tak terkecuali pada dirinya sendiri, juga diharapkan akan terlahir masyarakat yang kreatif dalam mengarungi hidup dan kehidupan baik secara perseorangan maupun bermasyarakat.

1.2. Pengertian Perencanaan Pembangunan dan RPJPD Kabupaten Buol

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buol adalah Dokumen perencanaan pembangunan perspektif jangka panjang 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, yang mengacu pada Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025



dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 - 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Buol adalah dokumen hasil kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yaitu periode 2005-2025.

RPJPD Kabupaten Buol adalah dokumen pembangunan yang disusun melalui suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan, berfungsi untuk menjadi tolak ukur makro pembangunan di Kabupaten Buol, yang akan mengarahkan pembangunan agar dapat memanfaatkan semua potensi yang ada, mengorganisasikan secara sistematis dan Komprehensif serta mengukur hasilnya dengan umpan balik menuju perbaikan.

RPJPD Kabupaten Buol berbicara mengenai visi, misi, dan arah pembangunan daerah, serta memberikan gambaran yang jelas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan kedepan terlebih dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan Daerah dalam system pembangunan Nasional, seluruh pemerintah Daerah, baik propinsi dan kabupaten/kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.3. Proses Penyusunan RPJPD Kabupaten Buol

Kegiatan penyusunan dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan



Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional. Sebagai petunjuk dasar dalam penyusunan RPJPD, maka tim penyusun mempertimbangkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tentang petunjuk penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota, sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan penyediaan RPJPD masing-masing Kepala Daerah bersama dengan DPRD melakukan upaya penyusunan RPJPD.
2. Penyusunan RPJPD perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. RPJPD Kabupaten mengacu pada RPJPD Provinsi;
 - b. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrembang RPJPD;
 - c. Apabila RPJPD di atasnya belum tersedia, maka penyusunan RPJPD kabupaten/kota dilakukan secara simultan dan terkoordinasi.
3. Penetapan peraturan daerah tentang RPJPD kabupaten dilakukan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJPD Provinsi.
4. Bagi daerah yang belum dapat menyelesaikan penyusunan dan atau penetapan RPJPD, maka Kepala Daerah terpilih berkewajiban melanjutkan penyelesaiannya, khusus bagi daerah-daerah yang sedang mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Langsung, kegiatan penyusunan Rancangan RPJPD dapat dilaksanakan oleh pejabat (caretaker) Kepala Daerah.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP kabupaten dikonsultasikan kepada Gubernur Cq. Bappeda Provinsi, sebelum ditetapkan.

Selanjutnya, dalam rangka percepatan penyusunan dokumen RPJPD, telah ditetapkan tata cara penyusunan RPJPD, yang merupakan lampiran dari Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor; 050/2020/SJ tentang penyusunan Dokumen RPJPD Provinsi dan RPJMD kabupaten/kota.



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan RPJPD Kabupaten Buol dimaksudkan adalah untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka panjang yang dapat dijadikan pedoman untuk penyusunan rencana jangka menengah.

Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Buol adalah memberikan arah dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Buol secara optimal untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah pada setiap periode jangka menengah.

1.5. Landasan Hukum

Landasan operasional RPJPD Kabupaten Buol meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;



8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 - 2005.

1.6. Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPD Kabupaten Buol 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada arah pembangunan pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi, dengan memperhatikan tujuan dibentuknya daerah, dan rencana tata ruang yang ada.

RPJPD Kabupaten Buol merupakan bagian dari system perencanaan di Kabupaten Buol dan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas dalam jangka waktu 20 tahun.

1.7. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Pengertian, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum serta Sistematika Penulisan.
- Bab II : Kondisi Umum Kabupaten Buol.
- Bab III : Visi dan Misi Kabupaten Buol Tahun 2005 - 2025
- Bab IV : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025
- Bab V : Kaidah Pelaksanaan



BAB II

KONDISI UMUM KABUPATEN BUOL

2.1 Kondisi dan Analisis

2.1.1 Keadaan Geografis

Letak Geografis

Kabupaten Buol terletak dibagian utara Provinsi Sulawesi Tengah, dengan koordinat $0,35^{\circ}$ - $1,20^{\circ}$ Lintang Utara dan $120,12^{\circ}$ - $122,09^{\circ}$ Bujur Timur. Ibukota Kabupaten Buol terletak di Kecamatan Lipunoto yang berjarak 493 Km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan mempunyai luas 4.043,57 kilometer persegi atau sekitar 5,94 persen dari luas Provinsi Sulawesi Tengah (Luas wilayah Kabupaten Buol berada pada urutan ke delapan dari sepuluh wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah). Di bawah Kabupaten Buol adalah Kabupaten Banggai Kepulauan (3.214,46 Kilometer Persegi) dan Kota Palu (395,06 Kilometer Persegi).

Hingga Desember tahun 2007, wilayah Kabupaten Buol terdiri dari 9 kecamatan yang dibagi menjadi 94 desa dan 7 kelurahan. Kesembilan kecamatan di Kabupaten Buol tersebut adalah :

1. Kecamatan Biau, luas 361,65 Km², Ibu Kota Kecamatan Lakea II berjarak 42 Km dari Ibu Kota Kabupaten Buol.
2. Kecamatan Lipunoto, luas 217,80 Km², Ibu Kota Kecamatan Kali berjarak 0 Km dari Ibu Kota Kabupaten Buol.
3. Kecamatan Momunu, luas 400,40 Km², Ibu Kota Kecamatan Lamadong I berjarak 6 Km dari Ibu Kota Kabupaten Buol.



4. Kecamatan Tiloan, luas 1.437,70 Km², Ibu Kota Kecamatan Air Terang berjarak 26 Km dari Ibu Kota Kabupaten Buol.
5. Kecamatan Bokat, luas 196,10 Km², Ibu Kota Kecamatan Bokat berjarak 12 Km dari Ibu Kota Kabupaten Buol.
6. Kecamatan Bukal, luas 355,52 Km², Ibu Kota Kecamatan Unone berjarak 25 Km dari Ibu Kota Kabupaten Buol.
7. Kecamatan Bunobogu, luas 327,15 Km², Ibu Kota Kecamatan Bunobogu berjarak 31 Km dari Ibu Kota Kabupaten Buol.
8. Kecamatan Gadung, luas 160,38 Km², Ibu Kota Kecamatan Bulagidun berjarak 61 Km dari Ibu Kota Kabupaten Buol.
9. Kecamatan Paleleh, luas 586,87 Km², Ibu Kota Kecamatan Paleleh berjarak 86 Km (darat) dan 30 Km (laut) dari Ibu Kota Kabupaten Buol.

Kecamatan yang paling jauh jaraknya dari Ibu Kota Kabupaten Buol adalah Kecamatan Paleleh yaitu 86 Km (darat) dan 30 km (laut).

Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Buol berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli dan Laut Sulawesi. Secara rinci batas wilayah administrasi Kabupaten Buol adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Parigi Moutong dan Provinsi Gorontalo
- Sbelah Timur : Kabuapten Gorontalo Utara Provinsi
- Sebelah Barat : Gorontalo
Kabupaten Tolitoli

Walaupun pencapaian dari Kabupaten Buol ke Ibu Kota Provinsi maupun sebaliknya relatif cukup jauh, melihat posisi batas wilayah



administratif Kabupaten Buol, maka ada peluang untuk membuka akses transportasi alternative yaitu, (1) Transportasi darat melalui Provinsi Gorontalo; (2) Transportasi laut dengan mengembangkan pelabuhan yang ada menjadi pelabuhan feri, mengembangkan pelabuhan samudra hingga bertaraf internasional; dan (3) meningkatkan peran transportasi udara.

Permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kemudahan pencapaian dari wilayah lain ke Kabupaten Buol dan sebaliknya dari Kabupaten Buol ke wilayah lain pada satu provinsi ataupun dari luar provinsi antara lain : (1) Belum adanya kebijakan transportasi daerah; (2) Kesiapan daerah untuk suatu proses perencanaan transportasi yang baik dengan sumber pembiayaan yang pasti (Investasi transportasi cukup besar); (3) Kesiapan teknis menyiapkan suatu sistem transportasi daerah, termasuk menangani kendala-kendala dalam pelaksanaannya dari tahap awal hingga system transportasi dapat beroperasi dengan baik dalam waktu yang telah ditentukan; dan (4) Kesiapan sumber daya manusia di daerah untuk melaksanakan system transportasi modern dengan baik dan trampil.

Wilayah Kabupaten Buol yang relatif cukup jauh jaraknya dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah tidak harus membuat Kabupaten Buol tertinggal jauh dari sisi pembangunan. Persebaran lokasi kegiatan usaha masyarakat harus dilakukan secara merata, sehingga kantong-kantong produksi daerah atau pusat produksi dapat tersebar secara merata. Dalam pola pemanfaatan lahan dan pembangunan spasial, wilayah-wilayah Kabupaten Buol yang berbatasan dengan wilayah lain diluar Kabupaten Buol harus mampu menjadi pusat kegiatan usah masyarakat, bisa sebagai kegiatan produksi atau pengolahan, perdagangan, jasa ataupun kegiatan lainnya seperti kegiatan wisata sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wilayah terdekatnya, bahkan bagi masyarakat luas untuk mengunjungi, bekerja sama dan melakukan aktifitas di lokasi tersebut.



Keberhasilan dalam mengembangkan ruang-ruang wilayah di Kabupaten Buol menjadi pusat-pusat aktifitas merupakan salah satu dasar penting dalam membangun Kabupaten Buol dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Untuk lebih memahami wilayah Kabupaten Buol, maka perlu diketahui batas-batas wilayah pada masing-masing kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Batas-Batas Wilayah Masing-Masing Kecamatan
di Kabupaten Buol Tahun 2006

No	Kecamatan	Batas-Batas Wilayah			
		Utara	Timur	Selatan	Barat
1	Biau	Laut Sulawesi	Laut Sulawesi	Kec. Lipunoto	Kab. Tolitoli
2	Lipunoto	Laut Sulawesi	Laut Sulawesi	Kec. Momunu	Kec. Biau
3	Momunu	Kec. Lipunoto	Kec. Bukal	Kec. Tiloan	Kec. Biau
4	Tiloan	Kec. Momunu	Kec. Bukal	Kab. Parigi Moutong dan Provinsi Gorontalo	Kab. Tolitoli
5	Bokat	Laut Sulawesi	Kec. Bunobogu	Provinsi Gorontalo	Kec. Bukal
6	Bukal	Kec. Bokat	Kec. Bunobogu	Provinsi Gorontalo	Kec. Tiloan
7	Bunobogu	Laut Sulawesi	Kec. Gadung	Provinsi Gorontalo	Kec. Bokat
8	Gadung	Laut Sulawesi	Kec. Paleleh	Provinsi Gorontalo	Kec. Bunobogu
9	Paleleh	Laut Sulawesi	Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	Kec. Gadung

Sumber : BPS Kab. Buol, Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Buol Tahun 2006



Adapun wilayah yang berbatasan langsung dengan laut Sulawesi, membuka peluang pengembangan transportasi laut di wilayah tersebut (Kecamatan Biau, Kecamatan Lipunoto, Kecamatan Bokat, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Gadung, dan Kecamatan Paleleh). Adanya wilayah lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lainnya, yaitu Provinsi Gorontalo membuka peluang pengembangan wilayah kecamatan-kecamatan yang berbatasan tersebut menjadi pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Buol (Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Gadung dan Kecamatan Paleleh).

Selain itu, ada juga wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten lain, dalam satu provinsi (Kecamatan Tiloan, selain berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, juga berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah; dan Kecamatan Biau berbatasan dengan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah).

Faktor keamanan di wilayah Kabupaten Buol yang berbatasan dengan provinsi dan kabupaten lain, juga di wilayah yang berbatasan dengan laut merupakan salah satu hal penting yang harus dijadikan pertimbangan dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Buol. Sehingga ketika pelaksanaan pengembangan wilayah-wilayah yang dimaksudkan untuk menjadi pusat atau kantong aktifitas telah termasuk didalamnya tersedia suatu system keamanan bagi wilayah tersebut.

Selain itu perlu diatur jenis dan pola pelayanan yang akan disediakan oleh setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Buol. Menginformasikan kepada masyarakat arah kebijakan pengembangan dimasing-masing wilayahnya, sehingga masyarakat tahu dan dapat memberikan partisipasinya dalam menyediakan layanan tersebut.



Dalam jangka pendek permasalahan yang dihadapi adalah mempersiapkan masyarakat agar mampu berpartisipasi. Namun dalam jangka panjang jika kantong-kantong aktifitas yang tersebar merata di Kabupaten Buol ini menjadi sangat produktif, masyarakat sendiri akan termotivasi untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan kemajuan zaman, bahkan masyarakat sendiri yang akan menentukan arah berkembangnya setiap usaha yang dijalankan.

Keadaan Hidrologi

Di Kabupaten Buol terdapat sungai-sungai yang tersebar hampir merata disetiap kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Biau : Sungai Sambat (Panjang 35 Km), Sungai Tuinan (Panjang 42 Km) dan Sungai Busak (Panjang 35 Km)
2. Kecamatan Lipunoto : Sungai Buol (Panjang 36 Km), Sungai Gindopo (Panjang 3 Km) dan Sungai Talau (Panjang 9 Km)
3. Kecamatan Maomunu : Sungai Bialo (Panjang 7 Km)
4. Kecamatan Tiloan : Sungai Tiloan (Panjang 7 Km), Sungai Silondou (Panjang 3 Km) dan Sungai Dolonggu (Panjang 5 Km)
5. Kecamatan Bunobogu : Sungai Bunobogu (Panjang; 62 Km) dan Sungai Lonu (Panjang : 35 Km)
6. Kecamatanm Gadung : Sungai Lokodoka (Panjang; 12 Km),Sungai Labuton (panjang; 58 Km),Sungai Bulagidun (panjang; 22 Km),Sungai Matinan (Panjang 60 Km) dan Nantu (Panjang; 22 Km)
7. Kecamatan Paleleh : Sungai Bodi (Panjang; 5,6 Km), Sungai Lunguto (Panjang ;6,3 Km), Sungai Timbulon (Panjang; 7,5 Km), Sungai Nyal (Panjang; 7,5 Km), Sungai Paleleh (Panjang; 7,5 Km), Sungai Tolau (Panjang; 8,5 Km), Sungai Kuala Besar. Selain itu, di Kabupaten Buol Juga



terdapat Danau/Waduk/Bendungan, Yaitu : (1) Bendungan Busak II seluas 925 M² dan Bendungan Lakea II seluas 1.642 M² di Kecamatan Biau; (2) Bendungan Kali seluas 1.25 M² di Kecamatan Lipunoto; (3) Danau/Waduk Pinamula seluas 625 M² di Kecamatan Momunu; (4) Danau/Waduk Kuala Besar dan Danau/Waduk Talaki di Kecamatan Paleleh.

Pengairan dapat dilakukan di wilayah - wilayah yang subur, sehingga dapat selalu diperoleh produktivitas pertanian yang tinggi, dengan demikian area pemasaran produksi pertanian akan semakin meningkat. Area peternakan juga didekatkan lokasi tersedianya air, sehingga kebutuhan akan air peternakan dan kebersihan lingkungan peternakan selalu terpelihara. Kegiatan lainnya yang membutuhkan air seperti perikanan laut dan darat, perlu ditangani dengan baik, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas usahanya dengan lancar.

Permasalahan jangka pendek yang dihadapi adalah menentukan wilayah - wilayah pengairan, pengaturan wilayah pertanian, peternakan, perikanan, atau kegiatan lainnya yang membutuhkan kedekatan dengan sumber daya air. Selanjutnya perlu disiapkan pola distribusi pemanfaatan sumber daya air, atau manajemen sumber daya air. Keteraturan pemanfaatan sumber daya, kemampuan memanfaatkan dan mengola sumber daya air akan berdampak pada keteraturan kegiatan di tiap-tiap wilayah dan keseimbangan ekologi.

Sumber air yang dipakai PDAM di Kabupaten Buol berasal dari mata air dengan kapasitas produksi dari PDAM Kabupaten Buol pada tahun 2006 sebesar 752.100 M³, sebanyak 482.627 M³ dikonsumsi oleh 2.124 pelanggan diseluruh Kabupaten Buol. Jangkauan PDAM belum merata di seluruh wilayah kecamatan yang ada. Apabila masing-masing wilayah telah menjadi pusat aktivitas.maka kebutuhan layanan Air melalui PDAM akan



meningkat, seiring dengan meningkatkan aktivitas masyarakat dan dinamika kegiatan usaha dimasing-masing wilayah.

Keadaan Oceanografi

Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Buol terletak dipinggir pantai. Secara ekonomis, perairan laut Kabupaten Buol berpotensi untuk dikembangkan dan menjadi andalan pendapatan masyarakat, hasil lautnya antara lain ikan dan rumput laut.

Selain untuk meningkatkan usaha perikanan, masyarakat di Kabupaten Buol dapat memanfaatkan perairan laut sebagai akses transportasi laut dari dan ke wilayah Kabupaten Buol. Karena itu pembangunan pelabuhan feri segera dilakukan, begitu juga dengan peningkatan kemampuan pelabuhan yang ada saat ini, baik pelabuhan Paleleh, Pelabuhan Kumaligon, Pelabuhan Lokodidi, dan Pelabuhan Leok.

Pantai di Kabupaten Buol memanjang dari arah barat ketimur, dengan kemiringan lereng bervariasi yaitu : landai, relatif curam, dan curam. Batas perairan Kabupaten Buol sebagian masuk perairan Kabupaten Buol dan sebagian masuk perairan transisi Selat Makassar dan Laut Sulawesi bagian barat dan sebagian lagi di Laut Sulawesi bagian timur.

Perairan laut di Kabupaten Buol bagian barat terletak pada wilayah peralihan Laut Sulawesi dan Selat Makasar, merupakan salah satu perairan Arus Lintas (ARLINDO) yang bergerak melintasi perairan Indonesia sebagai akibat perbedaan tinggi muka laut antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, merupakan massa air yang kecepatan arusnya sangat dipengaruhi oleh sistem ekuatorial sebagai akibat dari hembusan angin Pasat Timur Laut di Samudra Pasifik.



Pantai Kabupaten Buol terbuka ke arah utara, yang merupakan laut lepas, yaitu Laut Sulawesi, *fact* wilayah perairan relatif luas, karenanya gelombang yang terbentuk bias berukuran besar. Perairan Laut Sulawesi termasuk sebagian wilayah dengan daya hancur tsunami sedang sampai tinggi, dan wilayah pesisir tinggi dan wilayah pesisir Kabupaten Buol relatif tidak aman dari bencana gelombang tsunami, dalam bentuk : (1) melakukan larangan membangun di daerah pinggir laut lepas; (2) memberikan pengertian pada masyarakat yang terlanjur membangun tempat tinggal atau bangunan di wilayah pinggir laut lepas yang rawan tsunami, agar mau pindah; (3) menjaga keseimbangan ekosistem, disepanjang pinggiran laut lepas yang rawan tsunami; (4) menyiapkan sistem peringatan bahaya tsunami; dan (5) menyiapkan sistem penanganan bencana alam terpadu.

Iklm dan Temperatur

Kabupaten Buol termasuk daerah subtropis basah yang dipengaruhi oleh angin laut. Sebagian wilayah Kabupaten Buol berbatasan langsung dengan pantai, menyebabkan Kabupaten Buol beriklim panas, dengan curah hujan setiap tahun rata-rata 1.805 mm dengan maksimal curah hujan pada bulan September. Iklim dipengaruhi oleh musim barat (kemarau) dan musim timur (musim hujan). Musim timur terjadi sekitar bulan April sampai September yang ditandai dengan banyaknya hujan, sedangkan musim barat terjadi sekitar bulan Oktober sampai Maret. Temperatur udara rata-rata di Kabupaten Buol 23.3°C - 23.8°C pada daerah pesisir rendah mencapai 31.1°C .



Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan membagi ruang-ruang untuk kawasan lindung, kawasan budidaya, dan penggunaan lain. Kawasan Lindung di Kabupaten Buol merupakan Hutan Lindung yang dikelola untuk kepentingan perlindungan lingkungan dari bahaya erosi, tanah longsor dan pengaturan tata air. Karena itu Hutan Lindung ditetapkan di daerah-daerah yang tanahnya mudah terkena erosi, mudah longsor, atau berlereng curam. Untuk mempertahankan fungsinya, hutan lindung tidak boleh ditebang, atau boleh ditebang terbatas dengan sistem tebang pilih. Sosialisasi tentang manfaat dan pentingnya hutan lindung perlu dilakukan, agar masyarakat mengetahui, memahami, dan tidak melakukan penebangan secara liar. Selain itu, perlu dibuat sistem bagi hutan lindung.

Selain hutan lindung juga terdapat pada kawasan Hutan Suaka Alam yang dikelola untuk melindungi jenis Flora atau Fauna tertentu karena memiliki jenis yang langka atau mempunyai sifat yang khas, yang dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau sosial budaya.

Untuk Kelestarian dan berkelanjutan ekosistem di Hutan Lindung dan Hutan Suaka, selain sistem pengamanan, juga keperluan Kehadiran Balai Riset Hutan Lindung dan suaka Alam. Kegiatan yang dilakukan balai riset adalah mengamati fungsi hutan lindung dan hutan suaka alam dari waktu ke waktu, sehingga kelestarian hutan dapat terjaga, serta apabila terjadi perubahan ekosistem, dapat segera ditangani.

Kawasan Budidaya dan Penggunaan Lain terdiri dari : (1) Hutan Produksi, yaitu hutan yang dikelola untuk menghasilkan jenis hasil hutan dapat satu macam atau lebih: (2) Hutan Wisata, yaitu hutan yang dikelola untuk tempat rekreasi bagi masyarakat. Pengelolaan hutan ini bersifat komersial sehingga dapat dianggap sebagai hutan produksi, yang



diproduksi bukan biomassa melainkan keindahan atau lingkungan yang bersih dan sehat. Hutan Wisata atau hutan rekreasi banyak diambil dari hutan suaka alam. Karena adanya jenis-jenis binatang atau tumbuhan-tumbuhan langka, maka hutan suaka menjadi menarik; (3) Pemukiman, Kawasan pekebunan dan Pertanian Tanaman Pangan, yaitu Kawasan Budidaya yang dapat diolah untuk perkebunan dan pertanian serta pemukiman. Tata Guna Lahan di Kabupaten Buol dapat dilihat Pada Tabel 2.2



Tabel 2.2
Pola Penggunaan Lahan Di Kabupaten Buol Tahun 2005

No	Kecamatan	Pola Penggunaan Lahan (Luas: KM ²)							
		Hutan Produksi Biasa	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi yang Dapat Dikonfersi	Kawasan Budidaya yang Sudah Dimamfaatkan	Pemukiman T.Pangan Lahan Basah/Kering/perkebunan	Perkebunan /peternakan/Agro Forestry	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Wisata
1.	Biau	10.743,18	7.196,43	5.017,88	9.635,82	7.966,72	-	-	783,72
2.	Lipunoto	10.500,59	117,612	1903,30	9.868,53	22.272,70	-	-	-
3.	Momunu	8.470,86	117,61	1.903,30	6.332,15	17.804,83	-	-	-
4.	Tiloan	-	68.305,06	5,255,05	25.362,74	8.169,07	9.691,61	17.402,81	4.884,14
5.	Bokat	-	1.612,89	1.801,38	8.413,86	2.354,98	-	1.222,91	-
6.	Bukal	1.706,75	4,210,05	10.770,46	14.843,40	4.987,62	-	14.790,93	-
7.	Bunobogu	2494,80	5203,95	5030,08	7.526,24	1275,64	-	7246,87	-
8.	Gadung	1729,83	8830,85	-	-	2188,87	-	17.402,81	-
9.	Paleleh	50.029,13	162.205,43	20.881,68	132.817,89	88.720,63	-	-	-
	Jumlah	85.668	257.798	214.800	214.800	226.205	2692	53.580	5.668

Sumber: Bappeda Kab. Buol, Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005 (Data Diolah Kembali)

Berdasarkan Tabel 2.2 Pola penggunaan lahan di Kabupaten Buol didominasi oleh : (1) hutan produksi tetap, (2) pemukiman, tanaman pangan, lahan basah/kering/perkebunan, dan (3) kawasan budidaya yang sudah dimanfaatkan.

2.1.2. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Geomorfologi

Wilayah Kabupaten Buol terdiri dari daerah perbukitan dan pegunungan pada bagian selatan dan sebagian kecil pada bagian utara, sepanjang pesisir pantai dibagian utara merupakan wilayah dataran rendah. Berada diantara jajaran vulkanik lengan utara dengan wilayah pegunungan bagian tengah di Sulawesi. Morfologi wilayah sebagian besar merupakan perbukitan dengan relief sedang, sebagian besar ber relief rendah berupa dataran yang menempati wilayah pesisir pantai bagian utara Kabupaten Buol.

Berdasarkan proses geologi, penggolompokan umum morfologi laut dan dataran wilayah Kabupaten Buol dibagi atas : (1) lereng/tebing depresi dengan kedalaman berkisar 100-200 meter, pada beberapa bagian laut lereng yang terbentuk berupa tebing curam; (2) daerah paparan kedalaman kurang 200 meter, dengan lebar dari pantai yang relatif bervariasi ditemui pada sepanjang dasar laut kabupaten ini; (3) dataran terdiri dari: (a) dataran kipas alluvial yang melereng landai, umumnya merupakan lahan datar pesisir yang tersebar pada sebagian wilayah terutama di wilayah Kecamatan Tiloan yang berakhir di wilayah Kecamatan Lipunoto, (b) dataran lumpur antara pasang surut, tersebar pada luasan yang sempit pada semua kecamatan yang ada (4) Perbukitan, terdiri dari (a) punggung bukit sedimen asimetrik



takterorientasi, dijumpai pada daerah perbukitan pesisir bagian selatan sepanjang Kabupaten Buol, (b) perbukitan karts (kapur) di atas batu gamping koral, ditemui diwilayah Kecamatan Biau, (c) deretan bukit sangat curam di atas batuan beku, dijumpai dibagian barat dan timur seperti pada Kecamatan Biau, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Paleleh; (5) pegunungan terdiri dari: (a) punggung bukit sedimen asimetrik tertoreh melebar, sebaranya di jumpai sebagian wilayah kecamatan yang ada, (b) punggung gunung metamorfik terorientasi terjal, dijumpai pada hampir semua kecamatan dibagian selatan Kabupaten Buol.

Secara regional, wilayah Kabupaten Buol terletak pada mandala Geologi Sulawesi Barat. Stratigrafi batuan wilyah ini disusun berdasarkan umur dari tua ke muda sebagai berikut : (1) Formasi Tinombo, litologi penyusun formasi berupa basal, basal spilitan, lava andesit, breksi gunung api, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu, dan bantuan termentamorfos lemah, satuan ini terdapat di bagian selatan dengan arah dengan arah memanjang timur-barat relatif pada wilayah batas dengan kabupaten lain; (2) batuan Vulkanik, merupakan batuan gunung api, yang tersebar dibanyak tempat namun tidak meluas, antara lain di Momunu bagian barat dan selatan, sebelah barat Leok dan sebelah barat Bokat yang berbatas dengan Provinsi Gorontalo, sebaran batuan ini juga meluas kearah barat (Toli-toli) dan Selata (Parigi Moutong); (3) Dioret Bone, merupakan batuan beku menengah, penyebaran relatif sempit setempat-setempat, penyebaran terluas kurang dari 600 Ha; (4) Diorit Baliohuto, tergolong dalam jenis batuan beku dalam yang bersifat menengah sampai asam dan hanya terdapat disekitar G. Tentolomatika sebelah selatan Lokodoka; (5) Formasi Dolokapa, terdiri dari batu pasir wake, batu lanau , batu lumpur, konglomerat, tufa, tufa tapili, anglomerat, breksi vulkanik, dan lava yang



bersifat andesit serta basal, penyebaran relatif luas memanjang dari sebelah selatan Momunu kearah timur laut sampai mencapai wilayah Paleleh; (6) Breksi Wobudu, merupakan batuan vulkanik, penyebaran dibagian selatan Bunobogu dan wilayah yang luas sepanjang pegunungan paleleh kearah timur laut, yaitu G. Tentolomatika dan G. Bendolo; (7) Molase Celebes Sarasi dan Sarasi (Formasi Lokodidi) terdiri dari konglomerat, batu lanau, batu lempung, batu gamping koral, tufa, serpih hitam dan napal, formasi ini merupakan penyusun utama wilayah Bokat dan Momunu; (8) Batuan Vulkanik, dengan komposisi aglomerat, tufa dan lava, penyebarannya setempat yaitu di Busak, Kecamatan Biau; (9) Batugamping terumbu, penyusun utama satuan batuan ini adalah batu gamping koral, penyebaran terluas terdapat pesisir utara Buol; (10) Aluvium, terdiri dari material pasir, lempung, lanau, lumpur, kerikil dan kerakal, endapan terluas terdapat di dataran Kota Buol yang melebar kearah Leok, Lamolan, Bokat dan Momunu, terutama dataran banjir sungai Momunu.

Struktur geologi bagian timur wilayah Kabupaten Buol relatif lebih terpengaruh secara tektonik dibanding dengan bagian barat. Dibagian timur sesar-sesar vertical dengan dua arah utama tenggara barat laut dan timur laut barat daya, juga terdapat sesar-sesar dekstral di Pegunungan Paleleh dan G.Tentolomatika. Pada bagian barat gejala struktur relatif tidak dominan hanya terdapat 2 (dua) struktur utama, yaitu sesar sungkup di Barat Momunu dan sesar vertikal disebelah barat Leok, (sumber: Evaluasi RIK Kawasan Tertinggal Kabupaten Buol dan RTRW Kabupaten, 2005)

Wilayah Kabupaten Buol yang memiliki beberapa gunung, yang tersebar di kecamatan-kecamatan seperti pada Tabel 2.3 berikut ini.



Tabel 2.3
Nama dan Tinggi Gunung Kabupaten Buol Tahun 2006

No	Kecamatan	Nama dan Tinggi Gunung (M)
1	Momunu	Air Terang (1.463), Pogogul (750), Lopak (1500)
2	Tiloan	Cakar Langit (1.700), Tiloan (1.500)
3	Bokat	Tentelomatika (2.207), Larange (1.250), Daeng Besar (1.235)
4	Bunobogu	Padaa (350), Limbau (250), Kerajaan Lonu (250), Biau (150), Ponipingan (160), Pandalangi (425), Botugolu (120)
5	Gadung	Tabamuang (350), Ile-ile (857), Taat (450), Intan (160), Emas (450), Dumbaya (350), Diapatih (240)
6	Paleleh	Timbulon (2.320), Biau (1.620), Intan (1.780), Bendolo (1918), Pentalo (2017)

Sumber : BPS Kab. Buol, Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Buol Tahun 2006

Berdasarkan data pada Tabel 2.3 ketinggian Gunung di Kabupaten Buol bervariasi antara 120 – 2.320 Meter.

Di Kabupaten Buol terdapat variasi potensi sumber daya geologi (bahan tambang atau galian) yang dapat dikembangkan. Tabel 2.4 memperlihatkan jenis bahan tambang atau galian potensial di Kabupaten Buol.



Tabel 2.4
Jenis Bahan Tambang di Kabupaten Buol Tahun 2006

No	Bahan Tambang/ Galian	Kecamatan								
		Biau	Lipunot o	Momun u	Tiloan	Bokat	Bukal	Bunobogu	Gadung	Paleleh
1	Emas	✓							✓	✓
2	Tembaga	✓				✓	✓			
3	Marmer Putih dan Coklat					✓	✓			
4	Batu Permata	✓		✓		✓		✓		
5	Batu Kaca	✓		✓		✓		✓		
6	Bahan Cat									✓
7	Batu Gamping						✓	✓		✓
8	Batu Karbit						✓		✓	✓
9	Batu Bara			✓						
10	Kalsit			✓						
11	Pasir Kuarsa			✓						
12	Sirtukli(pasir ,batu, dan kerikil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Buol, Laporan Jenis Bahan Tambang di Kab. Buol Tahun 2006

Berdasarkan data yang disampaikan pada Tabel 2.4, terlihat seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buol memiliki potensi bahan tambang/galian. Potensi bahan tambang belum dioptimalkan untuk mendukung perekonomian masyarakat, jika potensi yang ada dapat dikelola dengan baik, terencana dan terarah (dengan memperhatikan kelestarian dan faktor keamanan lingkungan), pengelolaan bahan tambang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat Kabupaten Buol.



Agar dapat dilakukan suatu sistem pengelolaan bahan tambang yang baik, yaitu pengelolaan yang memperhatikan kelestarian lingkungan, perlu dilakukan penelitian kadar masing-masing bahan tambang yang dimiliki Kabupaten Buol, agar dapat ditentukan jumlah yang bisa dikelola.

Potensi bahan tambang yang ada di Kabupaten Buol ini, perlu dikelola agar memiliki nilai tambah. Pengelolaan bahan tambang disuatu wilayah di Indonesia memiliki kecenderungan dikelola oleh perusahaan swasta yang tidak berasal dari daerah tersebut. Untuk itu, kesempatan pertama mengelola bahan tambang selayaknya diberikan pada masyarakat setempat. Memberikan kesempatan pada masyarakat Kabupaten Buol untuk mengelola bahan tambang, perlu didukung dengan peningkatan kemampuan masyarakat, sehingga cara-cara pengelolaan dilakukan dengan benar. Hanya masyarakat yang dinilai trampil dan mampu yang dapat mengelolanya. Kegiatan ini juga perlu didukung oleh sistem pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan, sehingga tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Potensi sumber daya energi yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Buol ; (1) energi radiasi matahari, (2) energi angin, diseluruh wilayah, serta (3) pembangkit listrik tenaga air pada beberapa sungai besar. Selain itu sumber daya energi lainnya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan adalah batu bara di Kecamatan Momunu. Listrik telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, karenanya potensi yang ada perlu diolah agar dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebelum dilakukan pengolahan potensi, perlu dilakukan studi kelayakan terhadap seluruh potensi sumber daya energi yang dimiliki.



Lingkungan Hidup

Sebagian besar wilayah Kabupaten Buol berada di pesisir tepi laut (52 desa) diikuti dataran, lembah/daerah aliran sungai, dan lereng/punggung bukit. Vegetasi alam di daratan dan pesisir Kabupaten Buol adalah hutan dataran rendah, hutan dataran tinggi ada di pegunungan bagian timur, dan hutan mangrove pada sebagian besar wilayah pesisir dan rawa-rawa yang luas, terutama pada bagian barat. Sebagian besar ekosistem alami tersebut telah dikonversi untuk peruntukan lahan lain (pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambakan dan lain-lain) ataupun telah mengalami degradasi. Di perairan Kabupaten Buol, flora penting terdiri dari padanglamun dan berbagai tipe alga, baik makroalga maupun fitoplankton.

Letak Kabupaten Buol berada di wilayah wallacea, yaitu pusat keanekaragaman hayati laut, maka diduga sebagian besar jenis fauna yang terdapat pada kawasan-kawasan tersebut terdapat juga di perairan Kabupaten Buol. Contoh jenis fauna langka yang dilindungi yang terdapat di perairan/pesisir Kabupaten Buol diantaranya penyu, kima (*Tridacna spp*), dan ikan napoleon (*cheilinus undulates*).

Fauna darat di Kabupaten Buol sangat beragam diantaranya khas fauna Sulawesi, misalnya : dari 127 jenis mamalia asli 62 persen adalah spesies edemik, 27 persen jenis burung, 76 persen amfibia, dan 26 persen reptilian, juga endemik. Satwa endemik terkenal antara lain babirusa (*babyrussa*), Anoa (*Bubalus depressicornis dan Bubalus*), beberapa jenis primata (*Macaca Tontokeanna, Cynopithecus Niger, Tarsius Spectrum dll*). Burung Maleo (*macrocephalon maleo*) dan Burung Alo (*Aceros cassidix*). Selain itu juga terdapat spesies terancam punah, seperti : beberapa jenis burung, kelelawar dan tikus hutan.



Bahaya lingkungan beraspek geologi dapat terjadi di Kabupaten Buol. Erosi yang umum berlangsung berasal dari lahan sekitar yang terangkut aliran air maupun tenaga oksigen lainnya. Gejala yang terlihat antara lain adanya lidah pasir yang terbentuk di kebanyakan muara sungai, hampir meliputi semua muara sungai di Kabupaten Buol, juga terjadi pendangkalan di badan-badan sungai dan tempat-tempat rendah lainnya. Wilayah rawan erosi adalah hulu yang dibuka perkebunan, pemukiman, adanya kegiatan penebangan hutan, tebing-tebing sungai, dan beberapa daerah pantai yang berhadapan langsung dengan laut Sulawesi dapat terjadi erosi tebing.

Kawasan pesisir pantai Kabupaten Buol rentan abrasi. Penebangan vegetasi mangrove yang terus berlangsung memperparah keadaan kawasan-kawasan pesisir pantai Kabupaten Buol rentan abrasi. Penebangan vegetasi mangrove yang terus berlangsung memperparah keadaan pesisir pantai. Beberapa tempat mangrove yang rusak dan beberapa daerah pantai yang berhadapan langsung dengan laut Sulawesi dapat terjadi erosi tebing. Beberapa tempat mangrove yang rusak dan beberapa daerah pantai yang berhadapan langsung dengan laut Sulawesi dapat terjadi erosi tebing. Beberapa bagian daratan tergerus seperti pada tanjung di daerah Kumaligon, Kecamatan Lipunoto.

Beberapa wilayah rentan pasang surut di wilayah pesisir Kabupaten Buol beresiko terkena banjir, demikian juga dengan wilayah-wilayah rawa belakang dan daerah berliku-berliku pada sungai-sungai besar. Kondisi ini terkait dengan menurunnya daya tampung sungai akibat pengendapan sedimen di dasar sungai. Selain itu sedimentasi/pendangkalan juga terjadi disekitar pantai yang mengalami abrasi intensif, akibatnya perairan laut dekat pantai menjadi dangkal serta dapat membahayakan kapal dan perahu yang lewat. Pendangkalan mengganggu pertumbuhan terumbu karang, dapat merubah habitat mangrove.

Intrusi air laut kedaratan melalui muara sungai sangat umum terjadi terutama pada saat pasang tinggi. Di wilayah pesisir Kabupaten Buol



terdapat sejumlah sungai besar yang secara fluktuatif mengalami perubahan salinitas yang disebabkan intrusi air laut, sejauh ini pengaruh intrusi tersebut terhadap kondisi biofisik wilayah aliran sungai-sungai yang bersangkutan tidak terlihat nyata.

Ada beberapa sumber gempa yang berpotensi menimbulkan bencana di wilayah Kabupaten Buol, yaitu : (1) zone subduksi lempeng laut sulawesi yang terletak bagian utara, (2) sesar Palu-Koro yang terdapat di bagian barat, dan (3) sesar Gorontalo yang terletak dibagian timur wilayah Kabupaten Buol, ketiga sumber gempa hingga kini masih aktif.

Tabel 2.5
Banyaknya Desa yang Berada di Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Buol Tahun 2005

No	Jenis Bencana	Kecamatan dan Jumlah Desa								
		Biau	Lipunoto	Momunu	Tiloan	Bokat	Bukal	Bunobogu	Gadung	Paleleh
1	Tanah Longsor	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Banjir	1	1	10	6	7	6	2	5	4
3	Gempa Bumi	12	7	14	8	14	13	8	9	17
4	Abrasi Pantai	6	4	-	-	5	-	-	3	4

Sumber : BPS Kab. Buol, Potensi Desa Kabupaten Buol Tahun 2005 (Data Diolah Kembali)

Dari data yang disampaikan pada tabel 2.5 di atas terlihat bahwa seluruh wilayah Kabupaten Buol merupakan wilayah rawan gempa bumi. Bencana alam lainnya yang harus diwaspadai adalah banjir, abrasi, dan tanah longsor. Berdasarkan Statistik Potensi Desa Kabupaten Buol Tahun 2005, dalam tiga tahun terakhir, di Kabupaten Buol telah terjadi longsor pada dua kecamatan, yaitu : (1) Kecamatan Bokot sebanyak 1 desa, dan (2) Kecamatan Bukal, sebanyak satu desa. Banjir terjadi di 32 desa yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Buol. Gempa terjadi di tiga kecamatan, yaitu :



(1) Kecamatan Bunobogu, meliputi 3 desa, (2) Kecamatan Gadung, meliputi 2 desa dan, (3) Kecamatan Paleleh meliputi 3 desa. Dengan demikian, Kabupaten Buol membutuhkan sistem peringatan dan penanganan bencana alam yang dapat berfungsi pada saat dibutuhkan.

Bencana lainnya juga terjadi, yaitu bencana kebakaran di Kecamatan Lipunoto, Kecamatan Bukal, dan Kecamatan Paleleh, masing-masing terjadi di satu desa. Selain itu, beberapa desa yang tersebar di beberapa kecamatan juga mengalami gangguan lingkungan misalnya (1) pencemaran air, terjadi di Kecamatan Lipunoto (2 desa), Kecamatan Momunu (4 desa), Kecamatan Bokat (2 desa), Kecamatan Bunobogu (2 desa), Kecamatan Gadung (6 desa), dan Kecamatan Paleleh (1 desa); (2) Pencemaran tanah, di Kecamatan Bunobogu (1 desa), dan Kecamatan Gadung (2 desa); (3) Polusi Udara dan bau terjadi di Kecamatan Lipunoto (1 desa), Kecamatan Bokat (4 desa), Kecamatan Bukal (1 desa), dan Kecamatan Bunobogu (1 desa); dan (5) Pencemaran suara/bising terjadi di Kecamatan Momunu (1 desa), Kecamatan Tiloan (1 desa), Kecamatan Bukal (1 desa), Kecamatan Bunobogu (1 desa), Kecamatan Bokat (2 desa), dan Kecamatan Gadung (4 desa).

Hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Buol dilalui oleh sungai. Sebagian besar masyarakat menggunakan air sungai untuk mandi/cuci (59 desa), selanjutnya untuk minum (26 desa), irigasi (18 desa), transportasi (9 desa) dan industri pabrik (6 desa). Potensi air sungai yang ada belum digunakan sebagai bahan baku air minum. Sebanyak 36 desa tidak dilalui oleh sungai, yaitu: Kecamatan Biau (4 desa); (2) Kecamatan Lipunoto (4 desa); (3) Kecamatan Momunu (4 desa); (4) Kecamatan Tiloan (1 desa); (5) Kecamatan Bokat (10 desa); (6) Kecamatan Bukal (5 desa); (7) Kecamatan Bunobogu (4 desa); (8) Kecamatan Bunobogu (1 desa); (9) Kecamatan Paleleh (3 desa). Untuk kegiatan minum/memasak, sebagian besar masyarakat



menggunakan air sumur/perigi (62 desa). Ada juga yang memanfaatkan mata air (21 desa), air PAM (10 desa) dan pengguna pompa listrik/tangan (2 desa).

Wilayah Kabupaten Buol memiliki *slum area*, di Kecamatan Lipunoto (2 desa) dan Kecamatan Bunobogu (1 desa). Terkait dengan kebiasaan membuang sampah, sebagian besar masyarakat membuang sampah di lubang kemudian di bakar (64 desa). Ada membuang di tempat sampah kemudian di angkut, namun masih ada yang membuang sampah di sungai (3 desa).

2.1.3. Demografi

Kabupaten Buol memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan 9 wilayah (Kabupaten/Kota) di Provinsi Sulawesi Tengah. Tabel 2.6 memperlihatkan jumlah penduduk Kabupaten Buol dibandingkan dengan luas, dan jumlah penduduk Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Buol Menurut Jenis Kelamin Dibandingkan dengan Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

No	Nama Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Laki-Laki (L)	Perempuan (p)	(L+P)	Urutan Penduduk
1	Banggai Kepulauan	3.214,46	77,016	75.791	152.807	8
2	Banggai	9.672,70	150.114	141.668	291.782	4
3	Morowali	15.490,12	90.914	82.352	173.266	6
4	Poso	8.712,25	74.186	69.290	143.376	9
5	Donggala	10.471,71	237.990	221.205	459.195	1
6	Toli-toli	4.079,77	98.671	94.997	193.568	5
7	Buol	4.043,57	58.482	54.478	112.960	10
8	Parigi Moutong	6.231,85	185.016	175.872	360.888	2
9	Tojo Una-una	5.721,51	81.803	79.988	161.791	7
10	Palu	395,06	150.488	161.791	299.765	3
Jumlah		68.033,00	1.204.581	1.144.817	2.349.765	

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2006



Jumlah penduduk Kabupaten Buol pada tahun 2006 sebanyak 112.960 jiwa, menempati urutan kesepuluh dalam besarnya jumlah penduduk dari sepuluh daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Donggala, sebanyak 459.195 jiwa pada tahun 2006 sedangkan total jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2006 sebanyak 2.349.765 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk di Kabupaten Buol sebesar 4.80 % dari jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, dengan (31) jiwa warga Negara asing di wilayah Kecamatan Momunu, Kecamatan Bokat (3 Jiwa), dan Kecamatan Bukal (2 Jiwa). Peningkatan penduduk di Kabupaten Buol dari tahun 1999 hingga tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Peningkatan Penduduk di Kabupaten Buol dari Tahun 1999 Hingga Tahun 2006
(Menurut Jenis Kelamin)

Tahun	Laki-laki (L)	Peningkatan (%)	Perempuan (P)	Peningkatan (%)	(L+P)	Peningkatan
1999			47.289		96.207	
2006	57.253	17.03	55.707	17.8	112.960	17.41

Sumber : BPS Kab. Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Time Series Tahun 1999-2006

Peningkatan penduduk di Kabupaten Buol sejak awal berdirinya pada tahun 1999 hingga tahun 2006 mencapai 17.41 persen. Penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Buol pada tahun 2006 adalah 103, berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Hingga akhir tahun 2006 kepadatan penduduk tercatat 28 jiwa/Km², pada luas wilayah Kabupaten Buol sebesar 4.043,57 Km². Luas wilayah, jumlah penduduk, urutan banyaknya jumlah penduduk dan urutan kepadatan penduduk pada 9 Kecamatan di Kabupaten Buol dapat dilihat pada Tabel 2.8.



Tabel 2.8
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Urutan Banyaknya
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Urutan Kepadatan Penduduk
pada 9 Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2006

NO	Kecamatan	Luas (Km) ²	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Urutan Banyaknya Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km)	Urutan Kepadatan
			Laki-laki (L)	Perempuan (P)	(L)+ (P)			
1	Biau	361.65	8.252	8.066	16.318	2	45	4
2	Lipunoto	217.80	9.947	9.956	19.903	1	91	1
3	Momunu	400.40	6.465	6.246	12.711	4	32	6
4	Tiloan	1.437,70	3.807	3.503	7.310	9	5	8
5	Bokat	196,10	5.865	5.744	11.609	6	59	3
6	Bukal	355,52	6.004	5.648	11.652	5	33	5
7	Bunobogu	327,15	4.102	4.029	8.131	8	25	7
8	Gadung	160,38	5.295	5.155	10.450	7	65	2
9	Paleleh	586,87	7.516	7.360	14.876	3	25	7
		4.043,57	57.253	55.707	112.960	-		

Sumber : BPS Kab. Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2006 (Data Diolah Kembali)



Tabel 2.9.
Klasifikasi Penduduk menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Buol Tahun 2006

No	Kelompok Umur	Kecamatan									
		Biau	Lipunoto	Momunu	Tiloan	Bokat	Bukal	Bunobogu	Gadung	Paleleh	Jumlah
1*)	0-4	2.107	2.496	1.378	790	1.437	1.442	1.184	1.524	1.818	14.176
2*)	5-9	2.241	2.725	1.796	1.031	1.852	1.857	1.196	1.536	2.169	16.403
3*)	10-14	2.102	2.659	1.821	1.050	1.537	1.546	1.108	1.419	1.982	15.224
4	15-19	1.957	2.383	1.543	888	1.193	1.197	784	1.006	1.588	12.539
5	20-24	1.403	1.735	1.236	712	1.073	1.076	686	882	1.475	10.278
6	24-29	1.290	1.591	1.099	631	863	869	637	652	1.273	8.905
7	30-34	1.013	1.220	734	422	733	735	507	642	1.163	7.169
8	35-39	894	1.095	720	216	674	676	498	642	849	6.464
9	40-44	657	803	556	320	493	492	357	461	545	4.684
10	45-49	659	810	564	324	466	466	354	458	564	4.665
11	50-54	563	674	376	216	388	388	258	331	459	3.647
12	55-59	409	487	277	159	238	238	163	208	310	2.849
13	60-64	371	440	212	123	216	216	158	202	237	2.176
14*)	65-69	243	300	153	88	180	180	98	127	160	1.537
15*)	70-74	196	221	106	59	137	137	72	93	144	1.164
16*)	75+	202	242	140	79	137	137	70	91	140	1.238

Sumber : BPS Kab. Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2006 (Data Diolah Kembali)

Keterangan :*) Kelompok Umur Non Produktif



Pada tahun 2006, jumlah penduduk terbanyak Kabupaten Buol berada di Kecamatan Lipunoto (19.903 Jiwa) dengan kepadatan tertinggi sebesar 91 Jiwa/Km² yang berada pada wilayah seluas 217,80 Km², sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tiloan (7.310 Jiwa), juga merupakan wilayah yang terjarang penduduknya, yaitu sebesar 5 Jiwa/Km² dengan jumlah penduduk yang paling sedikit.

Komposisi umur penduduk di Kabupaten Buol Menunjukkan 40.60 persen penduduk masih di bawah usia 15 tahun, hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Buol masih tergolong penduduk berusia muda. Tabel 2.9 di atas memperlihatkan klasifikasi penduduk menurut kelompok umur. Jumlah penduduk berusia di bawah 15 tahun sebanyak 45.803 jiwa, dan jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas sebanyak 3.939 jiwa. Besarnya ketergantungan pada tahun 2006 adalah 79, artinya setiap 100 jiwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 79 jiwa penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif adalah 63.218 jiwa atau sebesar 55.96 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Buol, sedangkan jumlah penduduk yang berada pada usia tidak produktif adalah sebanyak 49.742 jiwa atau sebanyak 44.03 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Buol.

Jumlah pencari kerja pada tahun 2006 sebanyak 1.109 orang, sebagian besar belum dapat ditempatkan karena kurangnya lowongan/kesempatan kerja yang tersedia. Berdasarkan tingkat pendidikan, pencari kerja terbanyak adalah mereka yang berpendidikan SMA sebanyak 851 orang (76,73 persen); diikuti yang berpendidikan sarjana 146 orang (13.16 persen); D III 35 orang (3.15 persen); DI dan DII 44 orang (396 persen) SMP 32 Orang (2.228 persen); dan berpendidikan SD 1 orang (0.09 persen). Kesempatan kerja terbuka pada bulan juli 2006 untuk 466 orang atau sebesar 42.01 persen dari jumlah pencari kerja, terdiri dari : (1) Sarjana 90 orang (8.11 persen); (2) D III 20



orang (1.80 persen); (3) DI/DII 65 orang (5.86 orang); (4) SMA 286 orang (25.78 persen); dan (5) SMP 5 Orang (0.45 persen).

Pada tahun 2006, kondisi tingkat pendidikan tertinggi penduduk di Kabupaten Buol yang berusia 10 tahun ke atas diurut dari yang paling tinggi sampai terendah adalah sebagai berikut: (1) SD 39.18 persen; (2) SMTP 22.08 persen; (3) tidak tamat SD 21.40 persen; (4) SMTA Umum 10.05 persen; (5) SMTA Kejuruan 3.42 persen; (6) tidak/belum pernah sekolah 1.63 persen; (7) Universitas/DIV 1.16 persen; (8) Akademi DI/DII 0.82 persen; (9) Akademi/D III 0.27 persen.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Buol terbanyak berada pada tingkat pendidikan SD (21.40 persen), dan kondisi ini berlaku sama untuk seluruh di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebanyak 35,76 persen penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang berusia 10 tahun ke atas pada tahun 2006 pendidikan tertingginya SD, kecuali di Kota Palu. Penduduk Kota Palu yang berusia 10 tahun ke atas, sebagian besar pendidikan tertinggi berada pada tingkat SMTA Umum (32.05 persen). Presentase angka putus sekolah di Kabupaten Buol pada tahun 2006 sebesar 0.5 persen dari jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, selain itu masih terdapat anggota masyarakat di Kabupaten Buol yang buta huruf yaitu sebesar 1.68 persen dari Penduduk Sulawesi Tengah.

Kemampuan penduduk atau sumber daya masyarakat yang ada masih lemah, jika dibandingkan dengan potensi daerah yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produk, variasi produk, dan lingkup pasar yang berhasil ditembus oleh masyarakat. Untuk itu, kemampuan masyarakat dalam berusaha perlu ditingkatkan, tidak saja dari aspek produksi, namun juga kemampuan masyarakat memasarkan produk-produknya. Karenanya, masyarakat perlu dibekali pendidikan nonformal yang sesuai kebutuhan untuk menunjang kegiatan usaha yang ditekuni.



Ditinjau dari sektor ekonomi dan menurut lapangan usaha, jumlah penduduk di Kabupaten Buol yang bekerja disetiap kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 2.10.



Tabel. 2.10
Klasifikasi Penduduk yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha, Di Kabupaten Buol Tahun 2006

No	Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk pada setiap Kecamatan									
		Biau	Lipunoto	Momunu	Tiloan	Bokat	Bukal	Bunobogu	Gadung	Paleleh	Jumlah
1	Pertanian	6.312	7.695	4.843	1.747	3.717	3.715	2.647	3.730	5.421	40.827*)
2	Pertambangan/ Penggalian	270	105	-	-	45	24	655	425	183	3.278
3	Konstruksi	146	270	133	53	138	83	77	-	56	1.182
4	Perdagangan	22	1117	217	90	170	134	185	75	52	2.509
5	Angkutan/ Komunikasi	31	275	12	23	103	65	153	-	32	799
6	Listrik/Air	332	31	-	-	4	4	19	-	4	108
7	Pemerintahan	158	687	266	157	4	23	173	74	274	2.112
8	Jasa-jasa	-	358	111	192	462	158	347	11	250	2.754
9	Sewa Rumah	25	-	-	-	-	-	35	-	7	72**)
10	Industry	25	25	153	80	185	90	145	-	92	971
	Jumlah	7.401	10.563	5.735	3.400	4828	4.296	4.241	2.242	6.371	54.612

Sumber : BPS Kab. Buol, Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Buol Tahun 2006 (Data Diolah Kembali)

Keterangan : *) Tertinggi ; **) Terendah



Dari jumlah penduduk Kabupaten Buol pada tahun 2006 yaitu sebanyak 112.960 jiwa, sebanyak 63.218 jiwa pada usia produktif. Sebagian besar, atau sebanyak 40.827 jiwa (64.58 persen) dari penduduk usia produktif bekerja dilapangan usaha/sector pertanian. Dengan demikian, sektor pertanian adalah *leading sector* dalam lapangan usaha masyarakat Kabupaten Buol. Besarnya penduduk yang bekerja dilapangan usaha lain, jumlahnya berada jauh dibawah sektor pertanian. Misalnya, masyarakat yang bekerja di sektor pertambangan yang jumlah pekerjanya berada di bawah langsung dari sektor pertanian tercatat sejumlah 3.278 jiwa, atau sekitar 5.18 persen dari usia produktif.

Usaha jasa yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Buol menurut statistik potensi desa tahun 2005 adalah : (1) Bengkel (mobil/motor) sebanyak 64 unit, tersebar diseluruh kecamatan); (2) Bengkel alat elektronik, sebanyak 35 unit, tersebar diseluruh kecamatan; (3) Usaha Fhoro Copy, sebanyak 12 unit, di Kecamatan Lipunoto dan Paleleh; (5) Salon Kecantikan, sebanyak 22 unit di Kecamatan Biau, Kecamatan Lipunoto, Kecamatan Momunu, Kecamatan Bunobogu dan Kecamatan Paleleh; (6) Bengkel Las, sebanyak 5 unit, di Kecamatan Lipunoto, Bokat dan Bukal; (7) Persewaan alat pesta sebanyak 45 unit di delapan kecamatan, kecuali Kecamatan Bukal.

Kabupaten Buol merupakan salah satu daerah penerima transmigrasi yang sangat potensial di Provinsi Sulawesi Tengah, selama ini telah menempatkan sebanyak 4.479 Kepala Keluarga (KK) atau 17.706 jiwa transmigran (sejak Pra Pelita sampai Pelita VI). Para transmigran berasal dari : Bali, Jatim, Jateng, DIY, DKI, NTB, NTT, Sulsel dan Lokal. Lokasi penempatan di Kecamatan Momunu, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal, Kecamatan Paleleh.



2.1.4. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Kabupaten Buol menunjukkan tanda-tanda perbaikan. PDRB pada tahun 2004 mulai menggunakan atau berdasarkan harga konstan 2000, maka terlihat peningkatan jumlah yang drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berdasarkan harga konstan 1993, perbandingan PDRB dari tahun 2002-2006, sebagai berikut : (1) PDRB Kabupaten Buol atas dasar harga berlaku tahun 2002 sebesar 443.441 juta rupiah, sedangkan berdasarkan harga konstan 2002 mencapai 363.341 juta rupiah; (2) PDRB Kabupaten Buol atas dasar harga berlaku tahun 2003 sebesar 492.078 juta rupiah, sedangkan berdasarkan harga konstan 2000 mencapai 388.374 juta rupiah; (3) PDRB Kabupaten Buol atas dasar harga berlaku tahun 2004 sebesar 549.673 juta rupiah, sedangkan berdasarkan harga konstan 2000 mencapai 415.877 juta rupiah; (4) PDRB Kabupaten Buol atas dasar harga berlaku tahun 2005 sebesar 633.384 juta rupiah, sedangkan berdasarkan harga konstan 2000 sebesar 445.448 juta rupiah; (5) PDRB Kabupaten Buol atas dasar harga berlaku tahun 2006 sebesar 721.446 juta rupiah, sedangkan berdasarkan harga konstan 2000 sebesar 477.669 juta rupiah.

Sumbangan PDRB di Kabupaten Buol tahun 2002-2006, ADH berlaku diurutkan dari yang terbesar ke yang paling kecil adalah sebagai berikut : (1) Lapangan usaha pertanian 345.398.000 rupiah; (2) Lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran 75.684.000 rupiah; (3) Lapangan usaha jasa-jasa 58.467.000 Rupiah; (4) Lapangan usaha bangunan 34.162.000 rupiah; (5) Lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 20.033.000 rupiah; (6) Lapangan usaha angkutan dan komunikasi 19.607.000 rupiah; (7) Lapangan usaha angkutan dan komunikasi 19.607.000 rupiah; (8)



Lapangan usaha penggalian 5.533.000 rupiah; (9) Lapangan usaha listrik dan air bersih 3.674.000 rupiah.

Sumbangan PDRB di Kabupaten Buol tahun 2002-2006, ADH konstan 2000 diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah sebagai berikut : (1) Lapangan usaha pertanian 250.408.000 rupiah; (2) Lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran 51.463.000 rupiah; (3) Lapangan usaha jasa-jasa 44.184.000 rupiah; (5) Lapangan usaha bangunan 24.174.000 rupiah; (6) Lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 15.298.000 rupiah; (7) Lapangan usaha angkutan dan komunikasi 15.608.000 rupiah; (8) Lapangan usaha penggalian 4.115.000 rupiah; (9) Lapangan usaha listrik dan air bersih 2.550.000 rupiah.

Walaupun tidak terdapat ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan, PDRB di Kabupaten Buol masih relatif kecil. Berdasarkan hasil kajian distribusi pendapatan daerah di Kabupaten Buol pada tahun 2005, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Buol memiliki tingkat PDRB perkapita relatif merata. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Buol relatif merata selama lima tahun.

Dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, PDRB Kabupaten Buol pada tahun 2006, ADH berlaku dan ADH konstan, berada di urutan ke sembilan, dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Tabel 2.11. memperlihatkan PDRB menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2005 dan 2006.

Tabel 2.11
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) di Provinsi Sulawesi Tengah
Pada Tahun 2005 dan 2006.

No	Nama Kabupaten/Kota	ADH Berlaku		ADH Konstan	
		2005	2006	2005	2006
1	Banggai kepulauan	708.968	806.091	500.313	538.347
2	Banggai	1.866.075	2.087.578	1.337.881	1.434.794
3	Morowali	1.382.612	1.717.982	1.058.412	1.197.029
4	Poso	1.104.274	1.237.298	764.782	824.885
5	Donggala	3.234.706	3.729.071	2.240.890	2.401.357
6	Toli-toli	1.317.451	1.454.991	917.580	979.821
7	Buol	633.384	721.446	445.448	477.699*)
8	Parigi Moutong	2.971.655	3.462.071	2.078.218	2.240.230
9	Tojo Una-Una	846.567	562.679	344.540	368.807
10	Palu	2.868.697	3.324.565	344.540	2.053.519
Jumlah		16.574.388	19.103.773	11.914.127	12.516.489

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2006
Keterangan : *) PDRB Kabupaten Buol

PDRB Kabupaten Buol pada tahun 2006 ADH Konstan berada di urutan kesembilan, dari 10 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. PDRB yang berada di bawah Kabupaten Buol, atau pada urutan ke sepuluh PDRB di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Tojo Una-una. Sedangkan tiga urutan PDRB terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2006 adalah Kabupaten Donggala, di ikuti oleh Kabupaten Parigi Moutong dan kota Palu.

Sumbangan PDRB terbesar di Kabupaten Buol, dari tahun 2002-2005 berasal dari lapangan usaha pertanian (345.398.000 rupiah), dengan urutan



sumbangan dari sub lapangan usahanya sebagai berikut : Tanaman perkebunan (122.302.000 rupiah); Tanaman bahan makanan (109.751.000 rupiah); Kehutanan (52.477.000 rupiah); Perikanan (38.217.000 rupiah); dan Peternakan (22.651.000 rupiah).

Berikut ini diuraikan capaian/keberhasilan-keberhasilan bidang ekonomi di Kabupaten Buol pada tahun 2006, dibandingkan dengan tahun sebelumnya :

1) Tanaman pangan

pada tahun 2006 produksi (a) padi di Kabupaten Buol mengalami peningkatan sebesar 33.72 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 14.308 ton pada tahun 2005 menjadi 19.133 ton di tahun 2006. Produksi padi yang dimaksud, terdiri dari padi sawah dan padi lading dengan masing-masing produksi 17.493 ton untuk padi sawah dan 1.640 ton untuk padi lading, (b) komoditi jagung pada tahun 2006 terjadi kenaikan produksi sebesar 97.7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 1.260 ton pada tahun 2005 menjadi sebanyak 2.492 ton pada tahun 2006, (c) komoditi kacang tanah tahun 2006 pada tahun 2006 meningkat sebesar 14.96 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 294 ton pada tahun 2005 menjadi 338 ton pada tahun 2006 (d) komoditi kacang kedele tahun 2006 meningkat sebesar 16.3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 49 ton pada tahun 2005 menjadi sebanyak 57 ton pada tahun 2006.

2) Populasi, pemotongan, dan produksi ternak

Populasi ternak besar tahun 2006 di Kabupaten Buol adalah sebanyak 10.765 ekor sapi, sedangkan untuk populasi ternak kecil terdiri dari 10.505 ekor kambing dan 1.179 ekor sapi. Populasi unggas terdiri dari 44.825 ekor ayam buras 4.045 ekor itik.

Populasi ternak kecil di Kabupaten Buol meningkat dari tahun 2005 ke tahun 2006, misalnya : (a) populasi kambing meningkat 0.3 persen, dari 10.470 ekor pada tahun 2005 menjadi 10.505 ekor pada tahun 2006; dan (b)



populasi babi meningkat sebesar 30.96 persen dari 914 ekor pada tahun 2005 menjadi 1.197 ekor pada tahun 2006. Sedangkan populasi unggas, khususnya ayam buras meningkat sebesar 13.63 persen, dari 39.470 ekor pada tahun 2005 menjadi 44.842 ekor pada tahun 2006.

Jumlah pemotongan ternak besar meningkat dari sebelumnya, yaitu : (a) pemotongan ternak sapi pada tahun 2006 sebanyak 1.247 ekor, sedangkan pada tahun 2005 973 ekor (meningkat sebesar 28.16 persen); (b) pemotongan ternak kambing pada tahun 2006 sebanyak 792 ekor, sedangkan pada tahun 2005 sebanyak 2536 ekor (meningkat sebesar 220.20 persen); (c) pemotongan ternak babi pada tahun 2006 sebanyak 231 ekor, sedangkan pada tahun 2005 sebanyak 159 ekor (meningkat sebesar 31.16 persen). Jumlah pemotongan ternak besar yang meningkat dari tahun 2005 ke tahun 2006 memberikan gambaran bahwa adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan konsumsi ternak besar.

Produksi daging sapi pada tahun 2006 meningkat sebesar 117.19 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 69.824 Kg pada tahun 2005, meningkat menjadi 151.695 Kg pada tahun 2006. Produksi daging kambing juga meningkat sebesar 446.10 persen, yaitu dari 6.093 Kg pada tahun 2005, menjadi 33.274 Kg pada tahun 2006. Adapun pemotongan unggas pada tahun 2006 sejumlah 49.807 Kg.

Produksi telur ayam buras mengalami peningkatan dari 23,166 butir pada tahun 2005 menjadi 332.910 buti pada tahun 2006, atau dari 643 Kg pada tahun 2005 menjadi 18.820 Kg pada tahun 2006. Produksi telur itik mengalami peningkatan dari 17.327 butir pada tahun 2005 menjadi 367.200 pada tahun 2006 atau dari 1.120 Kg pada tahun 2005 menjadi 140.93 Kg pada tahun 2006.

3) **Produksi Perikanan**

Produksi Perikanan di Kabupaten Buol pada Tahun 2006 adalah sebesar 11.073 ton dengan nilai 562.240.000 rupiah, dan didominasi oleh



perikanan laut. Dari sekian banyak ikan laut awetan di Kabupaten Buol, sebagian besar menggunakan teknik penggaraman. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) di Kabupaten Buol dilihat dari kategori usaha perikanan laut pada tahun 2006 adalah sebagai berikut : (a) RTP Perikanan Laut : tanpa perahu sebanyak 316 RTP, perahu tak bermotor sebanyak 1268 RTP, Perahu tempel sebanyak 983 RTP, dan kapal motor sebanyak 18 RTP; (b) RTP Budidaya : kolam sebanyak 173 RTP dan tambak sebanyak 497 RTP. Jenis Alat tangkap yang digunakan nelayan bervariasi, yaitu : (a) Payang; (b) pukot pantai; (c) Pukat cicin; (d) jaring insang hanyut; (e) jaring insang tetap; (f) perangkap; dan (g) pancing.

Nilai produksi perikanan laut umumnya meningkat, yaitu dari 497.935.000 rupiah pada tahun 2005 menjadi 562.240.000 rupiah ditahun 2006. Demikian juga nilai produksi perikanan darat, mengalami peningkatan sebagai berikut : (1) budi daya tambak, dari 463.125.000 rupiah pada tahun 2005 meningkat menjadi 512.361.000 rupaih ditahun 2006; (2) budi daya kolam dari 228.103.000 rupiah pada tahun 2005 meningkat menjadi 309.245.000 rupiah ditahun 2006; selanjutnya (3) karamba pada tahun 2006 nilai produksinya mencapai 392.000.000 rupiah.

Nilai produksi ikan laut awetan dengan sistem penggaraman meningkat dari 1.84 ton pada tahun 2005 menjadi 1.94 ton pada tahun 2006, dengan nilai produksi dari 7.558.000 rupiah pada tahun 2005 menjadi 8.107.000 rupiah pada tahun 2006.

Selain adanya peningkatan produksi, juga terjadi penurunan produksi pada beberapa komoditi pertanian. Pada tahun 2006, terjadi penurunan produksi pertanian tanaman pangan dibandingkan tahun 2006. Komoditi Ketela pohon pada tahun 2006 menurun sebesar 20.83 persen dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu dari 1.328 ton pada tahun 2005 menjadi 1.099 ton pada tahun 2006. Komoditi Ketela Rambat pada tahun 2006 menurun sebesar 33.8 persen dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu dari 1.749 ton pada tahun



2005 menjadi 1.307 ton pada tahun 2006. Komoditi Kacang Hijau pada tahun 2006 menurun sebesar 27.08 persen dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu dari 192 ton pada tahun 2005 menjadi 140 ton pada tahun 2006

Produksi tanaman coklat pada tahun 2006 mengalami penurunan sebanyak 0.01 persen yaitu dari 7.255 ton pada tahun 2006 pada tahun 2005 menjadi 7.254 ton pada tahun 2006. Sedangkan produksi tanaman cengkeh pada tahun 2006 sebanyak 110 ton atau tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2005, demikian juga dengan produksi lada pada tahun 2006 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2005 yaitu sebanyak 0.9 ton.

Populasi ternak besar, seperti sapi dan kuda mengalami penurunan. Populasi sapi mengalami penurunan 3.15 persen dari 11.116 ekor pada tahun 2005 menjadi 10.765 ekor pada tahun 2006. Populasi kuda menurun dari 2 ekor menjadi tinggal 1 ekor kuda.

Dibandingkan dengan tahun 2005, produksi ikan yang bersal dari perikanan darat, khususnya pada perairan umum pada tahun 2006 mengalami penurunan yaitu dari 2.484 ton pada tahun 2005, menjadi 176 ton pada tahun 2006. Secara umum, produksi ikan laut awetan menurun dari 4.15 ton pada tahun 2005 menjadi 4.13 ton pada tahun 2006, dengan nilai produksi total 32.945.000 rupiah pada tahun 2005 menjadi 29.270.000 rupiah pada tahun 2006. Produksi Ikan laut awetan dengan sistem pengasapan menurun dari 2.31 ton pada tahun 2005 menjadi 2.19 ton tahun 2006, dengan nilai produksi 25 387.000 rupiah pada tahun 2005 menjadi 21.163.000 rupiah pada tahun 2006.

Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Sumbangan PDRB di Kabupaten Buol yang berda pada urutan kedua dari tahun 2002-2005 berasal dari lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran (75.684.000 rupiah), dengan urutan sumbangan dari sub lapangan



usahanya sebagai berikut: (1) Perdagangan besar dan eceran (69.213.000 rupiah); (2) restoran (5.725.000 rupiah); dan (3) hotel (576..000 rupiah).

Permasalahan yang ada untuk menilai dengan baik perkembangan perdagangan dari waktu ke waktu di Kabupaten Buol adalah belum dilakukannya pencatatan volume dan nilai perdagangan lokal, antar pulau maupun negara. Pencatatan volume dan nilai perdagangan perlu dilakukan, agar aktivitas perekonomian masyarakat dapat diarahkan dan ditingkatkan.

Jasa - jasa

Sumbangan PDRB di Kabupaten Buol yang berada pada urutan ketiga dari tahun 2002-2005 berasal dari lapangan usaha jasa-jasa (58.467.000 rupiah) dengan urutan sumbangan dari sub lapangan usahanya sebagai berikut : (1) Swasta (29.838.000 rupiah), terdiri dari: (a) Perorangan rumah tangga (22.638.000 rupiah), (b) Sosial kemasyarakatan (7.133.000 rupiah), dan (c) Hiburan dan rekreasi (67.000 rupiah); dan (2) Pemerintahan umum (28.630.000 rupiah).

Industri Pengolahan

Sumbangan PDRB di Kabupaten Buol yang berada pada urutan keempat dari tahun 2003-2005 berasal dari lapangan usaha industri pengolahan (57.259.00 rupiah), dengan urutan sumbangan dari sub lapangan usahanya sebagai berikut : (1) Kayu dan hasil hutan lainnya (31.706.000 rupiah); (2) Makanan, minuman, dan tembakau (22.771.000 rupiah); (3) semen dan barang galian bukan logam (1.991.000 rupiah); (4) Kertas dan barang cetakan (407.000 rupiah); (5) Tekstil barang dari kulit dan alas kaki (240.000); (6) Alat angkutan, mesin dan peralatannya (97.000 rupiah); (7) Barang lainnya (33.000 rupiah); dan (8) Pupuk kimia dan barang dari karet (16.000).

Indikasinya adanya perusahaan industri yang tidak lagi beroperasi merupakan salah satu kondisi yang perlu di telusuri lebih lanjut. Pada tahun



2005, di Kabupaten Buol tercatat ada satu perusahaan industry logam, mesin elektronik, dan kimia. Namun pada tahun 2006 data perusahaan ini tidak lagi terlihat.

Jumlah perusahaan industri di Kabupaten Buol pada tahun 2006 sebanyak 151 perusahaan industri kecil, dan 53 perusahaan industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK). Tenaga kerja pada perusahaan kecil sebanyak 105 orang dan pada perusahaan industri pertanian dan kehutanan sebanyak 176 orang.

Pada tahun 2006, nilai investasi perusahaan industri kecil meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 590.000.000 rupiah (tahun 2005 sebesar 565.000.000 rupiah), sedangkan nilai investasi perusahaan industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) tetap, yaitu sebesar 2.583.520.000 rupiah. Nilai investasi perusahaan industri meningkat 0.8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total investasi perusahaan industri di Kabupaten Buol pada tahun 2006 adalah 3.173.520.000 rupiah, sedangkan pada tahun 2005 nilai investasi perusahaan industri adalah 3.148.250.000 rupiah.

Industri kerajinan rumah tangga di Kabupaten Buol tahun 2006 sebanyak 1998 unit, yaitu : (1) Kecamatan Biau 104 unit; (2) Kecamatan Lipunoto sebanyak 289 unit; (3) Kecamatan Momunu 454 unit; (5) Kecamatan Tiloan 138 unit; (6) Kecamatan Bokot 13 unit; (7) Kecamatan Bukal 8 unit; (8) Kecamatan Bunobogu 393 unit; (1) Kecamatan Gadung 474 unit; (1) Kecamatan Paleleh 125 unit. Jenis industri kecil/rakyat adalah : (1) Kerajinan bambu / kayu / rotan tersebar diseluruh kecamatan; (2) Kerajinan Logam mulia di Kecamatan Momunu dan Kecamatan Bunobogu; (3) Kerajinan anyaman gerabah / keramik, tersebar didelapan kecamatan kecuali Kecamatan Bukal; (4) Makanan, tersebar ditujuh Kecamatan, kecuali Kecamatan Biau dan Kecamatan Paleleh.



Bangunan

Sumbangan PDRB di Kabupaten Buol yang berada pada urutan kelima dari tahun 2002-2005 berasal dari lapangan usaha bangunan (34.162.000 rupiah).

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sumbangan PDRB di Kabupaten Buol yang berada pada urutan keenam dari tahun 2002-2005 berasal dari lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (20.033.000 rupiah) dengan urutan sumbangan dari sub lapangan usahanya sebagai berikut : (1) Sewa bangunan (13.287.000 rupiah); (2) Bank (4.713.000 rupiah); (3) jasa perusahaan (1.147.000 rupiah); dan (4) Lembaga keuangan tanpa bank (885.000 rupiah).

Usaha Angkutan dan Komunikasi

Sumbangan PDRB di Kabupaten Buol yang berada pada urutan ketujuh dari tahun 2002-2005 berasal dari lapangan usaha angkutan dan komunikasi (19.607.000 rupiah). Dengan urutan sumbangan dari sub lapangan usahanya sebagai berikut : (1) Angkutan jalan raya (12.085.000 rupiah); (2) Angkutan laut (4.850.000 rupiah); (3) Jasa penunjang angkutan (2.067.000 rupiah); (4) Angkutan udara (67.000 rupiah); dan (5) Sebesar 538.000 rupiah dari komunikasi.

Penggalian

Sumbangan PDRB di Kabupaten Buol yang berada pada urutan kedelapan dari tahun 2002-2005 berasal dari lapangan usaha penggalian sebesar 5.533.000 rupiah.

Listrik dan Air Bersih

Sumbangan PDRB di Kabupaten Buol yang berada pada urutan kesembilan atau urutan terakhir dari tahun 2002-2005 berasal dari lapangan



usaha listrik dan air bersih sebesar 3.674.000 rupiah, urutan sumbangan dari sub lapangan usahanya sebagai berikut (1) Listrik (2.783.000 rupiah) : dan (2) air bersih (891.000 rupiah)

Keuangan Daerah

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Buol tahun 2006 sebesar 18.061.098.566 rupiah. Dengan penerimaan tertinggi dari sektor pertambangan yaitu sebesar 16.740.484.025 rupiah. Dan terendah dari sektor kehutanan yaitu sebesar 85.250.500 rupiah. Adapun realisasi penerimaan dan jumlah wajib pajak PBB pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Buol pada 2005 dan 2006 dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12.
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Buol Tahun 2005-2006

No	Kecamatan	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Rp)		Jumlah Wajib Pajak PBB	
		2005	2006	2005	2006
1	Biau	12.739.000**)	12.739.000	2.091	2.091
2	Lipunoto	20.524.049	20.524.049	2.118	2.118
3	Momunu	36.564.290	38.961.134	2.196	2.196
4	Tiloan	27.563.326	27.563.326	2.125	1.481**)
5	Bokat	31.820.152	48.794.084	2.203	2.203
6	Bukal	95.923.433*)	59.615.869*)	2.148	1.948
7	Bunobogu	14.532.803	33.215.963	1.771**)	1.951
8	Gadung	17.637.610	23.093.622	2.370	2.519
9	Paleleh	28.454.214	28.454.214	2.994*)	2.994*)
	Jumlah	285.758.877	292.961.261	20.016	19.501*)

Sumber : BPS Kab. Buol, Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Buol Time Series Tahun 2005-2006 Keterangan : *) Tertinggi: **)Terendah

Realisasi penerimaan PBB tertinggi di Kabupaten Buol pada tahun 2005 adalah Kecamatan Bukal yaitu sebesar 95.923.433 rupiah, dan realisasi



penerimaan PBB terendah adalah Kecamatan Biau yaitu sebesar 12.739.000. rupiah. Realisasi penerimaan PBB tertinggi pada tahun 2006 tetap Kecamatan Bukal sebesar 59.615.869 rupiah (terjadi penurunan penerimaan sebesar 35.307.564 rupiah dari tahun sebelumnya). Realisasi penerimaan PBB terendah adalah Kecamatan Biau dengan besar penerimaan PBB sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar 12.739. 000 rupiah.

Jumlah wajib pajak PBB terbanyak di Kabupaten Buol pada tahun 2005 dan tahun 2006 ada di Kecamatan Paleleh, yaitu sebanyak 2,994 wajib pajak. Jumlah wajib pajak PBB paling sedikit pada tahun 2005 ada di Kecamatan Bunabogu sebanyak 1.771 wajib pajak PBB, dan jumlah wajib pajak PBB paling sedikit di Kabupaten Buol pada tahun 2006 ada di Kecamatan Tiloan yaitu sebanyak 1.481 wajib pajak PBB.

Dilihat dari kategori Objek Pajak yaitu Perdesaan dan Perkotaan, Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan, empat kategori Objek penerimaan PBB (Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan dan Pertambangan) dari tahun 2005-2006 mengalami kenaikan, sebagai berikut : (1) sektor pertambangan, dari 10.923.548.280 rupiah pada tahun 2005, menjadi 16.740.484.025 rupiah pada tahun 2006. (2) Sektor Perkebunan, dari 625.200.000 rupiah pada tahun 2005 menjadi 752. 244.926 rupiah pada tahun 2006 : (3) sektor perdesaan, dari 289.298.000.rupiah pada tahun 2005 menjadi 331.971.000 rupiah pada tahun 2006.

Dari lima kategori objek pajak yaitu: (1) Perdesaan. (2) Perkotaan. (3) Perkebunan .(4) Kehutanan, dan (5) Pertambangan. Empat kategori Objek Penerimaan PBB (Perdesaan, Perkotaan, perkebunan dan pertambangan) dari tahu 2004-2006 mengalami kenaikan sedangkan penerimaan PBB dari Objek Pajak Kehutanan, mengalami penurunan setiap tahunnya, yaitu tahun 2004 sebesar 714.918.000 rupiah menjadi 609.110.00 rupiah pada tahun 2005, dan selanjutnya pada tahun 2006 turun menjadi 85.250.500 rupiah.



Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah Kabupaten Buol pada tahun 2005 sebesar 149.136.988.386 rupiah. Penerimaan diperoleh dari : (1) Bagian sisa lebih perhitungan tahun lalu: (2) Pajak Daerah: (3) Retribusi Daerah: (4) Bagian Laba BUMD: (5) Penerimaan Lain-lain; (6) Bagi Hasil Pajak; (7) Bagi Hasil Bukan Pajak; (8) Dana Alokasi Umum; (9); Dana Alokasi Khusus ; (10) Penerimaan Lainnya (dana kontigensi).

Realisasi penerimaan rutin dan pembangunan ditiap kecamatan yang ada di kabupaten Buol pada tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 2.13

Tabel 2.13.

Realisasi Penerimaan Rutin dan Pembangunan Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Buol Tahun 2006

No	Kecamatan	Realisasi penerimaan (Rp)		Jumlah (Rp)
		Rutin	Pembangunan	
1	Biau	38.429.000	348.888.000*)	387.317.000*)
2	Lipunoto	32.912.743**)	179.039.158	212.251.901
3	Momunu	105.464.000	151.143.000	256.607.000
4	Tiloan	121.718.000	140.655.000	262.373.000
5	Bokat	105.000.000	105.000.000	210.000.000
6	Bukal	84.000.000	96.000.000	180.000.000
7	Bunobogu	136.000.000	10.829.000**)	146.829.000**)
8	Gadung	153.000.000*)	106.425.000	259.425.000
9	Paleleh			
	Jumlah	776.523.743	1.137.979.158	1.914.802.902

Sumber : BPS Kab. Buol, Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Buol Tahun 2006
Keterangan : *) Tertinggi: **) Terendah

Realisasi penerimaan rutin dan pembangunan untuk 9 kecamatan di Kabupaten Buol pada tahun 2006 sebesar 1.914.802.902 rupiah.



Dari tabel 2.13 tersebut di atas dapat dijelaskan : (1) Realisasi penerimaan rutin terbesar adalah Kecamatan Gadung, yaitu sebesar 153.000.000 rupiah. (2) Realisasi penerimaan pembangunan terbesar adalah Kecamatan Biau sebesar 348.000.000 rupiah: (3) realisasi penerimaan rutin terkecil adalah Kecamatan Lipunoto sebesar 32.912.743 rupiah: (4) Realisasi penerimaan pembangunan terkecil adalah Kecamatan Bunobogu sebesar 10.829.000 rupiah. Total realisasi penerimaan terbesar adalah Kecamatan Biau yaitu sebesar 387.317.000 rupiah dan total realisasi penerimaan terkecil adalah Kecamatan Bunobogu yaitu sebesar 146.829.000 rupiah.

Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pada tahun anggaran 2006, pengeluaran rutin Kabupaten Buol mencapai 71.46 miliar rupiah dan pengeluaran pembangunan sebesar 141.80 miliar rupiah. Dengan demikian total pengeluaran di Kabupaten Buol pada tahun 2006 adalah sebesar 213,26 miliar rupiah. Pengeluaran rutin mengalami peningkatan hampir 90 persen dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Yaitu pada tahun 2005, sebesar 57,89 miliar dan pengeluaran pembangunan mencapai 100 persen lebih dibanding tahun sebelumnya. (Kabupaten Buol dalam angka, tahun 2006).

Realisasi pengeluaran rutin dan pembangunan di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Buol pada tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 2.14.



Tabel 2.14.
Realisasi Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Berdasarkan
Kecamatan se Kabupaten Buol Tahun 2006

No	Kecamatan	Realisasi pengeluaran (Rp)		Jumlah (Rp)
		Rutin	Pembangunan	
1	Biau	38.429.000	348.888.888	387.317.000
2	Lipunoto	38.912.743 **)	179.039.158	212.251.901
3	Momunu	95.964.000.	135.643.000	231.607.000
4	Tiloan	121.718.000	140 655.000	262.373.000
5	Bokat	105.000.000	105.000.000	210.000.000
6	Bukal	84.000.000	96.000.000	180.000.000
7	Bunobogu	136.000.000	10.829.000 **)	146.829.000**)
8	Gadung	153.000.000	106.425.000	259.425.000
9	Paleleh			
	Jumlah	767.023.743	1.122.480.046	1.889.802.901

Sumber : BPS Kab. Buol, Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Buol Tahun 2006

Keterangan *) Tertinggi: **) Terendah

Total realisasi pengeluaran rutin dan pembangunan untuk 9 kecamatan di Kabupaten Buol pada tahun 2006 sebesar 1.889.802.901 rupiah. Penjelasan realisasi pengeluaran rutin dan pembangunan terbesar dan terkecil adalah sebagai berikut (1) Realisasi pengeluaran rutin terbesar adalah Kecamatan Biau sebesar 153.000.000 rupiah : (2) Realisasi pengeluaran pembangunan terbesar adalah Kecamatan Biau sebesar 348.000.000 rupiah. (3) Realisasi pengeluaran rutin terkecil adalah Kecamatan Liponoto sebesar 32.912.743 rupiah: (4) Realisasi pengeluaran pembangunan terkecil adalah Kecamatan Bunobogu sebesar 10.829.000 rupiah. Total realisasi pengeluaran terbesar di Kabupaten Buol pada tahun 2006 adalah Kecamatan Biau, yaitu



sebesar 387.317.000 rupiah dan total realisasi pengeluaran terkecil adalah Kecamatan adalah Bunobogu yaitu sebesar 146.829.000.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam aspek perekonomian daerah, diantaranya: (1) Adanya upaya untuk fokus pada penanganan *Leading sector*; (2) harus selalu lebih besar penerimaan dibandingkan dengan rencana pengeluaran dan pengeluarannya ;(3) adanya upaya meningkatkan produktivitas masyarakat secara merata, seiring dengan peningkatan sumberdaya masyarakat untuk berusaha; (4) meningkatkan seluruh kualitas produksi yang dihasilkan; (5) memperluas pasar dari setiap produksi yang dihasilkan; (6) melakukan prioritas pengeluaran pembangunan; (7) menjalankan prinsip penghematan dalam setiap pengeluaran; (8) adanya upaya meningkatkan peran setiap kecamatan dalam kegiatan usaha yang menjadi andalan di wilayahnya; (9) memberikan kewenangan yang lebih luas ditingkat kecamatan dan desa untuk menjalankan berbagai kegiatan pembangunan; dan (10) adanya pengembalian hasil pajak yang diperoleh dari setiap kecamatan untuk pembangunan diwilayah kecamatan tersebut.

Perbankan

Peran perbankan cukup penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Di Kabupaten Buol pada tahun 2006 terdapat 3 bank, yaitu: (1) PT BNI 1946 (Persero) Tbk, sebanyak 1 kantor dengan status kantor cabang pembantu (KCP); (2) BPD Sulteng, sebanyak 1 kantor dengan status kantor cabang pembantu (KCP); dan (3) PT BRI (Persero), sebanyak 3 kantor status unit. Apabila perekonomian masyarakat di Kabupaten Buol makin membaik, yang ditandai dengan produktivitas yang makin tinggi, maka



sebagai penunjang roda perekonomian di Kabupaten Buol, peran jasa perbankan akan lebih besar lagi.

2.1.5. Sosial Budaya dan politik

2.1.5.1. Sosial Budaya

Pendidikan

Penduduk Kabupaten Buol tergolong dalam usia muda yang umumnya berada pada usia sekolah. Data sekolah, murid dan guru TK di Kabupaten Buol pada tahun 2006 dapat dilihat dari tabel 2.15.

Tabel 2.15.
Sekolah, Murid dan Guru
di Kabupaten Buol Tahun 2006

No	Sekolah	2005				2006			
		Jumlah sekolah	Murid	Guru	Rasio murid dan guru	Jumlah Sekolah	Murid	Guru	Rasio murid dan guru
1	TK	39	1.578	168	9	45	1.782	190	9
2	SD	158	18.417	1.332	14	164	20.781	1.611	13
3	Sekolah lanjutan Tingkat pertama(SLTP	22	4.071	263	15	30	5.843	370	16
4	Sekolah Menengah Umum (SMU)	7	3.102	91	34	7	1.917	125	15
5	Sekolah Menengah Kejuruan	4	911	98	12	5	1.203	98	12
	Jumlah	230	24.008	1.952		251	31.526	2.394	

Sumber : BPS Kab. Buol, Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Buol Time Series Tahun 2005- 2006 (Diolah Diolah Kembali)



Agar program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat berlangsung dengan baik, dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pada tahun 2006 jumlah taman kanak-kanak (TK) meningkat dari tahun 2005 yaitu dari 39 unit menjadi 45 unit. Jumlah sekolah Dasar (SD). Meningkat dari 158 unit pada tahun 2005 menjadi 164 unit pada tahun 2006. Jumlah SLTP pada tahun 2006 meningkat jumlahnya dari tahun sebelumnya yaitu dari 22 unit menjadi 30 unit. Jumlah SMU pada tahun 2006 ada 7 unit, jumlahnya tetap dari tahun sebelumnya. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun 2006 sebanyak 5 unit. Meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 4 unit. Kondisi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.16
Kondisi Tingkat Pendidikan Penduduk
Kabupaten Buol Tahun 2006

No	Kecamatan	Buta Huruf	tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat
1.	Biau	2.752		2.083	2.083	107	50
2.	Lipunoto	2.063			4.757	107	50
3	Momunu				7.474	1.554	107
4	Tiloan	459			2.703	1.318	43
5	Bokat	155	1.728	1.728	3.228	1.384	166
6	Bukal	195	2.615	2.615	1.416	580	24
7	Bunobogu	3.080			1.069	75	54
8	Gadung	4.978			2.231	135	67
9	Paleleh				9.057	1.878	56
	Jumlah	13.682	4343	34.018	12.138	7.138	617
	Urutan	2	5	1*)	3	4	6**)

Sumber : BPS Kab. Buol, Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Buol Tahun 2006



Pada tahun 2006, di Kabupaten Buol terdapat 13.682 jiwa penduduk buta huruf atau 12.11 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Buol tahun 2006 (kecamatan dalam angka, Kabupaten Buol 2006). Masih terdapatnya warga yang buta huruf pada hampir setiap kecamatan merupakan salah satu hambatan internal masyarakat untuk merai pengetahuan dan keterampilan yang harus melalui media baca. Karenanya harus dicarikan model pembelajaran yang tepat bagi masyarakat yang buta huruf, misalnya dengan peragaan, sambil dilakukan upaya pemberantasan buta huruf.

Jumlah penduduk Kabupaten Buol tahun 2006 sebanyak 112.960 jiwa dengan tingkat pendidikan sebagai berikut : (1) Tamat SD sebesar 30,11 persen ; (2) Buta huruf sebesar 12,11 persen; (3) Tamat SLTP sebesar 10,74 persen ; (4) Tamat SLTA sebesar 6,31 persen; (5) Tidak Tamat SD sebanyak 3,84 persen; dan (6) Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat sebesar 0,54 persen. Dari data yang ada hanya tercatat sekitar 63,64 persen, kondisi tingkat pendidikan penduduk disetiap kecamatan, karenanya masih perlu dilakukan pendataan yang lebih baik untuk melihat kondisi tingkat pendidikan. Sekitar 36,35 persen penduduk Kabupaten Buol Lainnya, dan pada posisi usia kelompok masyarakat yang dikaitkan dengan tingkat pendidikan, utamanya yang buta huruf (berada pada usia produktif atau non produktif).

Fasilitas pendidikan dari TK,SD, hingga SLTP dan Sederajat, tersebar merata keseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buol. Untuk fasilitas pendidikan SMU dan sederajat pada 6 kecamatan, yaitu; (1) Kecamatan Biau, (2) Kecamatan lipunoto, (3) Kecamatan Momunu,(4) Kecamatan Bokat, (5) Kecamatan Bunobogu, dan (6) Kecamatan Paleleh. Fasilitas SMK terdapat di 2 Kecamatan yaitu; (1) Kecamatan Lipunoto, dan (2) Kecamatan Bokat. Fasilitas Akademis/Perguruan Tinggi terdapat di Kecamatan Lipunoto. Selain itu, terdapat fasilitas pendidikan lainnya, seperti Pondok Pesantren/Madrasah Diniyah, yang terletak di Kecamatan Lipunoto,



Lembaga Pendidikan Ketrampilan Komputer di Lipunoto, dan Lembaga Pendidikan Menjahit/Tata Busana, juga terletak di Kecamatan Lipunoto.

Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pembangunan dibidang kesehatan sangat penting dilakukan, tujuannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Untuk memberikan pelayanan yang lebih merata, maka peran puskesmas dan puskesmas pembantu sangat dirasakan manfaatnya. Pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Buol terus dilakukan, hingga tahun 2006 terdapat 9 puskesmas dan 54 puskesmas pembantu.

Jika dilihat dari penyebarannya perkecamatan, seluruh kecamatan di Kabupaten Buol pada tahun 2006 telah mendapat minimal 1 puskesmas, dan paling sedikit 3 puskesmas pembantu (di Kecamatan Lipunoto), sedangkan di kecamatan lainnya jumlah puskesmas pembantu lebih banyak bahkan ada yang mencapai 9 buah yang terdapat di Kecamatan Paleleh.

Penambahan fasilitas kesehatan, juga diikuti dengan penambahan tenaga kesehatan. Hingga tahun 2006 telah ditempatkan diantaranya; 1 orang dokter spesialis, 15 orang dokter umum, 2 orang dokter gigi, 19 sarjana kesehatan, 3 sarjana non kesehatan, 2 orang apoteker; 5 orang akademi gizi, 1 orang akademi penilik kesehatan, 63 orang bidan, 9 orang perawat, dan 26 orang paramedis dan non paramedis.

Jumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki Kabupaten Buol menurut status kepemilikan adalah sebagai berikut: (1) 1 Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, yang terletak di Kecamatan Liponoto; (2) 1 Praktek dokter perorangan; (3) 9 Puskesmas; (4) 54 Puskesmas pembantu; (5) Gudang Farmasi; (6) 2 Apotik; dan (7) 3 Toko Obat Berizin.



Jumlah tenaga kesehatan dan Fasilitas yang ada belum memadai, jika dibandingkan dengan jumlah desa dan jumlah penduduk di Kabupaten Buol. Untuk Bidan, minimal di tiap desa memiliki tenaga bidan 1 orang, dan tiap kecamatan 1 Apotik.

Menurut jenis penyakit, kasus penyakit yang paling banyak terjadi di Kabupaten Buol pada periode tahun 2003 - 2006 adalah sebagai berikut; (1) Tahun 2003 dan 2004 kasus penyakit yang paling terjadi adalah malaria, sebanyak 4.822 kasus pada tahun 2003 dan 4.996 kasus pada tahun 2006; (2) tahun 2005 kasus penyakit yang paling banyak terjadi adalah pernapasan, sebanyak 8.898 kasus ; dan (3) Tahun 2006 kasus penyakit yang paling banyak terjadi adalah Bronchitis, sebanyak 14.805 kasus.

Pada tahun 2006, wabah penyakit yang terjadi pada seluruh kecamatan di Kabupaten Buol adalah malaria. Muntaber/diare terjadi di 8 kecamatan (31 desa), kecuali Kecamatan Tiloan; Infeksi saluran pernapasan terjadi di 8 kecamatan (32 desa) kecuali Kecamatan Biau; campak terjadi di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Momunu (1 desa), Kecamatan Bokat (1 desa), Kecamatan Bukal (1 desa), Kecamatan Bunobogu (4 desa) dan Kecamatan Gadung (1 desa); demam berdarah terjadi di 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Lipunoto (2 desa) Kecamatan Momunu (2 desa) Kecamatan Bokat (1 desa) dan Kecamatan Bunobogu (1 desa)

Untuk dapat membangun diri dari lingkungan, diperlukan kesehatan Fisik dan mental, karen itu selain peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, diperlukan juga upaya memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kesehatan. Pendidikan kesehatan diharapkan akan menjadi ujung tombak meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Buol. Apabila mengetahui cara menjaga kesehatan, maka masyarakat dapat lebih mampu



menjaga kondisi fisik dan mentalnya, sehingga lebih jernih berfikir dan produktif dalam bekerja. Masalah pola hidup sehat seperti pentingnya Gizi, istirahat yang cukup, kebersihan, olahraga, dan cara-cara penghindaran dari berbagai macam penyakit perlu disampaikan pada masyarakat.

Untuk mengatur kelahiran, di setiap kecamatan di Kabupaten Buol telah dibentuk klinik Keluarga Berencana (KB). Jumlah klinik KB yang dibangun diseluruh kecamatan merata, yaitu antara 5 sampai 6 di setiap kecamatan. Namun demikian, keberadaan klinik ini belum dapat diukur dengan baik perannya pada peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Buol. Sejak berdirinya Kabupaten Buol yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2006 tercatat penduduk di Kabupaten Buol meningkat sebesar 17,41 persen. Cara kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik, diikuti Pil, sedangkan yang paling sedikit adalah pengguna IUD. Pencapaian Akseptor meningkat, dari 2.305 pada tahun 2004 menjadi 3.357 pada tahun 2006.

Pengendalian jumlah penduduk tidak dapat dipisahkan dari peran KB, dan keberhasilan pencapaian akseptor baru tidak terlepas dari keberadaan petugas KB di lapangan, juga kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB. Karenanya, perlu dilakukan pola-pola pendekatan yang tepat pada masyarakat sehubungan dengan pemberian informasi maupun penyuluhan program KB.

Peradilan

Salah satu indikator keamanan adalah tingkat kriminalitas yang terjadi di Wilayah tersebut. Pada tahun 2006 di Kabupaten Buol terjadi 78 kasus kejahatan, meningkat dari tahun 2005 sebanyak 29 kasus dan tahun 2004 sebanyak 16 kasus. Jenis kejahatan yang paling banyak terjadi pada



kelompok kejahatan terhadap badan, yaitu penganiayaan ringan (29 kasus) disusul kejahatan terhadap benda dalam bentuk pencurian dengan kekerasan (19 Kasus).

Selain orang dewasa, juga terdapat anak-anak yang tersangkut perkara. Pada tahun 2006 terdapat 3 orang anak yang tersangkut perkara diserahkan kepada Jaksa dan dituntut di muka Hakim. Jumlah anak-anak yang tersangkut perkara pada tahun 2006 sama dengan tahun 2005, dan menurun dibandingkan tahun 2004 (5 orang anak).

Menurut data potensi desa Kabupaten Buol tahun 2005, wilayah ini bebas dari tindak kejahatan perampokan, penjarahan, pembakaran, narkoba. Kondisi ini merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan, dan perlu terus dipelihara, sehingga wilayah Kabupaten Buol dapat selalu kondusif untuk kegiatan pembangunan yang fokus pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain kasus-kasus yang telah disebutkan di atas, terdapat kasus yang diselesaikan di pengadilan Agama di Kabupaten Buol. Pada tahun 2006 terdapat 59 perkara yang diputuskan di pengadilan Agama Kabupaten Buol. Jenis perkara yang paling banyak adalah penetapan talak perceraian, sejumlah 38 perkara (64.4 persen dari total perkara yang diputuskan di pengadilan Agama Kabupaten Buol). Penetapan talak perceraian meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2005 terdapat 34 perkara, sedangkan tahun 2004 sebanyak 18 perkara. Jenis perkara lainnya yang diputuskan pengadilan Agama Kabupaten Buol pada periode 2004 -2006 adalah : dispensasi kawin, Izin poligami, pembatalan Nikah, Persetujuan Ikrar talak, penggantian Wali, Pengangkatan Anak dan Ahli waris. Kasus perkawinan merupakan kasus yang paling banyak diproses di pengadilan Agama Kabupaten buol. Pada tahun 2006 tercatat 57 kasus perkawinan (96.61



persen) dari jenis perkara yang diselesaikan di pengadilan Agama Kabupaten Buol.

Agama

Pada tahun 2005 dan tahun 2006, sebesar 96.27 persen penduduk Kabupaten Buol memeluk Agama Islam, 2.15 persen memeluk Agama Kristen, 0.85 persen memeluk Agama Katolik, 0.49 persen memeluk Agama Hindu dan 0.24 persen memeluk Agama Budha.

Kerukunan hidup beragam terjaga dengan baik, hal ini terlihat dari tumbuhnya fasilitas peribadatan dari semua pemeluk Agama dan bertambahnya Rohaniawan. Jumlah tempat Ibadah bagi pemeluk Agama Islam pada tahun 2006 adalah: 153 Masjid, 43 Mushallah, dan Langgar. Jumlah Gereja bagi pemeluk agama Kristen sebanyak 26 buah. Jumlah Gereja bagi pemeluk agama Kristen Khatolik sebanyak 2 buah. Jumlah Pura 9 (tempat pemeluk Agama Hindu). Dan Jumlah Wihara 2 (tempat ibadah Pemeluk Agama Bhuda).

Jumlah jama'ah haji di Kabupaten Buol yang diberangkatkan tahun 2006 sejumlah 20 orang, menurun dari tahun 2005 sebanyak 27 orang, dan tahun 2004 sebanyak 33 orang. jema'ah haji yang berangkat pada tahun 2006 berasal dari 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Lipunoto (12 orang), Kecamatan Momunu (1 orang), Kecamatan Bokat (3 orang) Kecamatan Bukal (3 orang) dan Kecamatan Bunobogu (1 orang). Kondisi menurunnya Jumlah Jema'ah haji dari tahun ke tahun memperlihatkan kesiapan masyarakat untuk menunaikan Ibadah haji menurun. Kondisi ini perlu ditelusuri lebih lanjut dan kemungkinan besar terkait dengan kemampuan Finansial masyarakat.



Sosial Lainnya

Untuk mewujudkan rasa kepedulian sosial pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Buol kepada penduduk yang kurang mampu dan para penyandang cacat, telah dilakukan berbagai upaya melalui Dinas Sosial maupun oleh masyarakat umum melalui yayasan-yayasan dan Panti Asuhan. Pada tahun 2006 terdapat 10 orang anak terlantar yang dibina melalui Panti Sosial Bina Ramaja (PBSR). Jenis ketrampilan yang diajarkan diantaranya kecantikan dan menjahit. Pendidikan ketrampilan yang diberikan dapat disebut sukses apabila anak didik mampu menerapkan, bahkan mengembangkan ketrampilan yang diberikan, dan mampu mandiri dengan bekal ketrampilan tersebut. Karenanya, perlu dilakukan evaluasi terhadap anak-anak terlantar yang telah dibekali ketrampilan oleh Panti Sosial.

Dari 5 panti asuhan yang ada di Kabupaten Buol, pada tahun 2006 tercatat 155 jumlah anak asuh pada 4 panti asuhan terdiri dari 96 orang anak laki-laki dan 59 orang anak perempuan. Selain di panti, pelayanan penyantunan anak terlantar dilakukan juga secara non panti, pada tahun 2006 sebanyak 80 orang yang disantun secara Non Panti. Penyantunan penderita cacat dilakukan secara non panti dengan cara pelayanan rehabilitasi sosial. Jenis penderita cacat yang mendapat layanan pada tahun 2006 adalah: Tuna Netra (2 orang), Tuna Rungu/Tuna Wicara (4 orang), Cacat Tubuh (26 orang), Cacat Mental(2 orang) dan Eks Penyakit Kronis (50 orang) total 84 orang. Terkait dengan kegiatan rehabilitasi sosial perlu dilakukan evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi sosial, dengan mengukur manfaat-manfaat yang diperoleh para penderita cacat yang direhabilitasi.



Jumlah pekerja sosial masyarakat di Kabupaten Buol pada tahun 2006 sebanyak 689 orang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 199 orang pada tahun 2005 dan 93 orang pada tahun 2004. Peningkatan jumlah pekerja sosial diharapkan dapat membawa dampak keberhasilan dalam menangani masalah-masalah sosial seperti bekas narapidana, anak nakal, dan lain-lainnya. Untuk itu perlu dikaji pengaruh peningkatan jumlah pekerja sosial terhadap penyelesaian masalah-masalah sosial di Kabupaten Buol dari waktu-kewaktu.

Jumlah Tuna Sosial yang mendapat bimbingan melalui Lokal Bina Karya (LBK) di Kabupaten Buol pada tahun 2006 adalah: 20 orang bekas narapidana dan 10 orang anak nakal. Sedangkan total jumlah organisasi Sosial di Kabupaten Buol pada tahun 2006 sebesar 143 organisasi, mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2005 terdapat 79 organisasi sosial, sedangkan tahun 2004 hanya 5 organisasi sosial.

Adanya keluarga fakir miskin di Kabupaten Buol mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan/bantuan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2006 pemerintah daerah memberikan bantuan disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Buol. Bantuan kesejahteraan sosial diberikan pada 1.035 KK disembarang kecamatan, dengan rincian sebagai berikut: (1) Kecamatan Biau 299 KK; (2) Kecamatan Lipunoto 94 KK; (3) Kecamatan Momunu 126 KK; (4) Kecamatan Tiloan 176 KK; (5) Kecamatan Bokat 74 KK; (6) Kecamatan Bukal 14 KK; (7) Kecamatan Bunobogu 224 KK; (8) Kecamatan Gadung 14 KK; dan (9) Kecamatan Paleleh 14 KK.

Di Kabupaten Buol pada tahun 2006 terdapat 26.384 KK, dengan rata-rata penduduk perdesa sebanyak 1.107 jiwa. Pada tahun 2006 telah diberikan bantuan Keluarga Fakir Miskin kepada 3.92 persen dari KK yang ada di Kabupaten Buol (1.035 KK), namun tepat sarannya bantuan yang telah



diberikan belum dapat diukur dengan baik, demikian juga dengan kesesuaian jenis bantuan yang diberikan dengan kebutuhan keluarga fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Untuk dapat mengukur tepat sasaran nya bantuan yang diberikan pada fakir miskin, kriteria kondisi perekonomian lapisan masyarakat di Kabupaten Buol perlu ditetapkan, studi kebutuhan hidup dan kebutuhan usaha masyarakat juga perlu dilakukan, sehingga yang diberikan pemerintah atau bantuan masyarakat dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan fakir miskin. Bantuan yang diberikan sebaiknya tidak saja yang terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari, namun jenis bantuan yang dapat memotivasi masyarakat miskin untuk bangkit, berusaha, serta mampu mandiri menghidupi dirinya dan keluarga. Bantuan yang diberikan adalah; yang dapat mengubah pola pikir, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan dan usahanya, agar makin optimis dan produktif. Misalnya bantuan pengetahuan, informasi pasar untuk produk-produk yang dihasilkan, informasi kewirausahaan, cara memperoleh dan mempergunakan modal usaha dengan tepat, cara-cara berusaha yang modern dibidang yang ditekuni, dan lain-lain.

Kesuksesan pembangunan sosial paling tidak akan ditandai dengan: (1) Kerukunan hidup antar dan antara umat beragama; (2) kehidupan masyarakat yang Harmonis; (3) Angka kriminalitas yang rendah; (4) Ditegakkannya Hukum secara adil; (5) Rendahnya Jumlah Tuna Sosial; (6) Adanya santunan yang baik pada para penderita cacat seumur hidup dan orang tua; (7) Produktivitas setiap anggota masyarakat yang hasilnya dapat mencukupi atau melebihi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya; dan (8) Kemampuan menabung. Dari fakto-faktor tersebut di atas, selanjutnya dapat dilakukan pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat.



Kehidupan yang sejahtera, dalam lingkungan yang aman merupakan tujuan yang paling mendasar setiap orang yang seharusnya dapat dicapai melalui pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Buol harus dapat bekerja bersama-sama melalui kegiatan pembangunan untuk dapat mewujudkan kondisi tersebut.

2.1.5.2. Politik

Dari 109.453 jiwa penduduk Kabupaten Buol tahun 2004, jumlah pemilih pada pemilihan umum tahun 2004 sebanyak 64.678 orang (59.09 persen) dan yang melaksanakan hak pilihnya sebanyak 64.650 orang, atau sebesar 99.96 persen dari jumlah pemilih.

Pada pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004, berdasarkan banyaknya desa di Kabupaten Buol, partai politik yang mendapatkan suara terbanyak adalah Partai Golkar, yang memenangkan suara pada 9 kecamatan di Kabupaten Buol (9 kecamatan dengan 75 desa) disusul oleh PAN (4 dari 3 desa); PKB di satu desa, di Kecamatan Lipunoto.

Berdasarkan Rekapitulasi perolehan suara, sebagai partai pemenang pemilu, Partai Golkar mendapatkan 14.544 suara, disusul oleh partai persatuan pembangunan (PPP) Tabel 2.17. menjelaskan rekapitulasi perolehan suara pada pemilu tahun 2004 di Kabupaten Buol, menurut organisasi peserta pemilu.

Tabel 2.17
Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilu tahun 2004



di Kabupaten Buol, Menurut Organisasi peserta Pemilu

No	Partai	Jumlah Pemilih	Urutan
1	PNI Marhaenisme	268	18
2	Partai Buruh Sosial Demokrat		
3	Partai Bulan Bintang	3.495	5
4	Partai Merdeka	933	14
5	Partai Persatuan Pembangunan	8.085	2
6	P.PDK	4.041	4
7	P.Perhimpunan Indonesia baru	1.835	11
8	PNBK		
9	Partai Demokrat	660	16
10	PKPI	4.691	3
11	PPDI		
12	P.PNUI	873	15
13	PAN	3.486	6
14	PKPB	562	17
15	PKB	2.936	8
16	PKS	2.036	10
17	PBR	2.420	9
18	PDI Perjuangan	3.401	7
19	PDS		
20	Partai Golkar	14.544	1
21	Partai Patriot Pancasila	1.232	12
22	Partai sarikat Indonesia	1.008	13
23	Partai persatuan Daerah	130	19
24	Partai Pelopor		

Sumber: BPS Kab. Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2006 (Data Diolah Kembali)

Partai Golkar memenangkan pemilu di Kabupaten Buol dengan jumlah suara pemilih sebanyak 14.544 suara, atau sebesar 25.67 persen pemilih di kabupaten Buol dihitung berdasarkan suara yang sah. Lima besar



partai pemenag pemilih di Kabupaten Buol adalah; Partai Golkar, Partai Persatuan Pmbangunan, PKPI, P.PDK dan PBB.

Berdasarkan hasil pemilu 2004, maka komposisi DPRD di Kabupaten Buol pada tahun 2006 adalah SBB (1) Anggota DPRD 25 orang, terdiri dari Fraksi Golkar 14 orang, fraksi gabungan 6 orang, dan fraksi PPP 5 orang,(2) Komisi 19 orang, terdiri dari : pemerintahan dan keamanan 6 orang, ekonomi produksi dan keuangan 7 orang pembangunan 6 orang. Dan (3) kepanitiaan, terdiri dari: panitia anggaran 14 orang, panitia musyawarah 16 orang, dan panitia khusus 9 orang.

Hasil kerja DPRD sejak tahu 2004-2006 terdiri dari(1) keputusan DPRD, sebanyak 54 keputusan; dan (2) Keputusan Pimpinan Dewan, sebanyak 28. Hingga tahun 2006, tidak tercatat adanya peraturan daerah yang telah disetujui DPRD.

Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Buol memerlukan kehadiran beberapa peraturan daerah yang dapat di gunakan sebagai tolak ukur pembangunan di Kabupaten Buol, misalnya: peraturan daerah tentang rencana-rencana pembangunan, kebijakan pajak, investasi dan keuangan daerah, kerja sama antar daerah dan lain-lainnya.

2.1.6. Prasarana dan Sarana Perhubungan

Jalan Dan Angkutan Darat

Pada tahun 2006, Kabupaten Buol memiliki ruas jalan sepanjang 1017.4 Km yang terbagi atas 194 Km jalan negara. Jalan sepanjang 43 Km jalan provinsi serta 780.40 KM jalan kabupaten. Dari 1017.4 Km, panjang jalan yang ada, sepanjang 333.8 Km mengalami rusak berat dan 134. 4 Km. rusak, sisanya dalam kondisi baik dan sedang. Jenis permukaan jalan terdiri dari; aspal 294,8 Km, kerikil 433,8 Km, tanah 288 Km.



Jumlah kendaraan yang telah diuji di Dinas Perhubungan Kabupaten Buol selama tahun 2006 sebanyak 542 unit, terdiri dari; mobil barang bukan umum 186 unit, bus umum 22 unit, mobil barang umum 175 unit, mobil penumpang umum 107 unit, 2 unit bus bukan umum, dan 50 kereta gandeng/kereta tempel bukan umum/mobil tangki. Jumlah kendaraan wajib meningkat dari dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 banyaknya kendaraan wajib uji 341 unit dan telah diuji sebanyak 303 unit, sedangkan pada tahun 2004 sebanyak 224 unit wajib uji dan telah diuji sebanyak 147 unit.

Jalan yang rusak perlu mendapat prioritas untuk dibetulkan, terutama jalan masuk ke Kabupaten Buol. Pencapaian jalur darat yang baik kesuatu wilayah merupakan salah satu syarat terselenggaranya lalu lintas antar wilayah yang lancar. Jika lalu lintas lancar, maka arus manusia dan barang akan lebih baik dari dan kewilayah Kabupaten Buol. Selain memperbaiki jalan yang rusak, perlu dilakukan penanganan transportasi umum daerah secara terpadu.

Angkutan Udara dan Laut

Transportasi udara dari dan ke Kabupaten Buol dilakukan melalui Pelabuhan Udara Pogogul Buol. Jumlah arus lalu lintas pesawat dari dan ke Kabupaten Buol tergolong paling sedikit dibandingkan arus lalu lintas di 4 pelabuhan udara lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah (Babung di Luwuk, Kasiguncu di Poso, Lalos di Tolitoli, dan Mutiara di Palu). Data tahun 2004-2006 menunjukkan, pesawat yang datang di Pelabuhan Udara Pogogul hanya sebanyak 47 kali (datang dan berangkat). Frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat terbesar adalah di Pelabuhan Mutiara Palu (2.325 datang, dan 2.324 berangkat); disusul oleh Pelabuhan Udara Babung, Luwuk (748 datang, dan 697 berangkat); Pelabuhan Udara



Kasiguncu, Poso (320 datang, dan 320 berangkat); dan Pelabuhan Lalos, Tolitoli (144 datang dan 148 Berangkat).

Angkutan laut memegang peran yang cukup penting, optimalisasi peran pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Buol perlu dilakukan, sehingga arus manusia dan barang dari dan ke Kabupaten Buol lebih lancar. Pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Buol adalah Pelabuhan Paleleh di Kecamatan Paleleh, Pelabuhan Kumaligon yang berada di Kecamatan Lipunoto, Pelabuhan Lokodidi, dan Pelabuhan Leok. Percepatan pengembangan Pelabuhan Kumaligon menjadi Pelabuhan Feri dan Pelabuhan Lokodidi menjadi pelabuhan samudera bertaraf internasional akan mempercepat terbuka dan berkembangnya wilayah di Kabupaten Buol.

Listrik

Listrik sangat memegang peran yang penting untuk kebutuhan hidup dan produktivitas masyarakat. Produksi listrik untuk Kabupaten Buol pada tahun 2006 sebesar 7.296.930 KWh. Setingkat lebih tinggi dari produksi listrik di Kabupaten Banggai Kepulauan. Produksi listrik di Kabupaten Buol berada pada urutan kesembilan dari produksi listrik di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dari keseluruhan tenaga listrik yang diproduksi. Berhasil terjual sebanyak 6.278.253 Kwh, meningkat 87.04 persen dari tahun sebelumnya.

Pembangkit tenaga listrik yang digunakan adalah diesel, dengan jumlah pemakaian bahan bakar pada tahun 2006 sebanyak 2.046.704 liter, dan minyak pelumas sebanyak 11.272 liter. Gardu listrik yang dimiliki Kabupaten Buol sebanyak 94 unit. Total jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Buol pada tahun 2006 adalah 9.455, dengan rincian sebagai berikut; 8.980 rumah tangga, 1 industri, 56 instansi, dan lainnya 418, yang tersebar di 41 desa/kelurahan, (Kabupaten Buol dalam angka 2006).



Pengembangan wilayah Kabupaten Buol memerlukan ketersediaan listrik yang memadai, terutama untuk menunjang kegiatan industri dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan studi secara khusus tentang kebutuhan listrik di Kabupaten Buol, dikaitkan dengan kegiatan peningkatan produktivitas masyarakat, dan alternatif pengembangan sumber daya alam yang ada menjadi sumber pembangkit tenaga listrik.

Air minum

Sumber air yang dipakai oleh PDAM Kabupaten Buol berasal dari mata air dengan kapasitas produksi pada tahun 2006 sebesar 752.100 M³-, dikonsumsi oleh 2.013 pelanggan, dan terjual sebanyak 477.679 M³, dengan nilai terjual sebesar 495.671.212 rupiah.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah produksi air minum pada tahun 2006 sama dengan tahun 2005 yaitu 752.100 M³ namun meningkat sebanyak 88.31 persen, jika dibandingkan dengan produksi tahun 2004 sebanyak 399.389 M³.

Sama halnya dengan kebutuhan listrik, pengembangan wilayah Kabupaten Buol juga memerlukan dukungan ketersediaan air bersih yang memadai. Air bersih diperlukan untuk menunjang berbagai kebutuhan hidup, kegiatan industri, perhotelan, pariwisata, dan lain-lainnya. Karena itu, perlu dilakukan juga studi khusus tentang kebutuhan air bersih dan pola distribusi air bersih di Kabupaten Buol, dikaitkan dengan kegiatan pengembangan wilayah yang akan dilakukan.

Komunikasi

Jenis sarana komunikasi yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Buol yaitu ; telepon, wartel, kantor pos, dan pos keliling. Pada tahun 2006, jumlah



pelanggan telepon di Kabupaten Buol sebanyak 393 pelanggan, dengan jumlah pulsa lokal sebanyak 208.807, dan SLJJ 4.267.272. jumlah pelanggan telepon di Kabupaten Buol adalah yang paling sedikit dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sulawesi Tengah. Jumlah pelanggan telepon terbanyak ada di Kabupaten Poso, yaitu sebanyak 38.732 pelanggan, disusul oleh Kota Palu dengan 20.612 pelanggan.

Pada tahun 2006, kantor pos di Kabupaten Buol hanya satu buah, yaitu di Kecamatan Lipunoto, pos keliling dua unit di Kecamatan Bunobogu, wartel 27 Buah yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Buol, kecuali kecamatan Bunobogu dan Gadung.

Dukungan sarana dan prasarana komunikasi sangat penting untuk memajukan wilayah Kabupaten Buol. Melihat kondisi masyarakat yang tersebar di Sembilan kecamatan, dengan tingkat kepadatan yang rendah pada wilayah yang cukup luas, maka prasarana dan sarana komunikasi merupakan salah satu syarat penting untuk membantu mempersingkat jarak antar penduduk, juga penduduk dengan pemerintah dan dunia luar. Kerena itu pembangunan prasarana komunikasi merupakan salah satu bidang prioritas yang berfungsi mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Buol, baik untuk kegiatan pemerintahan dan usaha masyarakat.

Hotel, Restoran dan Pariwisata

Hotel dan Restoran

Untuk memberikan pelayanan terhadap para tamu yang datang di Kabupaten Buol, baik tamu-tamu pemerintah, para pedagang, pengusaha maupun wisatawan diperlukan tersedianya sarana akomodasi yang memadai. Pada tahun 2006, jumlah hotel yang dimiliki Kabupaten Buol sebanyak 8 unit (hotel non bintang), dengan 78 kamar, 150 tempat tidur,



serta memperkerjakan 50 tenaga kerja, dengan rata-rata jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan di tiap hotel sebanyak 6 orang. Jumlah hotel, kamar, tempat tidur, dan tenaga kerja di Kabupaten Buol tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2004.

Restoran/rumah makan merupakan salah satu fasilitas penting yang dibutuhkan suatu daerah. Jumlah restoran yang dimiliki Kabupaten Buol pada tahun 2005 adalah sebanyak 40 unit, terletak di Kecamatan Biau, Kecamatan Lipunoto, dan Kecamatan Gadung.

Tidak bertambahnya jumlah hotel, kamar dan tempat tidur mengindikasikan tidak bertambahnya jumlah tamu, atau jumlah tamu tetap. Tidak meningkatnya jumlah tamu di suatu wilayah membuktikan bahwa wilayah tersebut belum memiliki daya tarik yang kuat untuk dikunjungi. Karenanya, pemerintah daerah perlu menetapkan, dan mendorong masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif dan menjadi unggulan Kabupaten Buol, sehingga akan memberikan nilai tambah pada wilayah ini.

Walaupun hotel dan restoran belum terlihat penting perannya di Kabupaten Buol, namun hotel dan restoran yang ada perlu ditingkatkan mutu layanannya, sehingga selalu dapat memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Jika Kabupaten Buol berhasil berkembang menjadi salah satu tempat tujuan yang diperhitungkan, maka hotel dan restoran yang ada telah siap melayani para tamu dengan baik dan memuaskan, dan juga siap bersaing dengan hotel dan restoran lainnya yang muncul kemudian karena melihat peluang untuk berusaha di bidang perhotelan dan restoran di Kabupaten Buol.



Pariwisata.

Keadaan alam Kabupaten Buol cukup menarik, selain sebagian daerahnya berbatasan dengan pantai, Kabupaten Buol juga terdiri dari daratan, pegunungan yang luas, dan dialiri banyak sungai yang tersebar di sembilan kecamatan. Kondisi alam seperti ini memiliki kekayaan alam yang menarik dan mempesona. Karena itu, di beberapa tempat di Kabupaten Buol ditemui objek wisata yang saat ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Objek wisata di Kabupaten Buol diklasifikasikan atas ; (1) objek wisata alam; (2) objek wisata tirta/bahari; dan (3) objek wisata budaya. Objek wisata alam, misalnya : Batu Susun di Kecamatan Biau: Pemandian Kumaligon: Pemandian Tirta Ria: dan Gua Kumaligon di Kecamatan Lipunoto: Pemandian Air Panas di Kecamatan Momunu: Pemandian/Bendungan di Kecamatan Tiloan: Air Terjun Lonu, Batu Tiga di Kecamatan Bunobogu: Air Terjun Bodi di Kecamatan Paleleh. Objek wisata tirta/bahari, misalnya : Pulau Busak di Kecamatan Biau, dan Pulau Raja, Pulau Boki, Pulau Panjang dan Pulau Lesman di Kecamatan Paleleh. Objek wisata budaya, misalnya : di Kecamatan Biau (Rabana, Kulrindang, Gambus/Jepeng, dan Kuburan Kramat); Kecamatan Lipunoto (Kumalik/Istana, Tog Kulrindang, Rabana dan Gambus/Barumba): Kecamatan Momunu (Rabana, Kulrindang, Gambus/Jepeng, Musik Bambu dan Tari Pogogul): Kecamatan Tiloan (Rabana, Tari Pogogul, Kulrindang): Kecamatan Bokat (Rabana, Tarai Pogogul, Kulrindang, Tari Haruas, Musik Bambu, dan Gambus/Jepeng): Kecamatan Bukal (Rabana, Tari Pogogul/Tari Haruas, Gambus/Jepeng dan Kuba): Kecamatan Bunobogu (Musik Bambu, Tog Kulrindang, Kubur Hulubalang, Gambus/Barumba, dan Rabana): Kecamatan Gadung (Rabana, Tag Kulrindang, Musik Bambu, dan



Gambus/Jepeng/Balumba) dan Kecamatan Paleleh (Rabana, Tag Kulrindang, Musik Bambu dan Gambus/Jepeng/Barumba).

Manajemen pariwisata perlu dimiliki Kabupaten Buol, sehingga objek-objek wisata dapat dikoordinasi untuk kemudian dipromosikan dengan baik. Kemudian para wisatawan domestik dan manca negara mendapatkan informasi dan layanan ke tempat tujuan, merupakan salah satu daya tarik untuk mendatangi tempat wisata tersebut. Selain itu, pelayanan di lokasi wisata tersebut perlu ditata agar berkualitas, sehingga pengunjung merasa senang berada di sana. Fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan pariwisata seperti hotel, restoran, ketersediaan souvenir-souvenir khas Kabupaten Buol, harus tersedia dan dapat dikelola dengan baik, agar menjadi nilai tambah dari kegiatan pariwisata di Kabupaten Buol.

2.1.7. Pemerintahan

Kabupaten Buol adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, dan Banggai Kepulauan. Sebelumnya, pada pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), Buol merupakan daerah Swapraja yang tergabung dengan Daerah Gorontalo. Selanjutnya melalui Undang-Undang R.I Nomor 29 Tahun 1959 gabungan Swapraja Tolitoli dan Swapraja Buol menjadi Kabupaten Buol Tolitoli.

Sejak tanggal 16 Februari 1966 melalui keputusan DPR-GR Provinsi Sulawesi Tengah, Buol diusulkan menjadi Daerah Tingkat II/Kabupaten, dan baru terealisasi pada tahun 1999 atau 33 tahun kemudian dengan diresmikannya pembentukan Kabupaten Buol pada tanggal 12 Oktober 1999.



Secara administratif, Kabupaten Buol pada tahun 2006 terdiri dari 9 kecamatan dan 101 desa/kelurahan (94 desa dan 7 kelurahan), seluruhnya telah berstatus definitif dan 7 diantaranya termasuk klasifikasi desa swasembada, dan 94 desa swakarya.

Sembilan kecamatan di Kabupaten Buol adalah : (1) Kecamatan Biau, ibu kota kecamatan di Lakea II, terdiri dari 12 desa; (2) Kecamatan Lipunoto, ibu kota kecamatan di Kali, terdiri dari 7 kelurahan; (3) Kecamatan Momunu, ibu kota kecamatan di Lamadong, terdiri dari 14 desa; (4) Kecamatan Tiloan, ibu kota kecamatan di Air Terang, terdiri dari 8 desa; (5) kecamatan Bokat, ibu kota kecamatan di Bokat, terdiri dari 14 desa; (6) Kecamatan Bukal, ibu kota kecamatan di Unone, terdiri dari 12 desa; (7) Kecamatan Bunobogu, ibu kota kecamatan di Bunonogu, terdiri dari 8 desa; (8) Kecamatan Gadung, ibu kota kecamatan Bulagidun, terdiri dari 9 desa; (9) Kecamatan Paleleh, ibu kota kecamatan di Paleleh, terdiri dari 17 desa.

Berdasarkan data Potensi Desa Kabupaten Buol 2005, telah terdapat 95 Badan Perwakilan Desa, dan 1 Dewan Kelurahan. Kegiatan-kegiatan Badan Perwakilan Desa dan Dewan Kelurahan diharapkan dapat membantu tersalurkannya aspirasi masyarakat desa/kelurahan. Karena itu, anggota Badan Perwakilan Desa dan Dewan Kelurahan harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat di wilayahnya, dan kemampuan memahami kondisi dan kebutuhan wilayahnya untuk menggapai kemajuan.

Menurut tingkat perkembangannya, pada tahun 2006 seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Buol telah memiliki LKMD pada posisi tingkat perkembangan tumbuh. Jumlah LKMD sebanyak 101 sesuai dengan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Buol.

Melihat sepiunya informasi pembangunan Kabupaten Buol, maka perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif tentang kegiatan pemerintahan daerah,



agar program-program pembangunan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan ikut berperan dalam kegiatan pembangunan. Selanjutnya apabila seluruh kegiatan pembangunan diketahui secara luas oleh masyarakat, maka evaluasi keberhasilan setiap program dan kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara terbuka, dengan demikian dapat dipastikan tingkat keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang telah dijalankan.

Keberhasilan pemerintahan suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari peran aparatur di wilayah tersebut. Karenanya, kompetensi aparatur merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam roda pemerintahan. Untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik di Kabupaten Buol, maka perlu dilakukan studi tentang kecakapan, dan tingkat kemampuan aparatur dalam menjalankan tugasnya, dilanjutkan dengan studi tentang pengaruh pendidikan dan kompetensi terhadap pelaksanaan tugas-tugas aparatur. Hasil studi ini diperlukan untuk melihat jenis kompetensi yang belum dimiliki oleh aparatur, dan upaya-upaya dalam memberikan kompetensi tersebut.

2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

Prediksi kondisi umum daerah di Kabupaten Buol adalah gambaran kecenderungan keadaan yang akan terjadi di Kabupaten Buol apabila tidak dilakukan perencanaan. Kondisi umum daerah diperoleh dari hasil analisis mendalam terhadap Kabupaten Buol, seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Keadaan Geografis

Kabupaten Buol merupakan wilayah yang terjauh lokasi pencapaiannya dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Permasalahan yang



dihadapi karena lokasi wilayah yang cukup jauh dari Ibu Kota Provinsi adalah pencapaian dari Kabupaten Buol ke Ibu Kota Provinsi di Palu. Sampai saat ini, Palu masih merupakan pintu gerbang utama untuk masuk dan keluar Provinsi Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Buol, transportasi umum melalui darat, laut, maupun udara tidak setiap saat tersedia. Selain itu, Kabupaten Buol belum memiliki 'pintu' lainnya untuk masuk dan keluar dari dan ke wilayahnya. Jika kondisi sulitnya pencapaian dari dan ke Kabupaten Buol tidak diatasi segera, maka masyarakat Kabupaten Buol akan tertinggal, karena Kabupaten Buol tidak memiliki daya tarik kemudahan pencapaian bagi tamu dari daerah lain, baik investor, pedagang, pengusaha, maupun wisatawan. Masyarakat Kabupaten Buol juga akan cenderung malas meninggalkan wilayahnya untuk mengunjungi tempat lain, untuk kegiatan dagang ataupun memperluas wawasan.

Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Buol terletak dipinggir pantai. Namun perairan laut belum dioptimalkan sebagai akses transportasi laut dari dan ke wilayah Kabupaten Buol. Karena itu untuk membuka wilayah Kabupaten Buol, pembangunan pelabuhan feri perlu segera dilakukan, begitu juga dengan peningkatan kemampuan yang ada saat ini, baik Pelabuhan Paleleh, Pelabuhan Kumaligon, Pelabuhan Lokodidi, dan pelabuhan Leok.

Di Kabupaten Buol terdapat sungai-sungai yang besar yang tersebar hampir di tiap kecamatan, diantaranya berpotensi untuk dijadikan sumber irigasi. Saat ini perhatian pada manajemen pengairan belum dilakukan dengan baik, sehingga walaupun suatu wilayah subur, tidak dapat dipastikan selalu mampu menghasilkan produksi pertanian dalam jumlah yang pasti dan dengan kualitas yang baik. Produksi pertanian yang dihasilkan di Kabupaten Buol belum cukup kompetitif secara ekonomi, walaupun untuk lingkup wilayah Kabupaten Buol sendiri.



Walaupun sebagian besar kecamatan di Kabupaten Buol terletak dipinggir pantai dan secara ekonomis perairan laut Kabupaten Buol berpotensi untuk dikembangkan dan menjadi salah satu andalan pendapatan masyarakat, kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kelautan belum berkembang baik. Akibatnya, nilai produksi perikanan dan kelautan Kabupaten Buol tidak cukup kompetitif, walaupun untuk skala lokal di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pola penggunaan lahan oleh masyarakat di Kabupaten Buol perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol, agar terjadi ketertiban dalam penggunaan lahan. Kantong-kantong produksi harus disesuaikan dengan alokasi atau zona tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, jika tidak wilayah akan berkembang semrawut dengan pola pergerakan yang tidak teratur.

Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buol memiliki potensi bahan tambang/galian. Namun demikian, potensi bahan tambang belum dioptimalkan untuk mendukung perekonomian masyarakat. Kadar dan kandungan bahan tambang dan potensi nilai ekonominya masih perlu diteliti, agar tidak terjadi kesalahan dalam eksplorasi dan pengolahan bahan tambang, juga dapat diketahui nilai ekonomis yang akan didapat. Cara pengelolaan bahan tambang yang baik dan ramah lingkungan juga perlu diajarkan pada masyarakat, agar lingkungan hidup dapat terpelihara dengan baik.

Pengelolaan tambang di suatu wilayah di Indonesia memiliki kecenderungan dikelola oleh perusahaan swasta dari luar daerah tersebut. Untuk itu, kesempatan pertama mengelola bahan tambang di Kabupaten



Buol perlu diberikan pada masyarakat setempat, jika tidak masyarakat akan cenderung menjadi 'penonton' kegiatan eksplorasi bahan-bahan tambang yang dilakukan di wilayahnya, dan masyarakat tidak akan mendapat keuntungan secara ekonomis. Dengan demikian, akan sulit bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dari usaha pengelolaan bahan tambang di daerahnya sendiri.

Perairan Laut Sulawesi termasuk sebagian wilayah dengan daya hancur tsunami dari sedang sampai tinggi. Wilayah pesisir Kabupaten Buol relatif tidak aman dari bencana gelombang tsunami. Saat ini belum ada upaya penanganan khusus di daerah-daerah yang rawan bencana tsunami, masyarakat masih cenderung membangun rumahnya di daerah pinggir laut lepas yang rawan tsunami, keseimbangan ekosistem, di sepanjang pinggiran laut lepas yang rawan tsunami juga terus terganggu. Sistem peringatan bahaya tsunami tidak dimiliki, dan pemerintah daerah belum menyiapkan sistem penanganan bencana alam terpadu. Peringatan dini agar masyarakat tidak lagi membangun di daerah yang rawan tsunami, dan anjuran untuk pindah bagi yang telah terlanjur membangun perlu dilakukan segera, keseimbangan ekosistem perlu dijaga karena bencana tsunami bisa datang kapan saja, dan akan sangat sulit menghindari bencana ini secara mendadak.

Bahaya lingkungan beraspek geologi seperti erosi, abrasi, banjir, intrusi air laut, dan gempa bumi dapat terjadi di Kabupaten Buol. Ketidaktahuan dan atau ketidakpedulian masyarakat akan ancaman bahaya lingkungan beraspek geologi akan membahayakan masyarakat. Untuk itu masyarakat perlu mengetahui, menyadari, dan menghentikan aktivitas-aktivitas yang dapat menyebabkan bahaya lingkungan beraspek geologi.



Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Buol pada tahun 2006 sebanyak 112.960 jiwa, menempati urutan ke sepuluh dalam besarnya jumlah penduduk dari sepuluh daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Total jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2006 sebanyak 2.349.765 jiwa.

Kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran suatu wilayah tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah penduduk, namun ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Jika dibandingkan dengan potensi daerah, kemampuan penduduk atau sumber daya masyarakat di Kabupaten Buol masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produk, variasi produk, dan lingkup pasar yang telah ditembus oleh produk-produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat. Jika sumber daya masyarakat tidak ditingkatkan, maka produktivitas masyarakat sulit untuk meningkat. Kemampuan dan produktivitas masyarakat saat ini baru sampai pada level pemenuhan kebutuhan hidup dari hari ke hari.

Adanya anggota masyarakat di Kabupaten Buol yang buta huruf pada tahun 2006 sebesar 1.68 persen dari penduduk Provinsi Sulawesi Tengah atau 12.11 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Buol. Kondisi buta huruf akan berdampak pada sulitnya intervensi kegiatan pemberdayaan masyarakat, ataupun pendidikan dan proses intoroduksi pengetahuan, dan ketrampilan yang menuntut kemampuan membaca. Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan, dan mengejar ketertinggalan dalam hal kualitas sumber daya manusia, maka wilayah Kabupaten Buol harus segera dicanangkan sebagai wilayah bebas buta huruf. Namun demikian, masih perlu ditelusuri posisi anggota masyarakat yang buta huruf, berada pada



kelompok usia produktif atau pada kelompok usia non produktif, sehingga bisa dilakukan penanganan dengan cara yang tepat.

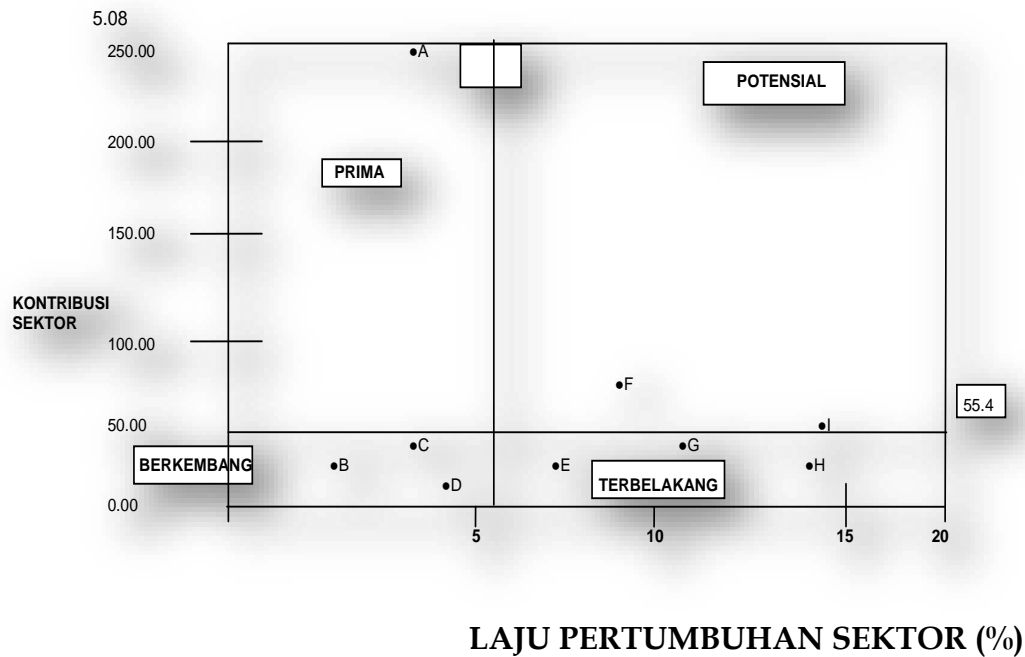
Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Walaupun tidak terdapat ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan, PDRB di Kabupaten Buol masih relatif kecil. Dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, PDRB Kabupaten Buol pada tahun 2006, atas dasar harga berlaku, ataupun atas dasar harga konstan, berada di urutan ke Sembilan, dari 10 kabupaten / kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumbangan PDRB terbesar di Kabupaten Buol, dari tahun 2002-2005 berasal dari lapangan usaha pertanian (345.398.000 rupiah), namun tingkat produktivitas yang dicapai ternyata masih rendah, dan tidak cukup kompetitif dibandingkan dengan tingkat produktivitas sektor pertanian di kabupaten lainnya dalam satu provinsi.

Dari hasil penelitian Distribusi Pendapatan daerah pada periode 2000-2005, ditemukan satu sektor yang masuk dalam kategori sektor prima, yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian bertumbuhnya relatif cepat dan memberikan kontribusi besar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Buol dibandingkan dengan sektor lainnya sebagaimana dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1.
Skater Diagram Tipologi Sektor Ekonomi di Kabupaten Buol



Gambar : Penelitian Distribusi Pendapatan Daerah, Kabupaten Buol 2006

- Keterangan :
- Sektor Prima : • A = Pertanian
 - Sektor Potensi : • F = perdagangan, Hotel, dan Restoran
• I = Jasa-jasa
 - Sektor Berkembang : • B = Pertambangan dan Penggalian
• C = Industri Pengolahan
• D = Listrik dan Air Bersih
 - Sektor Terbelakang : • E = Bangunan
• G = Pengangkutan dan Komunikasi
• H = Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan



Analisis Strategis Sektor Ekonomi

Sektor Prima

Distribusi persentase PDRB Kabupaten Buol atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (persen), menunjukkan sector pertanian adalah sector prima yang memberikan sumbangan 54.53 persen dari total PDRB Kabupaten Buol. Sektor pertanian terdiri dari 2 sub sector unggulan, yaitu ;

Tanaman perkebunan dengan PDRB sebesar 19.31 persen dengan komoditas produksi ; (a) kelapa sawit (2005) sebanyak 180.270 ton, meningkat 384.4 persen dari tahun 2004, (b) kelapa (2006) sebanyak 16.022 ton, meningkat 1.03 persen, (c) soklat (2006) sebanyak 7258 ton, dan cengkeh (2006) sebanyak 110 ton, tetap.

Tanaman bahan makanan/pangan dengan PDRB sebesar 17.33 persen dengan komoditas produksi : (a) padi (2006) sebanyak 19.916 ton, meningkat 25.22 persen, (b) jagung (2006) sebanyak 2.131 ton, meningkat 49.44 persen.

Untuk bahan makanan pokok, persediaan produksi padi di Kabupaten Buol tahun 2006 sebanyak 11.728 ton, sedangkan kebutuhan konsumsi sebanyak 16.814 ton. Berarti Kabupaten Buol masih membutuhkan $16.814 \text{ ton} - 11.728 \text{ ton} = 5.086 \text{ ton}$. Untuk itu diperlukan peningkatan produksi pemenuhan kebutuhan sendiri (swasembada beras) sebagai upaya meningkatkan kekuatan tawar menawar (bargaining possession) Kabupaten Buol terhadap kabupaten lainnya.

Sub sector pertanian lainnya pada tahun 2006 : (a) populasi ternak : sapi sebanyak 10.765 ekor, dibandingkan tahun 2005 sebanyak 11.116 ekor,



menurun sebesar 3.1 persen; kambing sebanyak 10.505 ekor, dibandingkan dengan tahun 2005 sebanyak 10.470 ekor, meningkat sebesar 13.5 persen; ayam sebanyak 44.825 ekor, dibandingkan tahun 2005 meningkat sebesar 13.5 persen; (b) produksi daging sapi 151.695 Kg, meningkat 117 persen dibandingkan tahun sebelumnya, kambing 33.274 Kg, meningkat sebesar 446.10 persen, unggas 49.807 Kg, dan produksi telur sebanyak 18.820 Kg, meningkat dari tahun sebelumnya; produksi kulit sapi dan kulit kambing juga mengalami peningkatan, produksi kulit sapi sebanyak 12.470 Kg atau meningkat 116 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan produksi kulit kambing sebanyak 8.202, meningkat 233 persen dari tahun sebelumnya.

Produksi perikanan laut pada tahun 2006 sebanyak 7641 ton, meningkat sebesar 32.5 persen dari tahun sebelumnya, dan produksi perikanan budidaya sebanyak 666 ton, meningkat sebesar 43.8 persen dari tahun sebelumnya.

Dari hasil analisis, terlihat terjadi peningkatan dan penurunan persentase berbagai komoditas produksi sector pertanian, strategis terpisah sering harus dikembangkan untuk setiap komoditas. Untuk itu digunakan matriks Boston Consulting Group yang menggambarkan perbedaan antar komoditas pertanian dalam arti pengsa pasar relative dan kecepatan pertumbuhan. Gambar 2.3 memperlihatkan matriks Boston Consuling Group (BCG) komoditas pertanian di Kabupaten Buol, tahun 2006 Pertumbuhan.

Gambar 2.3 memperlihatkan Matriks Boston Consulting Group (BCG) komoditas pertanian di Kabupaten Buol, tahun 2006.

Gambar 2.3
Matriks Boston Consulting Group (BCG) Komoditas Pertanian
di Kabupaten Buol, Tahun 2006

	Tinggi 1.0	Sedang 0.5	Rendah 0.0
Tinggi + 20	Bintang (Kuadran II) Kelapa Sawit (1.37)		Tanda Tanya (Kuadran I) Kelapa (0.43) Padi (0.09) Jagung (0.11) Kambing (0.365) Ayam Kampung (0.095) Perikanan Laut (0.008) Budidaya Perikanan (0.0007)
Sedang 0	Sapi Perah (Kuadran III)		Lapuk (Kuadran IV) Cengkeh (0.07) Coklat (0.13)
Rendah -20			

Matriks BCG yang diuraikan di atas menggambarkan perbedaan komoditas pertanian dalam arti posisi pasar relative dan kecepatan pertumbuhan komoditas di Kabupaten Buol. Kecepatan pertumbuhan, adalah cepatnya pertumbuhan masing-masing komoditas pertanian terhadap seluruh komoditas pertanian di Kabupaten Buol. Posisi pangsa pasar relative didefinisikan sebagai rasio dari pangsa pasar komoditas pertanian tertentu di Kabupaten Buol terhadap pangsa pasar terbesar yang dipegang kabupaten lain untuk komoditas tersebut.



Kuadran I, komoditas produksi ; kelapa, padi, jagung, sapi, kambing, ayam kampung, perikanan laut dan budidaya perikanan. Produk Komoditas pertanian pada kuadran I atau pada Zona Tanda Tanya, mempunyai posisi pasar relatif rendah, tapi bersaing dalam kelompok produksi komoditas yang tinggi. Di Kabupaten Buol, sebagian besar komoditas pertanian (8 komoditas) berada dalam posisis pangsa pasar rendah, karenanya, pemerintah harus meningkatkan produksi melalui strategis insentif untuk pengembangan produk. Khusus untuk jagung, perlu dilakukan strategi pengembangan pasar ke wilayah geografi baru dan strategi penetrasi ke pasar yang telah ada, melalui usaha pemasaran yang lebih gencar, sehingga produk jagung yang dihasilkan masyarakat dapat diserap oleh pasar yang telah ada, dan pasar di wilayah geografi baru tersebut.

Kuadran II, komoditas produk kelapa sawit berada pada kuadran ke II atau pada Zona Bintang, produk ini mewakili peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas. Untuk mempertahankan posisi dominannya dapat dilakukan strategi pengembangan pasar ke wilayah baru dan penetrasi pasar yang lebih besar, serta meningkatkan kerjasama investasi antara pemilik usaha kelapa sawit dengan masyarakat setempat melalui kemitraan dengan melibatkan usaha masyarakat. Selain itu, dapat dilakukan strategi pengembangan produk untuk mencari kenaikan penjualan dengan memperbaiki produk yang sudah ada atau mengembangkan yang baru, misalnya dari bahan baku kelapa sawit diolah menjadi bahan setengah jadi, atau bahan jadi seperti minyak goreng, sabun dan sebagainya.

Kuadran III, tidak ada komoditas produksi pertanian yang berada di kuadran ini atau pada Zona sapi perah. Di Kabupaten Buol, belum ada komoditas pertanian yang menghasilkan uang tunai melebihi yang diperlukannya, yang digunakan sebagai subsidi.



Kuadran IV, atau Zona Lapuk ditempat oleh komoditas pertanian cengkeh dan coklat. Untuk itu, produksi kedua komoditas ini perlu social Budaya dan Politik.

Masih terdapatnya penduduk yang buta huruf pada hampir setiap kecamatan di Kabupaten Buol merupakan salah satu hambatan internal masyarakat untuk maju, mencari dan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan yang harus ditempuh melalui media baca.

Pada tahun 2006, di Kabupaten Buol terdapat 13.682 jiwa penduduk buta huruf atau 12.11 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Buol pada tahun 2006. Penduduk yang tamat SD sebesar 30.11, merupakan kelompok terbanyak jika dijumlahkan, maka persentase penduduk yang buta huruf dan yang tamat SD sebesar 42.22 persen. Jumlah penduduk yang termasuk pada golongan ini cukup banyak. Jika tidak dilakukan proses pembelajaran yang tepat, maka kemampuan intelektual masyarakat akan semakin tertinggal. Kondisi ini jika dibiarkan terus menerus berlangsung, dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, akan berakibat makin memburuknya tingkat kehidupan social, rendahnya produktivitas dan makin terbelakangnya kehidupan masyarakat di Kabupaten Buol.

Peran partai politik pada kegiatan pembangunan perlu ditingkatkan. Wakil rakyat perlu mengetahui masalah yang dihadapi masyarakat dan mampu membuat daftar kebutuhan masyarakat Kabupaten Buol. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan masyarakat untuk mengubah kondisi kehidupannya, agar mampu menjadi bagian dari masyarakat dunia yang maju dan sejahtera. Selain itu, wakil rakyat juga dituntut untuk mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan. Karenanya, selain bertugas sebagai bahan legislasi, kemampuan wakil rakyat menampung dan menyalurkan aspirasi



masyarakat dalam berbagai bentuk kebijakan pembangunan, merupakan salah satu kunci sukses pembangunan di bidang politik.

Prasarana dan Sarana

Untuk mencapai Kabupaten Buol melalui darat, banyak dijumpai jalan yang rusak. Seluruh jalan yang rusak perlu mendapat prioritas untuk dibetulkan, terutama jalan masuk ke Kabupaten Buol, jika tidak wilayah ini makin tidak nyaman untuk dikunjungi, dan akan menjadi wilayah yang tidak diminati untuk didatangi.

Transportasi udara dari dan ke Kabupaten Buol yang dilakukan melalui pelabuhan udara Pogogul perlu dibenahi. Frekwensi arus lalu lintas udara melalui pelabuhan udara Pogogul sangat rendah. Hal ini menyebabkan wilayah Kabupaten Buol menjadi wilayah dengan jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat paling sedikit, dibandingkan wilayah lainnya di provinsi Sulawesi Tengah.

Angkutan laut juga memegang peran yang cukup penting dalam pengembangan wilayah. Belum dioptimalisasinya peran pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Buol menyebabkan arus manusia dan barang dari dan ke Kabupaten Buol masih seperti yang diharapkan.

Belum dimilikinya sektor andalan daerah yang berkualitas dengan tingkat produktivitas tinggi, tidak adanya fokus kegiatan usaha masyarakat yang merupakan kegiatan andalan, diperkirakan menjadi salah satu penyebab rendahnya kunjungan ke wilayah ini, juga rendahnya aktivitas ekonomi dari wilayah luar ke Kabupaten Buol ataupun sebaliknya, dari Kabupaten Buol ke wilayah lainnya.

Penanganan pembenahan sarana dan prasarana perhubungan, seperti jalan darat, pelabuhan udara, pelabuhan laut, serta arus lalu lintas darat, laut



dan udara, merupakan suatu keharusan dan dapat dilakukan bersamaan dengan pemilihan kegiatan utama masyarakat, peningkatan pengetahuan berusaha, peningkatan produktivitas, dan kemampuan melakukan usaha secara berkualitas dan berkelanjutan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka kondisi keterisolasian wilayah ini akan semakin mempersulit proses pembangunan dan pengembangan wilayah.

Pemerintahan

Pemerintahan yang baik atau *good governance*, adalah tatanan pemerintahan yang mampu menjamin terselenggaranya pelayanan publik dengan baik. Aspek belum adanya data untuk mengukur kualitas pelayanan kepada masyarakat, pengukuran tingkat kompetensi aparatur, dan transparansi keuangan daerah merupakan salah satu kendala dalam menganalisis kondisi kualitas pemerintahan di wilayah Kabupaten Buol.

Dalam beberapa waktu ke depan input dari aspek-aspek ini perlu segera diperoleh, agar prediksi kondisi pemerintahan untuk beberapa waktu ke depan dapat di buat dengan akurat. Dengan kondisi input yang ada saat ini, diperkirakan kondisi jalannya pemerintahan dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang belum mengalami perubahan yang penting.



BAB III

VISI DAN MISI KABUPATEN BUOL TAHUN 2005 - 2025

3.1. VISI

Berdasarkan kondisi Kabupaten Buol saat ini, dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, dengan memperhitungkan karakteristik wilayah dan kondisi yang sedang berlangsung di Kabupaten Buol, dan di lingkungan yang lebih luas, serta mengacu pada amanat yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka Visi Pembangunan Kabupaten Buol tahun 2005 - 2025 adalah :

**“KABUPATEN BUOL MANDIRI, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA
DALAM TATANAN MASYARAKAT BUOL BERKAH”**

Visi Pembangunan Kabupaten Buol tahun 2005 - 2025 mengacu pada dukungan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, Visi Pembangunan Kabupaten Buol 2005 - 2025 ikut memberikan sumbangan kepada tercapainya tujuan pembangunan nasional. Visi Kabupaten Buol harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kesejahteraan yang hendak dicapai.

Adapun yang dimaksud **“Mandiri”** adalah: masyarakat yang penuh percaya diri, mempunyai motivasi dan prakarsa yang tinggi, mampu mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki, tekad yang kuat dan tahan terhadap goncangan, adaptif terhadap perubahan serta berlaku harmonis terhadap lingkungannya;



Kabupaten Buol dapat disebut mandiri, apabila wujud tatanan kehidupan yang telah sejajar dengan masyarakat maju. Kabupaten Buol dapat disebut mandiri apabila mampu membangun dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, ditandai dengan meningkatnya kemampuan membiayai pembangunan dengan biaya sendiri, sehingga ketergantungan penyelenggaraan pembangunan pada pembiayaan dari sumber lainnya makin kecil.

Untuk membangun kemandirian di Kabuapten Buol, masyarakat dan aparat harus memiliki motivasi yang tinggi, sehingga mau belajar dan bekerja keras. Sumber daya masyarakat dan aparatur yang berkualitas, tingkat produktivitas yang tinggi dan proses produksi yang berkualitas akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Selanjutnya, akan terwujud kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sendiri secara berkualitas. Kelebihan produk dapat dipasarkan, bahkan produksi dapat ditingkatkan. Untuk itu kemampuan bekerja sama secara ekonomi dengan pihak lain, termasuk di dalamnya kemampuan memasarkan produk juga merupakan indikator keberhasilan dalam hal kemandirian suatu wilayah.

Sumber daya alam yang cukup baik, tanah yang subur, sangat memungkinkan produk-produk hasil bumi dan olahan hasil bumi menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Buol, sehingga masyarakat Kabupaten Buol sebenarnya memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap gejolak ekonomi dunia. Diversifikasi usaha pada setiap sub sektor juga perlu dilakukan, misalnya dilakukan pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau produk yang telah jadi.

“Maju” adalah : Jika ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan diukur dari sumber daya manusianya. Kemajuan yang ingin dicapai adalah kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman, memiliki kepribadian yang baik, berakhlak mulia berwawasan luas, trampil, dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas



pendidikan di Kabupaten Buol ditandai dengan makin menurunnya tingkat pendidikan terndah, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan meningkatnya jumlah tenaga ahli serta para professional yang dihasilkan oleh system pendidikan di Kabupaten Buol.

Kemajuan juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, jika Kabupaten Buol makin maju, maka kecenderungan laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial makin tinggi dan kualitas sumber daya manusia makin baik, yang tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Jika ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan Kabupaten Buol diukur dari tingkat kemakmuran masyarakat, yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya.

Kemajuan juga dapat diukur dari tegaknya hukum, lembaga politik, dan lembaga kemasyarakatan yang dapat berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu konstitusi yang telah ditetapkan, keperdulian masyarakat yang tinggi pada kelestarian lingkungan hidup, aktifnya peran serta masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang didukung oleh infrastruktur wilayah yang maju.

“Adil dan Sejahtera” adalah : merupakan harapan dari segenap kerja keras yang dilakukan melalui kegiatan pembangunan. Sehingga pembangunan di Kabupaten Buol tidak hanya untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri, tapi juga untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Keadilan dan kesejahteraan harus tercermin dalam semua aspek kehidupan, karenanya setiap warga masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupan; menciptakan dan memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan membela Negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan



hukum. Kesejahteraan di Kabupaten Buol ditandai dengan dapat dipenuhinya seluruh kebutuhan hidup secara layak dan berkualitas.

Buol Berkah dalam arti bahwa unsur masyarakat BERKAH yang ingin diwujudkan adalah:

- ✚ Masyarakat modern yang berbudaya, yaitu masyarakat yang berfikir dan bertindak positif, dapat menerima nilai-nilai baru, dinamis, kreatif, enerjik, berpandangan luas, dan berorientasi ke masa depan serta toleran terhadap perbedaan, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama;
- ✚ Masyarakat mandiri, yaitu masyarakat yang penuh percaya diri, mempunyai motivasi dan prakarsa yang tinggi, mampu mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki, tekad yang kuat dan tahan terhadap goncangan, adaptif terhadap perubahan serta berlaku harmonis terhadap lingkungannya;
- ✚ Masyarakat egaliter, yaitu masyarakat yang mengakui persamaan hak, menjunjung tinggi nilai HAM, tidak diskriminatif, pengayom, dan memiliki solidaritas social yang tinggi;
- ✚ Masyarakat terbuka yang demokratis, yaitu masyarakat yang senantiasa menerima perbedaan sebagai suatu proses menuju kebersamaan, mengutamakan kepentingan umum, tidak feodal dan tidak diskriminatif.

Jadi Tatanan Masyarakat Kabupaten Buol BERKAH yang dimaksud adalah masyarakat modern yang berbudaya, mandiri, egaliter, serta terbuka dan demokratis yang dilandasi oleh moral agama dan senantiasa mampu melaksanakan amanah. BERKAH juga merupakan singkatan dari kata yang bermakna sebagai berikut:



- a) **Budaya.** Artinya menjadikan budaya sebagai alat control menuju masyarakat yang tertib lahir batin, dan disamping itu budaya dikelola untuk mempererat persatuan dan kesatuan;
- b) **Enerjik / semangat,** artinya tidak statis dan dalam melakukan usaha semangat selalu dikedepankan serta tidak mudah putus asa;
- c) **Ramah,** artinya bersikap baik terhadap orang lain (siapa saja beritikad baik), dapat menerima perkembangan baru, tidak serta merta menolak terjadinya perubahan;
- d) **Kreatif,** artinya berupaya menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini, melalui berbagai kreasi yang positif;
- e) **Amanah,** artinya setiap orang memiliki pengabdian dan tanggungjawab terhadap diri dan masyarakatnya;
- f) **Harmonis,** artinya dengan mengedepankan rasa saling menghargai kepada siapa saja dan menumbuhkembangkan rasa saling memahami dalam suasana yang aman, damai, diantara sesama warga masyarakat.

3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kabupaten Buol 2005 - 2025, maka ditempuh 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan tatanan masyarakat BERKAH sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Falsafah Pancasila** adalah memperkuat jati diri dan karakter daerah yang dilandasi semangat pengamalan ajaran agama melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya lokal, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah dan mematuhi



aturan hukum, menjaga ketertiban daerah serta berdemokrasi yang berkedaulatan rakyat.

2. **Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang terampil, berilmu pengetahuan teknologis, produktif, mandiri, dan maju** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
3. **Mewujudkan *good governance* dan *clent governance* dengan aparatur negara yang profesional melayani masyarakat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme** adalah menerapkan tata kelola system pemerintahan yang baik, berwibawa, bersih dan terbebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, memiliki sumber daya aparatur yang tangguh dan professional dan menjunjung tinggi etika, dan taat terhadap hokum, melaksanakan system pemerintahan dengan daya dukung kelembagaan yang mandiri.
4. **Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan Kualitas Infrastruktur Wilayah** adalah ; Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan bertumpu pada potensial sumber daya alam pada sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan serta pertambangan dengan pendekatan komunitas, teknologis dan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, membangun infrastruktur yang maju dan berkualitas berbasis kewilayahan; dan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam daerah sebagai pendukung sekaligus perekat berkembangnya interkoneksi ekonomi kawasan di sekitarnya.
5. **Mewujudkan pembangunan yang Berkeadilan dan Inklusif** adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan



wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama dalam peningkatan kehidupan yang layak bagi rakyat dengan tercukupinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja serta sarana dan prasarana ekonomi.

6. **Mewujudkan Kabupaten Buol yang asri dan lestari, bersih dan indah** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan penataan tata ruang wilayah secara konsisten, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memelihara keseimbangan ekosistem, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
7. **Mewujudkan Kabupaten Buol aman, damai dan bersatu** adalah Memelihara kondisi ketahanan dan ketertiban umum yang memungkinkan berlangsungnya secara lancar aktivitas sosial ekonomi masyarakat, terutama daerah ini satu-satunya daerah di Sulawesi Tengah yang secara geografis berbatasan langsung dengan luar negeri.



BAB IV

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan Kabupaten Buol yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju tatanan masyarakat Kabupaten Buol BERKAH sebagaimana pencapaian masyarakat yang adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

4.1. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.1. MEWUJUDKAN TATANAN MASYARAKAT BERKAH SEJAHTERA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA, ditandai hal-hal berikut:

1. Terwujudnya jati diri dan karakter daerah yang dilandasi semangat pengamalan ajaran agama melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat daerah



berlandaskan nilai - nilai luhur budaya dan kearifan lokal daerah, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.

3. Mematuhi aturan hukum, menjaga ketertiban daerah serta berdemokrasi yang berkedaulatan rakyat.

Secara umum, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Buol adalah mewujudkan tatanan masyarakat BERKAH sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Falsafah Pancasila, diarahkan terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

Seiring pula pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa, seperti religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai



modern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri bangsa tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun. Untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan bangsa, pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olah raga. Hal ini pula dibarengi dengan pembangunan budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar bangsa Indonesia menguasai iptek serta mampu berjaya pada era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat, dan peradaban manusia.

secara keseluruhan aspek pembangunan ini diharapkan menjadi akumulasi program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai terwujudnya masyarakat Kabupaten Buol yang berkarakter berjiwa patriotik, berwawasan kebangsaan, berbudaya, gotong royong, produktif dan berahlak mulia berlandaskan nilai-nilai luhur budaya dan Pancasila serta bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dicapai melalui arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagai berikut :

1. AGAMA

- a. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama sehingga membentuk pribadi yang memiliki kualitas moral yang prima,



sehingga menjadi acuan dalam kehidupan setiap individu sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara yang berwujud pada pengambilan keputusan di bidang pembangunan dan aspek kemasyarakatan lainnya, membina kerukunan hidup antar-umat beragama dalam suasana kebersamaan dan keakraban yang intim, mencegah perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama sehubungan dengan dampak negatif di era globalisasi.

- b. Peningkatan fungsi dan peran lembaga keagamaan dan tokoh agama dalam rangka pembinaan kehidupan beragama yang suasana pluralisme kehidupan masyarakat, peningkatan pelayanan bagi semua ummat pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya, terutama peningkatan mutu pelayanan ibadah haji bagi ummat Islam dengan peranan bersama pemerintah daerah dan lembaga keagamaan yang terkait.
- c. Peningkatan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan proses belajar mengajar, mengakomodir kurikulum yang bermuatan lokal sehingga lebih sesuai dengan budaya dan dinamika tuntutan kehidupan masyarakat, serta mengupayakan kesadaran setiap anggota masyarakat yang belum beragama untuk menganut salah satu agama yang diakui Negara, tidak mengikuti aliran yang bertentangan dengan ajaran agama atau aliran yang sesat.

2. KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

- a. Peningkatan pembinaan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia yang dapat membentuk watak dan perilaku warga masyarakat yang beradab, sopan dan santun, beretika dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menyerap akulturasi budaya asing secara positif dan kreatif untuk memperkaya budaya bangsa yang harus dijunjung bersama.



- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pertemuan dan diskusi budaya terutama bagi kalangan pemuda dan mahasiswa termasuk kesenian dan pertunjukannya terutama budaya dan kesenian tradisional guna membentuk dan menajamkan rasa dan karsa untuk menyempurnakan nilai indeks pembangunan manusia melalui nilai penghayatan dan pengamalan terhadap tata nilai kebudayaan dan kesenian yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- c. Pemanfaatan tata nilai budaya lokal yang relevan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, serta pemeliharaan bangunan dan benda-benda bersejarah, cagar budaya dan peninggalan purbakala sebagai kebanggaan sekaligus sebagai wahana pendidikan, peningkatan apresiasi terhadap penggunaan bahasa daerah di samping bahasa nasional menjadi wahana komunikasi sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

3. PEMUDA DAN OLAHRAGA

- a. Peningkatan peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi kepemudaan; peningkatan kegiatan pemuda dalam berorganisasi; pendidikan politik bagi generasi muda, pembinaan peningkatan kepemimpinan pemuda, peningkatan penguasaan iptek; peningkatan di bidang kewirausahaan, dan perlindungan terhadap bahaya narkoba, NAPZA.
- b. Peningkatan peran serta dan gairah masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan pembinaan olahraga guna memasyarakatkan kegiatan olahraga secara luas yang mampu mendorong minat berbagai kalangan masyarakat, serta menumbuhkan budaya olahraga sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan di dalam kehidupan masyarakat, sehingga



dapat mewujudkan atau membentuk jasmani yang sehat, produktif, kreatif dan inovatif bagi pembangunan dan keharuman nama daerah.

- c. Peningkatan prestasi olahraga terutama cabang olahraga yang menjadi andalan pada berbagai kejuaraan olahraga, baik di tingkat regional, nasional dan bahkan internasional, melalui penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, tenaga profesional sebagai pelatih, kesadaran, ketekunan dan disiplin para atlet untuk berlatih pembinaan serta pengembangan sportifitas dan insentif yang menarik dan memadai bagi atlet yang berprestasi.

4.1.2 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS YANG TERAMPIL, BERILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGIS, PRODUKTIF, MANDIRI, DAN MAJU, ditandai dengan:

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

Secara umum, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Buol adalah peningkatan kualitas SDM. Kualitas sumberdaya manusia memiliki dimensi yang luas tidak sebatas dimensi fisik saja tetapi meliputi dimensi non fisik atau non lahiriah terkait dengan watak, perilaku dan hal yang bersifat spiritual serta berbagai aspek pembangunan lainnya yang sangat terkait. Karena itu maka peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Buol dilakukan melalui pengelolaan dan pengendalian aspek kependudukan baik jumlah, distribusi, struktur dan peningkatan kualitas lingkungannya, peningkatan pengetahuan, berupa kemudahan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar dan sosial budaya terutama pendidikan



agar pengetahuan masyarakat meningkat, di bidang kesehatan agar masyarakat memiliki falsafah hidup sehat dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ekonomi yang ditunjukkan dengan paritas daya beli masyarakat, kesejahteraan sosial peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama, pembinaan kebudayaan dan kesenian, keolahragaan, serta pengelolaan dan pengendalian pertumbuhan dan persebaran serta mobilitas penduduk, pengentasan kemiskinan, pengarusutamaan gender, ketahanan pangan, pembangunan wilayah dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, keseluruhan aspek pembangunan ini diharapkan menjadi akumulasi program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai terwujudnya masyarakat Kabupaten Buol yang sehat, cerdas, produktif, mandiri, maju dan berahlak mulia, yang akan dicapai melalui arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagai berikut :

1. KEPENDUDUKAN

- a. Peningkatan kualitas penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan melalui pemahaman yang baik tentang keluarga kecil bahagia dan sejahtera, membatasi kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, menata penyebaran dan mobilitas penduduk disesuaikan dengan pembangunan wilayah terutama transmigrasi.
- b. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan administrasi kependudukan melalui penyempurnaan kegiatan pencatatan, pengolahan dan analisa data dalam rangka pengembangan sistem informasi dan administrasi kependudukan sehingga menjamin ketersediaan data yang akurat dan sistimatis guna mengendalikan perkembangan penduduk di semua tingkatan wilayah administrasi.



2. PENDIDIKAN

- a. Peningkatan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu di semua jenjang pendidikan bagi seluruh masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan melalui pemanfaatan anggaran yang sesuai dengan amanat konstitusi secara tepat guna dan tepat sasaran, sehingga dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sarana dan sarana pendidikan yang dibutuhkan, memadai dan berkualitas, penataan sistem belajar dan mengajar yang relevan dengan peningkatan mutu keluaran pendidikan.
- b. Peningkatan kemampuan akademis dan professional tenaga pendidik melalui pendidikan dan pelatihan, jaminan kesejahteraan tenaga pendidik serta pembaharuan dan pementapan manajemen pendidikan pada semua strata pendidikan berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan dan menuntaskan program wajib belajar 9 dan 12 tahun terutama bagi masyarakat miskin dengan membebaskan mereka dari biaya pendidikan serta semakin menegaskan relevansi antara program dan kegiatan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia dan mengatasi pengangguran di kalangan pemuda.

3. KESEHATAN

- a. Penataan manajemen pelayanan kesehatan pada semua tingkatan dan jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga menghasilkan pelayanan kesehatan yang prima, berkualitas dan merata menjangkau semua lapisan masyarakat, serta penataan dan penyediaan sumberdaya kesehatan dan IPTEK yang memberi jaminan peningkatan mutu dan penyebaran pelayanan.



- b. Peningkatan kesadaran masyarakat pada nilai hidup sehat dalam kehidupannya sehingga muncul ketaatan dan budaya hidup sehat yang sebenarnya melalui sosialisasi dan promosi.
- c. Peningkatan dan pengembangan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dan miskin, baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan baik yang berciri kepulauan, pedalaman dan kawasan pesisir tanpa diskriminatif.
- d. Meningkatkan ketanggapan terhadap munculnya penyakit menular yang berkembang di masyarakat melalui pemeliharaan lingkungan yang sehat, perbaikan asupan gizi masyarakat dan upaya lainnya sehingga memberi jaminan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memadai untuk berproduksi.

4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK

- a. Peningkatan kemampuan profesional tenaga peneliti, kemampuan kelembagaannya dari sisi organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana pendukung yang memadai sehingga mampu melakukan penelitian, menjalin kerjasama penelitian dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian serta memfasilitasi sosialisasi dan pemanfaatan hasilnya.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan lembaga penelitian dan lembaga pendidikan perguruan tinggi serta LSM, dalam upaya melaksanakan penelitian, mengembangkan dan mensosialisasikan IPTEK terutama yang gayut dengan kebutuhan perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, terutama dalam rangka pemanfaatan potensi sumberdaya alam daerah yang di



nilai potensil dan prospektif menjadi andalan daerah dan memberi maslahat kepada masyarakat.

- c. Peningkatan apresiasi dan pengembangan teknologi tepat guna yang dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakat atau berupa teknostruktur masyarakat yang telah dikuasai selama ini, baik di perkotaan maupun perdesaan dalam rangka mendukung berbagai kegiatan usaha produktif dalam rangka meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.

5. KETENAGAKERJAAN

- a. Perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor untuk dapat menampung meningkatnya arus migran pemuda sebagai tenaga kerja produktif dari desa ke kota tetapi tidak memiliki keterampilan yang memadai serta pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya.
- b. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui melalui berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, yang dilaksanakan melalui fasilitasi pemerintah daerah dengan peran serta pihak swasta, dan menciptakan tenaga kerja dengan sertifikasi standard nasional dan internasional, guna memenuhi kelayakan penyaluran tenaga kerja keluar negeri dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh pasar kerja yang ditawarkan, serta perlindungan tenaga kerja di luar negeri melalui peningkatan pengawasan, pra penempatan dan selama penempatan hingga purna penempatan.
- c. Peningkatan dan pengembangan talenta wirausaha baru dari kalangan lulusan perguruan tinggi dan tenaga kerja terdidik lainnya, sehingga menghasilkan wirausaha yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan tenaga kerja lainnya, serta



mengembangkan bursa tenaga kerja melalui pengembangan sistem informasi pasar kerja.

- d. Peningkatan perlindungan dan pengawasan pelaksanaan hak-hak pekerja, peningkatan kesejahteraannya, aktualisasi pembinaan hubungan industrial yang harmonis antara manajemen perusahaan dan para pekerja dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitasnya

6. PEREMPUAN DAN KELUARGA

- a. Peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- b. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai salah satu bagian dari sumberdaya manusia termasuk perlindungan tenaga kerja wanita.
- c. Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender

7. KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang didukung oleh sistem hukum dan perlindungan sosial termasuk penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai. Selain itu, sistem jaminan sosial dikembangkan bagi seluruh rakyat sebagai wahana yang luas untuk pengembangan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan diupayakan tidak merusak budaya tolong menolong yang berakar di masyarakat.



4.1.3. MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLENT GOVERNANCE DENGAN APARATUR NEGARA YANG PROFESIONAL MELAYANI MASYARAKAT DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, ditandai hal - hal berikut :

1. Terciptanya tata kelola Pemerintahan yang mandiri, berkualitas bebas, bersih dari Korupsi, Nepotisme dan Kolusi.
2. Meningkatnya Kualitas dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan kelembagaan kemasyarakatan;
3. Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Sumber Daya Aparatur yang profesionalisme dan beretika;

Secara umum, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Buol dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas kelembagaan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan kelembagaan masyarakat di daerah yang berkualitas dan mandiri dimaksudkan untuk memberi penguatan terhadap pergeseran peran dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (desentralisasi/otonomi daerah) yang menuntut peran sekaligus tanggungjawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya akan semakin dominan, berkembang dan di tuntut lebih berkualitas, termasuk pemerintahan desa sehingga aspirasi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan prima. Demikian halnya kelembagaan masyarakat, karena otonomi daerah harus dipahami tidak sebatas pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi merupakan refleksi dari pergeseran peran masyarakat sebagai pemrakarsa dan pelaksana pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat. Karena itu maka kelembagaan masyarakat harus dimotivasi untuk mengembangkan diri untuk memiliki kemandirian dalam melaksanakan visi dan misinya, tidak sepenuhnya menggantungkan



kebutuhannya kepada pemerintah daerah, kelembagaan masyarakat maksudkan di sini meliputi, yang bergerak di bidang ekonomi, organisasi politik sebagai penyalur dan pengartikulasi kehendak dan aspirasi politik masyarakat, pendidikan, kesehatan, keagamaan, perepuan dan keluarga, pemuda serta organisasi pelayanan sosial lainnya seperti panti asuhan, jompo dan tunanetra. Jenis kelembagaan masyarakat seperti ini akan disentuh melalui pendekatan pemberdayaan, untuk maksud tersebut maka akan ditempuh arah pembangunan jangka panjang daerah untuk agenda pembangunan ini sebagai berikut :

1. PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI DAERAH

- a. Memperkuat pelaksanaan otonomi daerah bagi kesinambungan pembangunan dan mempertahankan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Membangun mental aparatur pemerintah daerah dari cenderung bersifat penguasa (abdi negara) menjadi pelayan masyarakat (abdi masyarakat), serta terciptanya tranparansi, akuntabilitas, konsistensi dan demokratisasi dalam manajemen pemerintahan daerah, sehingga tercipta pemerintahan yang baik antara lain dapat di nilai dari berkembangnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat dan kalangan swasta.
- c. Peningkatan profesionalisme dan mental aparatur pemerintah daerah sehingga memiliki moral dan kemampuan yang prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. Peningkatan kesejahteraan aparatur daerah sehingga dapat hidup layak bagi kemanusiaan dan kelangsungan hidup keluarganya, memotivasi melalui pemberian penghargaan atas pengabdianya



yang terbaik bagi masyarakat dan negara serta mencegah timbulnya potensi terjadinya KKN dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, sekiranya terjadi maka harus diberikan sanksi hukum yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Peningkatan kemampuan lembaga legislatif daerah beserta anggota DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam memerankan tugas dan fungsi serta kewenangannya, meliputi tugas dan fungsi legislasi, pengawasan dan *budgeting* sehingga tercipta keseimbangan dan hubungan yang harmonis dan saling mendukung bagi terselenggaranya fungsi fungsi pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang prima bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat.

2. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

- a. Peningkatan kemampuan organisasi sosial, ekonomi, politik dan kemasyarakatan lainnya agar memiliki kemandirian sebagai wadah untuk mengembangkan profesi, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, penyalur aspirasi masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, budaya bangsa/lokal, nilai-nilai keagamaan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan.
- b. Pengembangan lembaga lembaga swadaya masyarakat di perkotaan dan perdesaan terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan dan kesehatan) pemeliharaan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif (ketentraman dan ketertiban), peningkatan pemahaman nilai nilai keagamaan serta peningkatan solidaritas sosial.



- c. Peningkatan fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik serta sebagai sarana pengatur dan pemecahan konflik dalam masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan, sehingga terbentuk budaya politik masyarakat yang sesuai nilai-nilai Pancasila, nilai agama dan nilai hakiki kehidupan berdemokrasi yang sedang berproses mencari bentuk saat ini.
- d. Peningkatan kemampuan kewirausahaan usaha kecil dan menengah, koperasi dan revitalisasi kelembagaan keuangan tradisional sehingga menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang memiliki mutu tenaga kerja yang memadai, mutu produksi dengan standar yang memanfaatkan kemajuan IPTEK termasuk distribusi dan jaminan pemasaran.
- e. Meningkatkan kemampuan lembaga penelitian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah, serta mengkoordinasikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian, serta mendorong sosialisasi dan pemanfaatan hasil penelitian.
- f. Peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan dan keluarga dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender meliputi aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM.
- g. Peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi kepemudaan, kesempatan dalam berorganisasi, pendidikan politik, peningkatan kepemimpinan, keunggulan dalam pengasaan IPTEK, potensi kewirausahaan serta perlindungan terhadap bahaya narkoba dan zat additive lainnya, memprakarsai kegiatan pembangunan dilingkungannya meliputi sosial budaya, ekonomi, politik, ketertiban dan ketentraman serta suasana kepemudaan yang sehat, cerdas, bermoral, dinamis dan demokratis



4.1.4. MEWUJUDKAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN YANG BERDAYA SAING DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH, ditandai hal - hal berikut :

1. Menguatnya perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antardaerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antardaerah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan daerah secara berkelanjutan; mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
2. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi nasional; dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai wilayah Indonesia sehingga menjadi bagian



integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri.

3. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
4. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia.
5. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui (1) pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2)



penguatan hubungan antarindustri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaan multinasional terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang, antara lain, meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka upaya peningkatan Sistem Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing ditentukan oleh kemampuan daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur, UKM yang memiliki produktifitas yang tinggi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Dalam rangka peningkatan Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing dan ketahanan ekonomi daerah serta upaya untuk mendorong kemajuan perekonomian maka peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dapat diarahkan pada pertumbuhan yang berkualitas yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah penduduk miskin serta harus mempertimbangkan ketersediaan pangan, peningkatan daya saing. Harapan tersebut dapat dicapai melalui:

1. PEREKONOMIAN DAERAH

- a. Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan ekonomi kerakyatan dengan melakukan perubahan struktur ekonomi melalui penguatan industri pengolahan sebagai motor penggerak yang di



dukung oleh kegiatan pertanian serta pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara modern dan berkelanjutan.

- b. Penguatan daya saing perekonomian secara global bertumpu pada penguatan sektor industri hulu-hilir guna menciptakan lingkungan usaha mikro yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat.

2. PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

- a. Peningkatan nilai tambah komoditas ekspor, yang berorientasi pada efisiensi, perbaikan kualitas, keamanan dan berkelanjutan sehingga mempunyai keunggulan kompetitif di pasar global.
- b. Peningkatan pembangunan sentra pertanian dan peningkatan efisiensi lahan melalui diversifikasi pertanian serta perluasan lahan pertanian dengan menerapkan teknologi budidaya yang adaptif dan ramah lingkungan.
- c. Pengembangan kawasan pertanian dan pedesaan melalui pengembangan jaringan infrastruktur antara sentra pertanian dan pusat-pusat pertumbuhan.
- d. Pengembangan berbagai komoditas pertanian yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar dengan memperhatikan pendekatan keterpaduan antara sub sistem hulu dan hilir.

3. PERKEBUNAN

- a. Peningkatan mutu dan kualitas produksi perkebunan dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekspor perkebunan.
- b. Pengembangan perkebunan sebagai pilar ekonomi melalui peningkatan peran masyarakat lokal dalam upaya menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar dan peningkatan kerjasama dengan



pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan investasi.

- c. Pengembangan perkebunan yang berpotensi dan bernilai ekonomi tinggi melalui pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk diubah / digunakan sebagai pengembangan perkebunan yang lebih produktif dan intensif.
- d. Peningkatan akses pemasaran melalui pengembangan jejaring bisnis yang berorientasi saling menguntungkan.

4. KEHUTANAN

- a. Pembangunan hutan secara lestari melalui peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan yang diimbangi dengan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia.
- b. Revitalisasi industri kehutanan yang dikembangkan sesuai dengan konsep pengelolaan hutan lestari dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada prinsip efisiensi, ramah lingkungan, variasi produk, nilai tambah, jaminan pasokan dan akses pasar, dan mampu bersaing secara global.
- c. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan melalui percepatan pemulihan lahan / DAS yang kritis dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta peningkatan akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan melestarikannya.

5. PETERNAKAN

- a. Peningkatan nilai tambah peternakan dengan melakukan peningkatan produksi hasil pengolahan produk peternakan melalui peningkatan sumber daya manusia peternakan, baik petani ternak maupun petugas teknis dan peningkatan keterampilan serta teknologi pengelolaan hasil peternakan dengan memfasilitasi



sarana dan prasarana penunjang untuk pengolahan hasil peternakan.

- b. Perluasan peluang pemasaran seluas-luasnya kepada pelaku usaha dan petani ternak untuk memasarkan produk peternakan dengan membangun sarana dan fasilitas pemasaran produk peternakan, dan pemberian kemudahan izin untuk memasarkan produk peternakan ke luar daerah maupun luar negeri.
- c. Pengembangan peternakan yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan usaha peternakan dengan skala ekonomis dengan membangun sistem informasi teknologi dan pemasaran sehingga dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.
- d. Peningkatan peranan kelembagaan peternakan dalam mendukung ekonomi kerakyatan.

6. KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari melalui penguatan sarana dan prasarana serta penguatan penelitian dan pengembangan agribisnis dengan memperhatikan wilayah konservasi sumber daya ikan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan danau melalui pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kawasan sentra produksi perikanan dan peningkatan pengawasan di perairan laut untuk mencegah *illegal fishing*.
- b. Pengembangan berbagai komoditas perikanan dan kelautan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar melalui diversifikasi pengolahan hasil perikanan dan pengembangan industri olahan untuk menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing tinggi.



- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh *stakeholders* bidang kelautan dan perikanan melalui pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan dan peningkatan kelembagaan masyarakat pembudidaya, nelayan dan masyarakat pesisir.
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat, pendidikan, kesehatan serta pembinaan terhadap koperasi kelautan dan perikanan, dan dukungan permodalan.
- e. Pengembangan iklim kemitraan dan kewirausahaan yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal masyarakat pesisir dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga ekonomi masyarakat.

7. INVESTASI DAERAH

Pembangunan investasi daerah diarahkan pada peningkatan nilai investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMDN / PMA) dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif serta penjaminan kepastian usaha dan kepastian hukum dalam berusaha serta penciptaan kemudahan usaha dan investasi melalui berbagai deregulasi dan sistem insentif.

8. PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI

- a. Peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar serta pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha



yang sehat, sehingga mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat perekonomian domestik.

- b. Pengembangan industri kecil dan menengah perlu didorong sehingga mampu berdaya saing di pasar lokal maupun internasional dan memberikan kontribusi untuk memperkuat perekonomian domestik.
- c. Penataan perindustrian yang terintegrasi dengan pemanfaatan seoptimal mungkin sumberdaya alam yang dimiliki sesuai dengan unggulan daerah melalui pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui keberkaitan antar-sektor potensial dan sebagai upaya perwujudan pembentukan struktur industri yang mapan mulai dari industri hulu sampai hilir.
- d. Peningkatan aktifitas perdagangan yang mampu memberikan dukungan terhadap pengembangan perekonomian wilayah melalui pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah serta peningkatan pertumbuhan ekspor non migas berbasis produk unggulan daerah.
- e. Peningkatan produktivitas industri skala besar dengan pemanfaatan seoptimal mungkin sumberdaya alam yang dimiliki sesuai dengan unggulan daerah melalui peningkatan iklim investasi bidang perindustrian dan peningkatan nilai tambah berbagai sumberdaya alam melalui pengolahan dan berbagai proses industrialisasi dari hulu sampai hilir.
- f. Pengembangan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan dan pelaksanaan iklim persaingan usaha secara sehat, peningkatan kemitraan antara pelaku pembangunan untuk memperkuat basis lokal.
- g. Penguatan jaringan perdagangan ekspor.



9. PARIWISATA

- a. Peningkatan pengembangan kawasan unggulan pariwisata sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memberikan perluasan kesempatan kerja.
- b. Peningkatan promosi wisata terpadu dan terintegrasi pada objek wisata unggulan propinsi, regional dan nasional.

10. PERTAMBANGAN DAN MIGAS

- a. Pengendalian eksploitasi migas dalam upaya penghematan pemanfaatan migas dalam jangka panjang melalui diversifikasi hasil pengolahan minyak bumi dan sumberdaya alam lainnya.
- b. Peningkatan pengelolaan bahan migas melalui pengembangan migas dengan mengutamakan pada kawasan yang memiliki cadangan besar.

11. PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

- a. Pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat, pemerataan kebutuhan hunian bagi masyarakat serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dengan melibatkan peran serta swasta.
- b. Pembinaan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, disertai penyediaan infrastruktur dasar yang memadai;
- c. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara



profesional, kredibel, mandiri, dan efisien; (2) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) pembangunan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

12. TRANSPORTASI

- a. Pemerataan pelayanan transportasi darat antar-wilayah maupun di dalam wilayah perkotaan dan perdesaan melalui peningkatan aksesibilitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat aktifitas dan wilayah sekitarnya terutama dengan kawasan pedalaman dan perbatasan.
- b. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana ASDP untuk menunjang pergerakan intermoda melalui peningkatan prasarana dermaga sungai dan peningkatan keterkaitan transportasi intermoda yang berhubungan antara daratan yang terpisah oleh sungai dan antar pulau dengan dukungan transportasi sungai.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung terhadap pembentukan kawasan strategis daerah sehingga terjadi keterpaduan yang saling mendukung dengan membangun jalan baru yang mengarah pada akses ke kawasan strategis daerah.
- d. Peningkatan kualitas sistem transportasi udara untuk keperluan pergerakan internasional, nasional, maupun pergerakan lokal dengan pemantapan sistem hirarki jaringan transportasi udara sesuai tingkat kebutuhan dan rencana pengembangan yang



mendukung terhadap tingkat cakupan pergerakan dan wilayah pelayanan.

13. SUMBERDAYA AIR

- a. Pengembangan jaringan irigasi/pengairan untuk melayani perluasan areal sawah, penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan pengembangan sumber air baku melalui peningkatan kelayakan, dan rehabilitasi jaringan irigasi/pengairan dan bendung/ bendungan serta pengembangan embung pada lokasi strategis.
- b. Pengembangan jaringan daerah rawa dengan peningkatan dan pembangunan jaringan tata air daerah rawa dan pembangunan dan pengelolaan irigasi, rawa, dan tambak.
- c. Konservasi sumberdaya air melalui peningkatan partisipasi masyarakat untuk melakukan konservasi sumberdaya air serta peningkatan pengamanan pantai dan sungai.

14. ENERGI LISTRIK

- a. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang melalui rehabilitasi, *repowering* pembangkit yang ada dan pembangkit baru serta pengembangan diversifikasi energi dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang sudah beroperasi sehingga mampu mendukung pasokan listrik pada beban puncak. Serta pembangunan pembangkit listrik dengan jenis PLTA untuk penyediaan jangka panjang.
- b. Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan dengan melakukan manajemen sumber daya listrik yang berwawasan lingkungan.



4.1.5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN INKLUSIF, ditandai hal - hal berikut :

Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Kecamatan di Kabupaten Buol akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama dalam peningkatan kehidupan yang layak bagi rakyat dengan tercukupinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja serta sarana dan prasarana ekonomi.

Secara keseluruhan aspek pembangunan ini diharapkan menjadi akumulasi program dan kegiatan pembangunan untuk Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Inklusif, yang akan dicapai melalui arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagai berikut :

1. TATA RUANG WILAYAH

- a. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Tujuan utama pengembangan wilayah adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya. Pelaksanaan pengembangan wilayah tersebut dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang. Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam



rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.

- b. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
- c. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpinggirkan sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi'.

2. KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung,



termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.

- b. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem nomor induk kependudukan (NIK). Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.
- c. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang sudah disempurnakan bersama sistem perlindungan sosial nasional (SPSN) yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pendanaan serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas. secara bertahap sehingga Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas.

3. PEMBANGUNAN PERDESAAN

- a. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses



informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

- b. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan *backward linkages* dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (nonpertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.
- c. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan desa - desa terpencil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- a. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat



diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

- b. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (*asset management*) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

4.1.6 MEWUJUDKAN KABUPATEN BUOL YANG ASRI DAN LESTARI, BERSIH DAN INDAH, ditandai hal - hal berikut:

Menata kembali kondisi Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan modal pembangunan daerah dan, sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kabupaten Buol yang maju, mandiri, dan adil dalam tatanan , sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

Kondisi Lingkungan yang menunjukkan kecenderungan penurunan kualitas, meliputi lahan kritis, kerusakan hutan lindung, menipisnya luas



hutan mengrove, kerusakan kawasan pantai dan terumbu karang, meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat, mencegah dampak negatif pengelolaan sumberdaya alam berupa pencemaran dan degradasi lingkungan hidup, mengintegrasikan pengelolaan sumberdaya alam dengan kelestarian lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, menserasikan pemanfaatan fungsi tata ruang meliputi tanah, air, udara dan sumberdaya alam dengan sektor - sektor perekonomian termasuk sistem pemukiman, prasarana dan sarana wilayah secara terpadu sehingga memenuhi asas konservasi, efisiensi dan harmoni yang menjadi asas dalam perencanaan tata ruang. Maka arah kebijakan jangka panjang sebagai berikut :

1. PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PERBATASAN

- a. Pengembangan struktur ruang yang menuju pada pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan melalui sistem kota-kota dan sistem interaksi desa-kota yang optimal dengan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung sosial ekonomi dalam mengembangkan kawasan strategis.
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan fungsi kawasan dalam menopang daya dukung lingkungan dalam jangka panjang dengan penetapan dan pengembalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan rencana tata ruang dan pengendalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan jenis peruntukan yang telah ditetapkan.
- c. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai kawasan andalan yang mandiri dan pusat kegiatan ekonomi melalui pengamanan dan pemanfaatan wilayah perbatasan (termasuk pulau terluar) untuk kepentingan ekonomi dan penetapan batas wilayah.



2. LINGKUNGAN HIDUP

- a. Menciptakan lingkungan hidup masyarakat yang ramah lingkungan diperlukan perhatian dan kepedulian baik dari pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan, dunia usaha dan masyarakat yang peduli dan mengambil bagian dalam memelihara lingkungan hidup sehat.
- b. Melakukan kajian lingkungan hidup strategis secara arif dan bijaksana dalam mewujudkan keserasian, keseimbangan, keselarasan, harmoni, penciptaan estetika lingkungan, dan keberlanjutan melalui pengembangan kebijakan strategis mengenai program ramah lingkungan dan lingkungan sehat, penerapan insentif dan dis-insentif terpadu dan sinergi dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan dalam rangka menciptakan pemanfaatan ruang wilayah yang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu.
- c. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Dimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas serta sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; peningkatan sumber daya manusia yang



berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta perkembangan asimilasi sosial budaya yang makin mantap sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya, cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dengan cara menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

- e. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup. Dimana kebijakan itu diarahkan terutama bagi generasi muda sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pada masa yang akan datang mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

3. MITIGASI DAN BENCANA ALAM

- a. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi daerah Kabupaten Buol. Secara geografis Kabupaten Buol berada di wilayah lempeng tektonik. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini. Hal itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda



karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.

- b. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; serta memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat untuk menghindari bencana kekeringan dan berkurangnya pasokan air bersih pada masyarakat.

4. SUMBER DAYA KELAUTAN

- a. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan. Arah pembangunan ke depan perlu memerhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas. Dengan cakupan dan prospek sumber daya kelautan yang sangat luas, arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya.
- b. Pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- c. Kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor laut dan daratan serta menyatu dalam



strategi pembangunan nasional sehingga kekuatan darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan bangsa.

- d. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari, antara lain, melalui (a) pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang dapat diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b) melestarikan nilai-nilai budaya serta wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan; dan (c) melindungi dan menyosialisasikan peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi;
- e. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut dilakukan melalui (a) pengembangan sistem mitigasi bencana; (b) pengembangan *early warning system*; (c) pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut; (d) pengembangan sistem pengendalian hama laut, introduksi spesies asing, dan organisme laut yang menempel pada dinding kapal; serta (e) pengendalian dampak sisa-sisa bangunan dan aktivitas di laut.

4.1.7. MEWUJUDKAN KABUPATEN BUOL AMAN, DAMAI DAN BERSATU, ditandai hal - hal berikut :

Agenda pembangunan ini dimaksudkan agar keberagaman atau pluralisme kondisi kehidupan masyarakat daerah dapat terkelola dengan komitmen dan konsistensi yang teguh dari semua elemen masyarakat dalam berbagai tatanan serta masing masing dapat berkembang dan membangun dirinya dengan baik dan tidak lepas dari prinsip keberagaman yang disepakati oleh pendiri bangsa ini (*The Founding Fathers*), yang telah berjasa memperjuangkan, mengisi dan mewariskan kepada generasi berikutnya selanjutnya menjadi kewajiban kita untuk mengisi dan menjaga lebih bermakna lagi bagi generasi Kabupaten Buol selanjutnya.



Kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta suku, agama dan ras yang beragam memerlukan peningkatan kemampuan untuk mengelolah untuk menjamin tetap tegaknya daerah Kabupaten Buol dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya gangguan keamanan masyarakat yang berwujud berbagai bentuk kejahatan serta teror yang berpotensi konflik dalam kehidupan masyarakat telah menimbulkan keresahan, kehidupan yang tidak aman, bahkan akan menimbulkan malapetaka kemanusiaan berupa korban jiwa manusia seperti halnya terjadi di Kabupaten Poso, yang telah menjadi inspirasi bagi masyarakat Kabupaten Buol bahwa faktor keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi sangat - sangat strategis dalam menuntun pembangunan di daerah.

Terdapat beberapa aspek pembangunan yang perlu dilakukan mengisi agenda pembangunan ini, meliputi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan makna dan manfaat kepastian hukum serta jaminan keadilan melalui penataan sistem legislasi daerah serta penataan sistem informasi dan komunikasi kepada masyarakat, baik antar-masyarakat maupun antar-masyarakat dengan pemerintah daerah, dengan arah pembangunan jangka panjang sebagai berikut :

1. KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

- a. Peningkatan kualitas keamanan melalui peningkatan kemampuan aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya, yang terkait dengan sistem rekrutmen yang benar, penambahan jumlah yang memadai personil dengan jumlah masyarakat yang dilayani, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan profesi kebutuhan penugasan, pemenuhan perlengkapan tugas serta perbaikan tingkat kesejahteraan.
- b. Peningkatan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat, akulturasi budaya yang berlangsung harus membangun harmoni dan saling menenrma dan mengisi sehingga memperkuat perekat



persatuan, serta peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang semuanya bermakna dan bermanfaat untuk peningkatan kerukunan hidup antar-masyarakat, antar-suku bangsa sebagai satu Bangsa Indonesia.

- c. Menumbuhkan budaya dialogis antar-komunitas dan organisasi keagamaan, antar-pemimpin dan tokoh agama dan organisasi keagamaan, sehingga terwujud komitmen kebersamaan, keakraban, suasana harmonis, keterbukaan, semangat toleransi yang tumbuh dengan kesadaran dan alamiah sehingga menghilangkan rasa kecurigaan antar-sesama warga masyarakat, warga bangsa dan warga negara.

2. PEMBANGUNAN HUKUM

- a. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap upaya dan tekad pemerintah daerah untuk mewujudkan sistem hukum yang dapat memberikan makna dan bermanfaat memberi jaminan rasa keadilan, serta ketegasan dan kepastian hukum bagi segenap elemen masyarakat tanpa diskriminasi.
- b. Peningkatan kualitas Peraturan Daerah (PERDA) yang memiliki materi bermuatan budaya lokal yang secara sosiologis mencerminkan tata keadilan yang hidup di tengah masyarakat yang sesuai dengan nilai budaya dan nilai agama yang diyakininya, PERDA yang memberi kemudahan dan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk melakukan usaha atau aktivitasnya, menyalurkan aspirasinya, kesempatan yang sama dan luas untuk memberikan peran sertanya, tidak ada nilai diskriminasi, sehingga menginspirasi masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.



- c. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi segenap lapisan masyarakat terutama masyarakat di perdesaan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik nilai budaya masyarakat setempat yang menjadi responden atau target groupnya.

3. PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- a. Menata arus informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah daerah lebih transparan, bertanggungjawab sehingga tidak mengalami distorsi yang dapat menimbulkan perbedaan persepsi yang keliru, pemberitaan media massa yang lebih akurat dijamin kebenarannya dan bertanggungjawab, tidak bernuansa proaktif yang memicu potensi konflik di masyarakat, serta penyebarluasan informasi yang dapat menjangkau sebagian besar masyarakat yang membutuhkan.
- b. Mencegah dan mengeliminir dampak kemajuan teknologi informasi yang sangat mudah, cepat menjangkau masyarakat, membentuk opini yang dapat direkayasa kearah yang bertendensi memicu konflik di masyarakat.
- c. Peningkatan intensitas, kualitas penyebarluasan kebijakan pembangunan melalui berbagai media dan lembaga pengelolah informasi, serta mencegah dan atau meluruskan isu-isu dalam bentuk pemberitaan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat terutama yang cenderung bernuansa SARA.
- d. Peningkatan kinerja Pusat Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah yang dapat melayani kebutuhan informasi secara menyeluruh yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, termasuk bagi para investor dan pelaku ekonomi lainnya dalam mengembangkan usahanya.



- e. Meningkatkan kegiatan komunikasi melalui pendekatan hiburan terutama media elektronik, media cetak dan atau pertunjukan rakyat bagi kepentingan pembentukan sikap positif dan memperluas wawasan dan cara berpikir masyarakat, meningkatkan serta membuka akses kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

4.2. PERAN PUSAT KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MENGACU PADA RENCANA TATA RUANG WILAYAH.

Kabupaten Buol berdasarkan kondisi geografis, dalam penentuan arah pengembangan pengelolaan ruang berlandaskan pada potensi eksternal dan internal wilayah sehingga dapat memanfaatkan keunggulan komparatif dalam sistem wilayah yang ada.

Wilayah Kecamatan di Kabupaten Buol masing masing memiliki kompetensi yang membedakan antara daerah satu dengan lainnya, untuk itu dimungkinkan setiap wilayah memanfaatkan peluang sebesar-besarnya dan sekaligus meminimalkan ancaman eksternal dengan (1). menggali kompetensi inti wilayah (2). Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia lokal (3). Mengembangkan daerah dalam kerangka desentralisasi (4). Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif.

Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan pelimpahan desentralisasi otonomi kepada pemerintah daerah dan penyelenggaraan penataan ruang daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan peningkatan kreatifitas dan inovasi daerah dalam mengembangkan kapabilitas untuk mencapai keunggulan daya saing yang berkelanjutan.



4.2.1. KABUPATEN BUOL DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL

Dalam perspektif Internasional, Kabupaten Buol, berbatasan langsung dengan wilayah perdagangan internasional BIMP-EAGA (*Brunai Darusalam-Indonesia-Malaysia-Philipina - East ASEAN Growth Triagle*) dalam pengembangan pengelolaan ruang diarahkan pada pemanfaatan jalur perdagangan BIMP-EAGA, sehingga memberikan pengaruh perekonomian, perdagangan antar wilayah dan antar pulau serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada.

4.2.2. KABUPATEN BUOL DALAM PERSPEKTIF NASIONAL DAN ANTAR WILAYAH

Pola pengembangan sistem permukiman Provinsi Sulawesi Tengah, arahan pengembangan sistem permukiman di Kabupaten Buol meliputi arahan fungsi kawasan dalam hubungannya dengan skala pelayanan fasilitas dan wilayah pelayanannya, berada pada kota orde kedua Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi Sulawesi Tengah dari 6 PKW yaitu Poso dan sekitarnya, Luwuk dan sekitarnya, Buol dan sekitarnya, Kolonodale dan sekitarnya, Tolitoli dan sekitarnya serta Donggala dan sekitarnya.

Kabupaten Buol merupakan salah satu kota yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dan penghubung transportasi baik antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah maupun antarpusat kegiatan wilayah itu sendiri, selain berfungsi melayani, kabupaten itu sendiri juga sekaligus melayani kabupaten yang ada di belakangnya. Kabupaten Buol berfungsi sebagai daerah yang menunjang Pusat Kegiatan Wilayah yang memiliki:

- 1) Sektor unggulan : Perkebunan, Pertambangan, Peternakan, Pertanian, perikanan dan pariwisata.
- 2) Aksesibilitas tinggi sebagai inlet maupun outlet kawasan hinterlandnya, dimana posisinya tepat berada dijalur BIMP-EAGA.



- 3) Merupakan pengembangan kawasan terpadu mandiri yang memiliki aksesibilitas baik darat maupun laut sebagai kawasan pengumpul produksi sekaligus sebagai pemasarannya untuk pengembangan daya saing wilayah di pasar global.

Kabupaten Buol yang terletak pada bagian ujung utara Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, memiliki peran yang cukup strategis secara kewilayahan dalam skala nasional maupun provinsi. Peran strategis Kabupaten Buol dalam konstelasi regional dapat dilihat dalam beberapa aspek yaitu keterkaitan sistem perkotaan dan pusat pelayanan wilayah, serta keterkaitan sumber daya alam. Dilihat dalam sistem perkotaan baik sistem perkotaan nasional maupun provinsi Kabupaten Buol memiliki peran sebagai kota pendukung percepatan kota-kota pusat pertumbuhan nasional dalam hal ini adalah pendukung Kawasan Andalan (KA) Toli-toli dan sekitarnya, sebagaimana tersurat dalam PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN.

Keberadaan Buol yang terletak di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang mendukung pelayaran pada sabuk tengah Kepulauan Indonesia berpotensi untuk semakin memperkuat peran Buol dalam konstelasi regional, tentu saja peran ini harus saling sinergi dengan Toli-toli yang secara hirarki memiliki pelabuhan laut dengan hirarki lebih tinggi yaitu sebagai pelabuhan nasional. Keberadaan Buol dengan kedekatan dengan ALKI harus dimanfaatkan oleh Kabupaten Buol sebagai pendorong pertumbuhan wilayah, khususnya untuk memperlancar transportasi barang dan orang dari Buol menuju ke wilayah lainnya di sekitar Kabupaten Buol.



4.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk kesinambungan program dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang dibutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Setiap tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mengacu kepada tahapan dan skala prioritas rencana pembangunan jangka panjang nasional dan mencerminkan kondisi riil dan permasalahan daerah yang hendak diselesaikan, dan menjadi skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Buol.

4.3.1. PERENCANAAN TAHUN 2005 - 2007

Sebagai arahan dan pedoman dalam pembangunan Kabupaten Buol Tahun 2005-2007, telah dirumuskan Visi Pembangunan yaitu “**Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Buol Menjadi Masyarakat Berkah**”, bahwa unsur masyarakat BERKAH yang ingin diwujudkan adalah:

- ⊖ Masyarakat modern yang berbudaya, yaitu masyarakat yang berfikir dan bertindak positif, dapat menerima nilai-nilai baru, dinamis, kreatif, enerjik, berpandangan luas, dan berorientasi ke masa depan serta toleran terhadap perbedaan, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama;
- ⊖ Masyarakat mandiri, yaitu masyarakat yang penuh percaya diri, mempunyai motivasi dan prakarsa yang tinggi, mampu mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki, tekad yang kuat dan tahan terhadap goncangan, adaptif terhadap perubahan serta berlaku harmonis terhadap lingkungannya;



- ⊖ Masyarakat egaliter, yaitu masyarakat yang mengakui persamaan hak, menjunjung tinggi nilai HAM, tidak diskriminatif, pengayom, dan memiliki solidaritas social yang tinggi;
- ⊖ Masyarakat terbuka yang demokratis, yaitu masyarakat yang senantiasa menerima perbedaan sebagai suatu proses menuju kebersamaan, mengutamakan kepentingan umum, tidak feodal dan tidak diskriminatif.

BERKAH juga merupakan singkatan dari kata yang bermakna sebagai berikut:

- a) **Budaya.** Artinya menjadikan budaya sebagai alat control menuju masyarakat yang tertib lahir batin, dan disamping itu budaya dikelola untuk mempererat persatuan dan kesatuan;
- b) **Enerjik / semangat,** artinya tidak statis dan dalam melakukan usaha semangat selalu dikedepankan serta tidak mudah putus asa;
- c) **Ramah,** artinya bersikap baik terhadap orang lain (siapa saja beritikad baik), dapat menerima perkembangan baru, tidak serta merta menolak terjadinya perubahan;
- d) **Kreatif,** artinya berupaya menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini, melalui berbagai kreasi yang positif;
- e) **Amanah,** artinya setiap orang memiliki pengabdian dan tanggungjawab terhadap diri dan masyarakatnya;
- f) **Harmonis,** artinya dengan mengedepankan rasa saling menghargai kepada siapa saja dan menumbuhkembangkan rasa saling memahami dalam suasana yang aman, damai, diantara sesama warga masyarakat.

Melalui Misi yaitu (1) melakukan penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan sumber daya aparatur, serta meningkatkan penegakan hukum,



HAM, dan demokratis dalam masyarakat; (2) meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur); (3) meningkatkan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agribisnis serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan (4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2002 - 2007 dan pada Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Buol Tahun 2002- 2007.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagai penjabaran dari Poldas dan Propeda secara konkrit disusun dokumen perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah Kabupaten Buol Tahun 2002 - 2007 yang menjabarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara berencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah.

Kegiatan yang dilakukan tahun 2005 adalah berkonotasi pada, bagian dari pengertian tatanan masyarakat Kabupaten Buol BERKAH, yakni membangun interaksi yang saling menguntungkan menuju satu tujuan yang lebih memberi maslahat, dengan agenda utama pembangunan Kabupaten Buol; yakni 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Mempertahankan kesatuan bangsa dan kerukunan sosial;
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan tegaknya supremasi hokum;
- 3) Percepatan pemulihan ekonomi daerah;
- 4) Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran;
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.

Dari gambaran umum capaian tersebut sebagai jembatan menuju visi yang diamanatkan oleh masyarakat yang perlu dirumuskan keberlanjutan



dari berbagai capaian yang telah di peroleh untuk perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Buol.

4.3.2. RPJMD Ke I (2007 - 2012)

Berdasarkan hasil pembangunan yang telah dicapai dan aspirasi masyarakat Kabupaten Buol yang mengacu kepada kondisi tahun sebelumnya maka skala prioritas yang akan dicapai RPJM - 1 adalah "Optimalisasi Potensi Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Buol Berkah, Yang Sejahtera, Mandiri, Adil, Aman, Damai Dan Demokratis, dimana masyarakat Kabupaten Buol sebagai masyarakat madani yang dalam usahanya selalu berupaya maksimal dan memiliki energitas yang kuat, dalam hidup dan kehidupannya senantiasa berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada fase pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kabupaten Buol menitikberatkan arah pembangunan pada terciptanya suasana aman dan damai yang ditandai dengan meningkatnya rasa aman dan damai serta tidak terjadi lagi konflik antar masyarakat dengan terciptanya harmonisasi kerukunan antar umat beragama khususnya di daerah konflik.

Terciptanya kondisi daerah dalam suasana aman dan damai sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi. Dengan demikian maka pemberdayaan ekonomi rakyat yang didukung pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Buol ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;

Di samping itu tingkat kesehatan masyarakat semakin meningkat yang ditandai dengan menurunnya tingkat kematian bayi dan ibu hamil serta



terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, serta tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi yang ditandai dengan wajib belajar 9 tahun dan peningkatan angka melek huruf.

Bersamaan dengan hal tersebut Pemerintah daerah diharapkan benar - benar dapat memberikan pelayanan optimal pada masyarakat sesuai standar pelayanan minimal, yang ditandai dengan meningkatnya nilai - nilai keadilan, demokratis, persamaan hak dan kewajiban serta partisipasi publik dalam pembangunan semakin tinggi.

Berdasarkan tersebut di atas maka sasaran pembangunan daerah Kabupaten Buol 5 (lima) tahun pada fase RPJMD ke- 1 adalah dititik beratkan pada 9 (sembilan) pokok sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menegakan Supremasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi serta Melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui Penguatan Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah.
3. Mewujudkan Masyarakat Mandiri, Adil, Aman, Damai dan Demokratis.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Konsep Ekonomi Kerakyatan.
5. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan serta Pelayanan Kesehatan.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Perdesaan.
7. Mengembangkan Agrobisnis dan Agroindustri serta Ketahanan Pangan.
8. Mengembangkan Investasi dalam menggali Potensi Sumber Daya Alam.
9. Mengembangkan dan Menciptakan Kawasan Terpadu Antar Wilayah, Antar Daerah guna Peningkatan Akses dan Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi.



4.3.3. RPJMD Ke II (2012 - 2017)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Tahap Pertama, RPJMD Tahap Kedua ditujukan untuk lebih memantapkan penataan di segala bidang dengan menekankan upaya terwujudnya masyarakat madani Kabupaten Buol melalui sumber daya manusia yang berdaya saing, pertanian maju dan sumber daya alam berkelanjutan, ditandai dengan upaya Indeks Pembangunan Manusia yang berdaya saing, Derajat Kesehatan Yang Berkualitas, Indeks Nilai Tukar Petani meningkat dan Swasembada Pangan.

Arahan pembangunan pada fase RPJMD ke-2 ini dilakukan melalui upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam menunjang pembangunan perdesaan yang mandiri, peningkatan kualitas sumberdaya manusia berdaya saing serta penguatan daya saing perekonomian daerah.

Meningkatnya rasa aman dan damai diikuti kemampuan daerah dalam mengelola keragaman (orientasi kelompok, etnik dan agama) yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, diikuti meningkatnya kesadaran dan penegakkan hukum serta penegakkan hak asasi manusia. yang didukung oleh suasana berusaha yang kondusif. Di lima tahun kedua RPJPD ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan hingga 10 persen.

Penguatan pembangunan pertanian yang maju dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumberdaya alam lainnya secara terpadu terus dilakukan dengan penyediaan berbagai infrastruktur yang semakin mantap berkualitas dan lengkap serta peningkatan dan pengembangan teknologi tepat guna sehingga produktifitas dapat ditingkatkan menuju swasembada pangan daerah.

Peningkatan kesehatan masyarakat terus diupayakan terutama status gizi masyarakat dengan mengupayakan peran gender dalam lingkungan



keluarga di samping meningkatnya jumlah angka partisipasi sekolah menengah atas dengan lulusan siap terjun di dunia usaha.

Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam proses rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Kondisi ini didukung oleh peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4.3.4. RPJMD Ke III (2017 - 2022)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, RPJMD ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Buol di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian yang didukung oleh suasana aman dan damai dalam kehidupan masyarakat.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditandai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi terutama tingkat menengah keatas dan kejuruan di samping itu pula terbukanya lapangan pekerjaan yang berimplikasi pada berkurangnya angka pengangguran.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin tinggi sehingga usia harapan hidup turut meningkat, kecukupan gizi serta hilangnya penyakit seperti TBC, BCG, campak dan polio di masyarakat.

Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan penerapan teknologi terpadu antara industri pengolahan dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama



pemerintah daerah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh mantapnya jaringan infrastruktur transportasi serta berkembangnya jaringan jalan ke pusat-pusat kegiatan; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

4.3.5. RPJMD Ke IV (2022 - 2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, RPJMD ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Buol Yang Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera Dalam Tatanan Masyarakat Kabupaten Buol Berkah melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur



perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat. Kondisi itu didukung oleh mantapnya ketertiban dan keamanan; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian dalam konstelasi regional dan global.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan



sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik.

Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan baik dalam negeri maupun modal asing dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan propinsi lainnya berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya



saing serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

Dalam mewujudkan kondisi tersebut di atas diperlukan kesinambungan perencanaan pembangunan pada tahapan selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang tahap II yaitu 2025 - 2045.



BAB V **KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005–2025 merupakan kerangka landasan penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berkelanjutan serta menjadi pedoman umum penyusunan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh aparat dan lembaga pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di daerah.

RPJP Daerah ini juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya, selain itu juga menjadi koridor dalam penyusunan visi dan misi serta program calon kepala daerah yang akan dituangkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.

Keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Buol membutuhkan aktualisasi peran aktif seluruh masyarakat serta sikap mental, tekad dan semangat serta ketaatan dan disiplin penyelenggaraan pemerintah daerah serta seluruh rakyat Kabupaten Buol.

Berdasarkan latar belakang, pengertian, kedudukan dan fungsi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol dibutuhkan langkah langkah sebagai berikut:



- a. Bupati Buol berkewajiban melaksanakan materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah secara konsisten dan bertanggungjawab dengan memanfaatkan secara tepat dan terarah semua potensi pembangunan yang dimiliki, berdaya guna dan berhasilguna serta berkelanjutan.
- b. Sebagai wujud dari upaya mengaktualisasikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mengontrol kinerja pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Buol memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan menjadi dasar penyusunan perencanaan lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah, masyarakat dan kalangan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha dan berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing.
- d. Agar pembangunan daerah Kabupaten Buol dapat mewujudkan visi dan misi yang disepakati, maka perencanaan pembangunan harus lebih proaktif, aspiratif, akomodatif dan partisipatif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat, sinergi antarpelaku pembangunan, antarwilayah dan kawasan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kesamaan pola pikir dan pola tindak guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu perlu kemampuan aparat dan kelembagaan pemerintah daerah yang



amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

- e. Tahun 2025 adalah merupakan masa transisi dari perencanaan jangka panjang Daerah Kabupaten Buol, dimana akan disusun kembali perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Buol untuk periode 2025 - 2045. Untuk itu kepada kepala daerah pada periode tahun 2025 diharapkan agar menyusun RPJPD Kabupaten Buol Tahun 2025 - 2045 untuk kesinambungan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Buol dengan memperhatikan kondisi daerah serta capaian pembangunan tahun - tahun sebelumnya.